



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA



**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

ALWAYS THE BEST

#AKHLAK
BerAKHLAK
Berprestasi, Berkeadilan, Berkompetensi,
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

Jalan: Cengkeh Afo, No: 40, Kel. Maliaro

Telepon: (0921) 3122119 Faksimile: (0921) 3122118

Laman : malut.kemenkumham.go.id / Surel : kanwilmalut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.29.PR.03-223 12 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP)

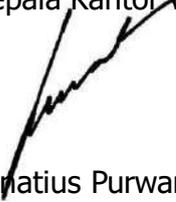
Yth. Plh. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2023, adapun lampiran melalui link Google Drive di bawah ini: https://drive.google.com/drive/folders/1y32Mb_tI3ti7ytiMOGiKxQS23URzM1ow?usp=drive_link

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,


Ignatius Purwanto
NIP. 19670316 199203 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM R.I;
4. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I;
5. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM R.I;
6. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I;
8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I;
9. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I;
10. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I;
11. Kepala BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	v
IKHTISARI EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud Dan Tujuan	11
D. Aspek Strategis	13
E. Isu Strategis	13
F. Sistematika Laporan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Rencana Startegis	19
B. Perjanjian Kinerja	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran	204
C. Capaian Kinerja Anggaran	211
D. Capaian Kinerja Lainnya	218
BAB IV PENUTUP	240
A. Kesimpulan	240
B. Saran	241
LAMPIRAN	244

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023. Capaian kinerja Tahun 2023 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara 2020–2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 menggambarkan Capaian Kinerja Tahun 2023. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IGNATIUS PURWANTO

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran program dan kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya.

Di Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara melaksanakan 4 Program dari 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 22 Sasaran Kegiatan dan 60 Indikator Kinerja Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 indeks	3,73 indeks
2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 Indeks	96 Indeks
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100 %
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	99%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	95%
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	90%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	90%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	36%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	89%
5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	88%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	100%
6	Meningkatnya pelayanan	Persentase klien usia produktif yang	60%	100%

	pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	48%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	39%
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	92%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	92%
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	357%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	180%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	93%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%
10	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	85%	100%

		mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 indeks	3,55 indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 indeks	3,70 indeks
12	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,23%
13	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%
14	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan	499 layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 lokus
15	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	10 laporan
16	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 buku
17	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	100%
18	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-	12 Orang	12 orang

	perundang-undangan	undangan		
19	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	11 kegiatan
20	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	189%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	360%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	90,44%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	45,45%
21	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	4 instansi
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 instansi pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 instansi pemerintah
22	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	4 rekomendasi



Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan anggaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2023

No	Kode Nama Satker	Total			
		Pagu	Real	Sisa	%
1	649029 BPHN	1,540,638,000	1,540,448,000	190,000	99.99%
2	649026 DITJEN KI	1,587,436,000	1,585,006,420	2,429,580	99.85%
3	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	4,376,162,000	4,369,297,207	6,864,793	99.84%
4	649027 DITJEN PP	272,000,000	271,176,692	823,308	99.70%
5	649030 BALITBANGHAM	253,345,000	252,550,389	794,611	99.69%
6	649024 DITJEN PEMASYARAKATAN	719,077,000	716,270,110	2,806,890	99.61%
7	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	6,245,533,000	6,216,368,928	29,164,072	99.53%
8	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	6,190,304,000	6,159,690,575	30,613,425	99.51%
9	632712 RUPBASAN TERNATE	2,347,914,000	2,329,304,371	18,609,629	99.21%
10	649025 DITJEN IMIGRASI	1,712,140,000	1,698,569,142	13,570,858	99.21%
11	352614 LPKA TERNATE	5,283,835,000	5,240,853,473	42,981,527	99.19%
12	649028 DITJEN HAM	283,561,000	281,181,000	2,380,000	99.16%
13	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	7,636,669,000	7,570,454,057	66,214,943	99.13%
14	649022 SETJEN	16,609,138,000	16,454,658,979	154,479,021	99.07%
15	418350 LAPAS PEREMPUAN TERNATE	4,381,774,000	4,337,061,641	44,712,359	98.98%
16	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	5,810,769,000	5,750,343,100	60,425,900	98.96%
17	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	4,179,984,000	4,132,072,231	47,911,769	98.85%
18	649023 DITJEN AHU	2,234,412,000	2,207,242,650	27,169,350	98.78%
19	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	3,439,044,000	3,397,190,216	41,853,784	98.78%
20	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	8,224,370,000	8,105,538,175	118,831,825	98.56%
21	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	9,862,919,000	9,698,504,076	164,414,924	98.33%
22	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	5,340,103,000	5,234,969,824	105,133,176	98.03%
23	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	4,413,312,000	4,315,450,781	97,861,219	97.78%
24	684003 RUTAN WEDA	3,260,820,000	3,042,133,473	218,686,527	93.29%
TOTAL		106,205,259,000	104,906,335,510	1,298,923,490	98.78%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan.

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Hal Ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*Performance Report*) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara di masa yang akan datang.

Berdasarkan 20 sasaran kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara tersebut dan Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649022/2023 Tanggal 30 November 2022;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649023/2023 Tanggal 30 November 2022;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kemenkumham RI (Ditjen PAS) Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649024/2023 Tanggal 30 November 2022;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI (Ditjen Imigrasi) Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649025/2023 Tanggal 30 November 2022;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649026/2023 Tanggal 30 November 2022;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649029/2023 Tanggal 30 November 2022;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penelitian dan Pengembangan HAM (BALITBANG HAM) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649030/2023 Tanggal 30 November 2022;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649028/2023 Tanggal 30 November 2022; dan
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP) Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.01.2.649027/2023 Tanggal 30 November 2022;

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas	: “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum; 3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan; 5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM; 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah. 2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. 3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi. 4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barangmilik negara. 5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi. 6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
2. Divisi Pemasyarakatan	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban. 3. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan

	<p>penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan masyarakat dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</p> <p>4. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat.</p> <p>5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
3. Divisi Keimigrasian	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.	<p>1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
4. Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan	<p>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan</p>

yang bersangkutan di wilayah.	<p>kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.</p> <p>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</p>
-------------------------------	---

Keempat divisi tersebut di atas dibagi menjadi 9 bagian/bidang dan 18 subbagian/subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

Bagian Umum

- Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
- Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

- Subbagian Program dan Pelaporan
- Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

b. Divisi Pemasarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

- Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
- Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

- Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
- Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

c. Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian

- Subbidang Perijinan Keimigrasian
- Subbidang Informasi Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- Subbidang Intelijen Keimigrasian
- Subbidang Penindakan Keimigrasian

d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:

Bidang Pelayanan Hukum

- Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
- Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Bidang Hukum

- Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

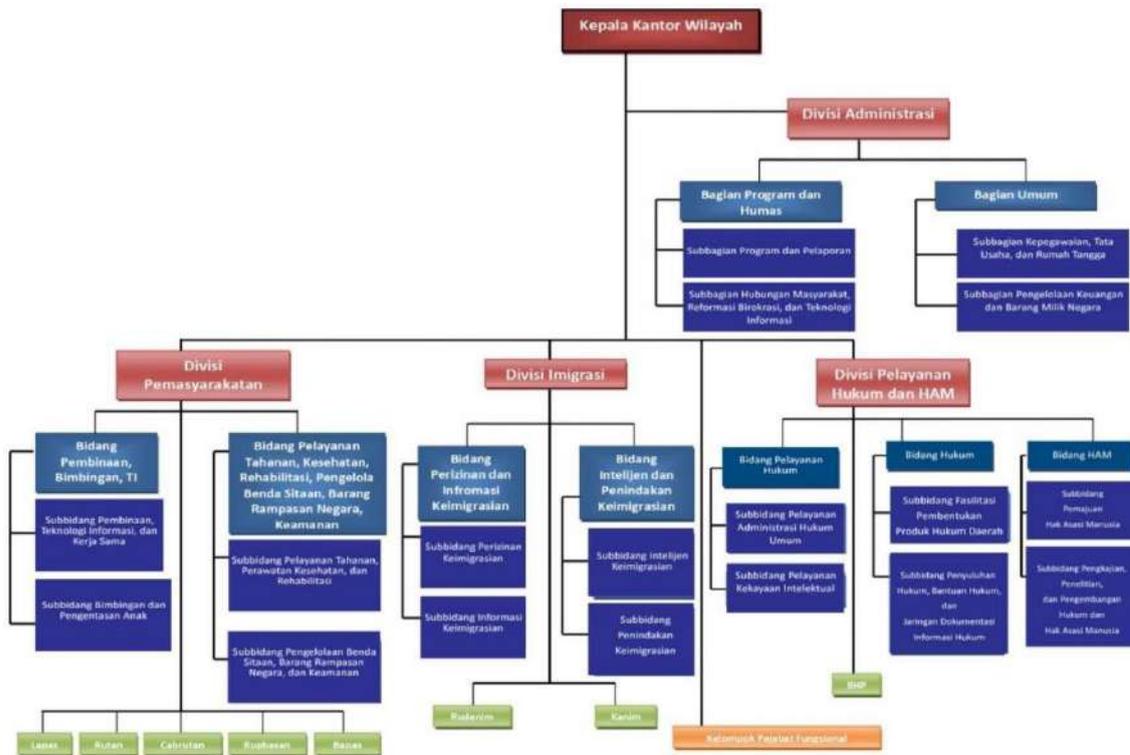
Bidang Hak Asasi Manusia

- Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
- Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1. Struktur Ogranisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Maluku Utara didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan terdapat 869 Pegawai yang tersebar di 16 Satuan Kerja termasuk Kantor Wilayah. Dan Kantor Wilayah sendiri memiliki 119 pegawai yang tersebar di empat divisi. Menurut data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berdasarkan Gender, Tingkat Pendidikan, Jabatan dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Gender

No	Gender	Jumlah
1	Laki-Laki	71
2	Perempuan	48
	Total	119

Tabel 3. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	30
2	DIII	5
3	S1	62
4	S2	24
	Total	121

Tabel 4. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	32
2	JFT	23
3	JFU	64
	Total	119

Tabel 5. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jumlah
1	II/a	1

2	II/b	15
3	II/c	4
4	II/d	5
5	III/a	16
6	III/b	32
7	III/c	10
8	III/d	16
9	IV/a	9
10	IV/b	9
11	IV/c	2
	Total	119

Tabel 6. Jumlah Pegawai di Satuan Kerja Pada Jajaran Kantor Wilayah
Maluku Utara

NO	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kanwil Malut	71	48	119
2	Lapas Kelas IIA Ternate	57	11	68
3	Lapas Kelas IIB Sanana	50	10	60
4	Lapas Kelas IIB Jailolo	47	5	52
5	Lapas Kelas IIB Tobelo	61	8	69
6	Lapas Kelas III Labuha	35	9	44
7	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	18	39	57
8	Lapas Khusus Anak Kelas II Ternate	49	13	62
9	Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate	61	6	67
10	Rumah Tahanan Kelas IIB Weda	34	3	37
11	Rumah Tahanan Kelas IIB Soasio	48	8	56
12	Rupbasan Kelas II Ternate	22	9	31
13	Bapas Kelas II Ternate	26	14	40
14	Bapas Kelas II Tidore	14	14	28
15	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	40	9	49
16	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Tobelo	23	7	30

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama Tahun 2023 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya

dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia. Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkelanjutan.

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

D. ASPEK STRATEGIS

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Maluku Utara antara lain:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 10 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 7 kabupaten/kota tersebut yang terdiri dari 13 UPT Pemasarakatan dan 2 UPT Keimigrasian.
2. Maluku Utara memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki Kawasan Pertambangan yang memungkinkan wisatawan dan tenaga kerja asing masuk.
3. Maluku Utara memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha.

E. ISU STRATEGIS

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023 di antaranya:

No	PERMASALAHAN	IDENTIFIKASI RISIKO	PENGENDALIAN INTERN
1	Kurangnya pemahaman pegawai terhadap reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah yang berdampak pada capaian sasaran strategis nilai Indeks RB Kemenkumham	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi dan zona integritas WBK & WBBM. • Pendampingan pemenuhan data dukung reformasi birokrasi • Internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dan ZI dalam berbagai kegiatan
2	Tidak tercapainya capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Monev capaian kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara
3	Pelaksanaan kegiatan kantor wilayah tidak sesuai dengan disbursement plan.	Terjadinya penurunan nilai SMART Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan nilai SMART Kantor Wilayah secara periodik
4	Belum optimalnya penerapan reward and punishment kepada pegawai	Rendahnya semangat bekerja dan kedisiplinan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian reward kepada pegawai kepegawaian • Telah terbitnya SK reward • Punishment dalam bentuk pengurangan tunjangan kinerja pegawai
5	Layanan kepegawaian dalam administrasi kenaikan pangkat pegawai	Peluang pungli atas usulan kenaikan pangkat pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi layanan kepegawaian Kanwil yang bebas pungli dan gratifikasi melalui berbagai media • Layanan prima dalam pengurusan administrasi kenaikan pangkat • Penerapan layanan pengaduan
6	Potensi terjadinya benturan kepentingan terkait dengan integritas pada pelaksanaan tugas dan fungsi	Terjadinya potensi risiko integritas benturan kepentingan seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat pengelola keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Permenkumham Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM • Sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan pada apel pagi/sore, bimtek, atau sosialisasi
7	Tidak tercapainya kinerja anggaran sesuai target Kementerian Hukum dan HAM	Terjadinya penurunan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pelaksanaan keuangan • Inovasi Sang Pelaut dalam rangka peningkatan pelayanan keuangan.
8	Proses layanan pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Peluang terjadinya gratifikasi atas proses pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi layanan barjas yang bebas pungli dan gratifikasi melalui berbagai media • Layanan pengadaan barjas yang transparan dan akuntabel • Optimalisasi layanan pengaduan
9	Peluang terjadinya gratifikasi atas pelayanan hukum dan HAM	Pemberian gratifikasi atas layanan hukum dan HAM seperti bantuan hukum, notaris, kekayaan intelektual, keimigrasian, dan masyarakatan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi, sosialisasi, diseminasi layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat, pemerintah daerah, komunitas, universitas, pelaku usaha, dan stakeholders.

		lainnya	- Pelaksanaan IP Clinic di wilayah bekerja sama dengan DJKI
10	Optimalisasi Layanan kekayaan intelektual baik personal maupun komunal	Optimalisasi kontribusi Kanwil Kemenkumham Malut dalam meningkatkan investasi dan nilai ekonomi berbasis kekayaan intelektual di wilayah	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dan mengoptimalkan sentra KI
11	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual masih relatif rendah	Minimnya Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual	Mengoptimalkan PPNS terkait dengan Pengawasan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
12	Pengawasan terhadap akan terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual Kurang Maksimal	Belum optimalnya pengawasan dari kantor wilayah terhadap upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengkajian • Koordinasi dengan pemerintah daerah
13	Kurang proaktifnya stakeholders atas hasil analisis kajian	Kualitas hasil kajian dan rekomendasi atas penelitian dan pengembangan hukum dan HAM dari Kanwil Kemenkumham Malut	Permohonan ke Direktorat Jenderal Yankomas terkait dengan Tenaga Ahli yang menangani laporan dugaan pelanggaran HAM
14	Tidak adanya tenaga ahli yang menangani laporan dugaan pelanggaran HAM	Hasil rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan Pemda di Malut terkait pelaksanaan Kab/Kota Peduli HAM • Pemberitahuan melalui surat resmi terkait Pemda Kab/Kota Peduli HAM
15	Tidak seluruh Pemerintah daerah mengikuti Kabupaten/Kota Peduli HAM	Rendahnya ketercapaian jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Maluku Utara	Rapat Koordinasi Pengharmonisasian Ranperda
16	Kurangnya kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pengharmonisasian produk hukum daerah	Berkurangnya jumlah harmonisasi peraturan daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor pengharmonisasian Ranperda • Sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Malut dengan Pemda dan Sekretarian Dewan terkait pengharmonisasian Ranperda
17	Rancangan Perda terkait pengendataan kemiskinan yang selesai diharmonisasi perlu dioptimalkan	Rendahnya pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan terkait pengentasan kemiskinan	Sosialisasi Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan dari Dirjen PP dan Kantor Wilayah
18	Belum adanya sinergi pemangku kepentingan dalam pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Kenaikan jenjang dan pangkat tenaga perancang peraturan perundang-undangan menjadi terlambat	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kemenkumham Malut • Pembentukan Tim Pokja Analisis dan Evaluasi Perda
19	Komunikasi yang kurang kondusif dengan pemangku kepentingan seperti Badan Legislasi Daerah dan Pemerintah Daerah	Masih terdapat produk hukum daerah yang masih berlaku namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi	Panwasda memberikan stimulus kepada OBH dengan pembuatan Layanan Si Perahu

20	Penyelesaian Perkara Perdata lebih dominan ditangani Pihak Eksternal (Organisasi Bantuan Hukum) Maluku Utara dibanding Penyelesaian Perkara Pidana lainnya	Rendahnya layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi kepada masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Monev pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tuisi keimigrasian oleh Divisi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi • Divisi Keimigrasian melaksanakan monev layanan keimigrasian pada Kanim Ternate dan Kanim Tobelo
21	Optimalisasi layanan keimigrasian dalam mendukung peningkatan investasi	Rendahnya layanan keimigrasian dalam mendukung peningkatan investasi dan hilirisasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan keimigrasian berbasis teknologi informasi • Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis keimigrasian pada Kantor Imigrasi dan Penjamin
22	Pemanfaatan layanan keimigrasian khususnya pembuatan paspor di provinsi Maluku Utara belum dapat dijangkau seluruh masyarakat karena karakteristik wilayah kepulauan	Menurunnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan keimigrasian dari Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi terhadap penjamin dan orang asing di wilayah Maluku Utara • Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing
23	Data penjamin orang asing di wilayah belum seluruhnya terdata dengan baik sehingga rentan terhadap pengamanan keimigrasian	Menurunnya Indeks Pengamanan Keimigrasian	Optimalisasi fungsi Pengendalian Divpas melalui upaya peningkatan kualitas penggeladahan dan razia
24	Masih terdapatnya barang-barang yang dilarang keberadaannya di dalam Lapas/LPKA/Rutan	Adanya pengendalian narkotika dan penipuan dari dalam Lapas/LPKA/Rutan	Optimalisasi fungsi Pengendalian Divpas melalui upaya peningkatan kualitas penggeladahan dan razia
25	Masih banyaknya WBP yang memiliki barang-barang terlarang di dalam lapas/LPKA/Rutan	Rentan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat memicu terjadinya kerusuhan pada Lapas/Rutan	<ul style="list-style-type: none"> • Bintorwasdal Divisi Pemasarakatan terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana pada Lapas, dan klien pemsarakatan pada Bapas • Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana dan klien pemsarakatan
26	Pemberdayaan klien usia produktif untuk menjadi mandiri dan berdaya guna di luar lembaga	Rendahnya klien pemsarakatan yang produktif dan mandiri di luar lembaga	Optimalisasi fungsi Pembinaan Divisi Pemasarakatan dalam melibatkan pemerhati pemsarakatan
27	Status mantan Narapidana mempengaruhi klien usia produktif mendapatkan pekerjaan	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana	Optimalisasi fungsi Monev Div PAS melalui peningkatan koordinasi dengan pihak stakeholder terkait untuk status basan baran

	diluar lembaga		
28	Keterbatasan sarana pendukung dan anggaran menjadikesulitan dalam perawatan dan pemeliharaan	Menurunnya nilai benda sitaan dan barang rampasan karena rusak pada Rupbasan	Peningkatan SATOPSPATNAL di wilayah bagi seluruh jajaran
29	Belum optimalnya citra positif masyarakat terhadap Pemasarakatan	Terjadinya pungutan liar pemberian hak WBP pada UPT yang mengakibatkan menurunnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemsarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi, sosialisasi, diseminasi layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat, pemerintah daerah, komunitas, universitas, pelaku usaha, dan stakeholders. • Pelaksanaan IP Clinic di wilayah bekerja sama dengan DJKI

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- d. Memiliki orientasi kepada masa depan
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi

Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakatIkut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
- f. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

3. Tata Nilai kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Tata Nilai BerAkhlaK

Merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati. *Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama”. Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

- 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- 3) Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- 2) Membantu orang lain belajar.
- 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- 2) Suka menolong orang lain.
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- 3) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- 3) Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b. Tata Nilai PASTI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- d. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
- e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
- f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai *outcome/impact* dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020, berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif transparan dan akuntabel Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		2. Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas 3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan Publik SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya Residivis

			<p>masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p> <p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>		<p>4. Persentase Klien Pemasyarakat dan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</p> <p>5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p> <p>6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p>
<p>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</p>	<p>Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga</p>	<p>4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan</p>	<p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan</p>	<p>SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM</p>	<p>1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</p> <p>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ kab/Kota</p>

		<p>5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p>		<p>SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</p>	<p>memenuhi target</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		<p>1. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan</p>	<p>Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.</p>		
		<p>Pelaksanaan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan</p>	<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian

<p>Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi</p>	<p>Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya</p>			<p>SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM</p> <p>SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien</p>	<p>yangmaksimal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi
--	---	--	--	--	--

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Maluku Utara menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah pada tahun 2023. Berikut hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Maluku Utara, yang diuraikan dalam bentuk tabel.

Tabel 7 Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Maluku Utara
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kualitas perundang-undangan 2. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum 	Program Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah 2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan 3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham 2. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 3. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target. 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Ko tamemuhi HAM. 	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM 4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian 3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang BerkepastianHukum 4. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian 6. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum 7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraa Pelayanan Pemasarakata yang Berkualitas di Wilayah 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah 3. Terwujudnya layana adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastia hukum 4. Meningkatnya efektivita pelaksanaan tugas MKNW, MPV dan MPD 5. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yan berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM 6. Terselenggaranya Penegaka Hukum di Bidang Kekayaa Intelektual oleh Kantor Wilaya Kementerian Hukum dan HAM yang Handal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 3. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah 4. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum 5. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 6. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 7. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah 8. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 9. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 10. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase menurunnya residivis; 2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilainya) 4. Persentase tahanan Mendapatkan perlindungan dan perawatan 	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program 4. Pembimbingan Klien Pemasarakatan Indeks Pembinaan Khusus Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar 3. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 5. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
				5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan	4. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar 5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar 6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 7. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 8. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 9. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 10. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 11. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 12. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif 13. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 14. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 15. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya 16. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 17. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 18. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 19. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal 20. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 21. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
						layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 22. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 23. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 24. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 25. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 26. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 27. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib 2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian	1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas 5. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
	<ol style="list-style-type: none"> Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 			<ol style="list-style-type: none"> dokumentasi ihukum. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 		<ol style="list-style-type: none"> Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Birokrasi Reformasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Persentase KTI yang disitasi 	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI Terwujudnya pengelolaan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB" Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90 Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP) Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
			3. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	pengembangan hukum dan hak asasi manusia	

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut merupakan rangkuman dari Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dengan 9 Unit Eselon I yang terdiri dari 4 Program, 22 Sasaran Kegiatan, dan 60 Indikator Kinerja Kegiatan :

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1
2	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus

5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82%
14	Meningkatnya Pelayanan	Persentase menurunnya tahanan yang	90%

	Tahanan di wilayah sesuai standar	overstaying	
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%

		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%		
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%		
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%		
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%		
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %		
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%		
		22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
				Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023.

Tabel 9. Program Dan Alokasi Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023

NO	PROGRAM	DIPA AWAL	DIPA AKHIR
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	13,232,087,000	16,609,138,000
2	Program Administrasi Hukum	2,234,412,000	2,234,412,000
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	719,077,000	719,077,000
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1,712,140,000	1,712,140,000
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	1,587,436,000	1,587,436,000
6	Program Pembentukan Hukum	272,000,000	272,000,000
7	Program Pemajuan HAM	283,561,000	283,561,000
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	1,316,698,000	1,540,638,000
9	Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	253,345,000	253,345,000
TOTAL		21,610,756,000	21,610,756,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja, sehingga dapat menunjukkan *impact/outcome* dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta analisisnya.

Pengukuran capaian kinerja Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Dan beberapa indikator memiliki hubungan berbanding terbalik (nilai persentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik), sehingga pengukuran capaian kinerja juga dihitung dengan formulasi berbanding terbalik. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam menilai capaian Sasaran kinerja, Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 - 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja di atas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 5 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

❖ **CAPAIAN PROGRAM DIVISI ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 2023****SK.1 Terwujudnya Layanan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien**

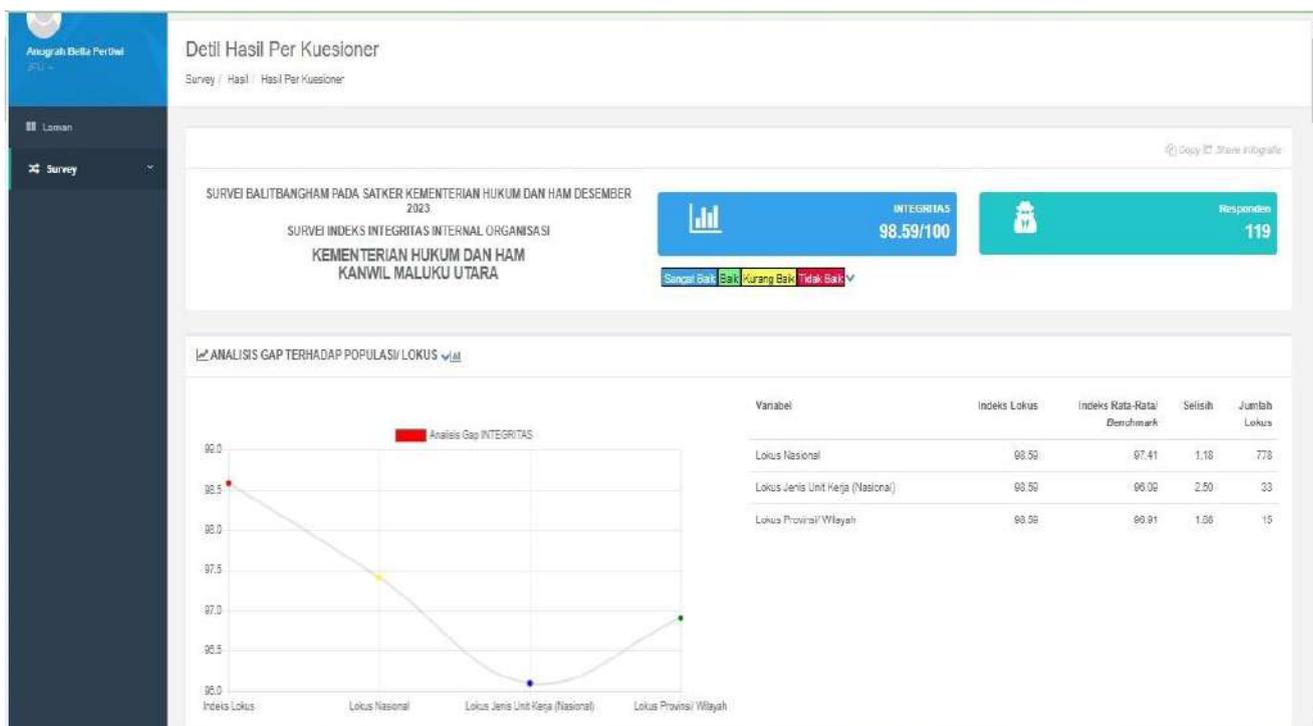
Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah dengan target 3,1 indeks.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1

IKK 1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Kantor Wilayah Maluku Utara beserta jajaran secara rutin melaksanakan survei indeks kepuasan layanan internal dari sisi integritas pegawai secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pegawai dalam memperoleh pelayanan internal. Metode pengukuran ini dilakukan dengan asumsi pegawai sebagai pemberi layanan internal juga berperan sebagai pengguna layanan internal. Jika pegawai (pengguna layanan) merasa puas atas layanan internal maka dapat dikatakan pegawai (pemberi layanan internal) telah bekerja dengan integritas yang tinggi, artinya bekerja secara profesional, bebas dari gratifikasi, pungli, korupsi dan gratifikasi. Sehingga tidak heran jika konten *quisioner* survei meliputi budaya organisasi terkait suap/gratifikasi, sistem anti korupsi melalui *Whistle Blowing System*, Pengelolaan SDM terkait praktik jual beli jabatan hingga pengelolaan anggaran dan pengadaan Barang dan Jasa yang bersih dari korupsi dan gratifikasi. Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal tepat jika diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai.

Survey Penilaian Integritas didapatkan melalui survei secara elektronik atau dikenal dengan e-survey yang diakses pada situs laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Keseluruhan hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Kantor Wilayah Maluku Utara.



Hasil Survey Integritas 2023

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Maluku Utara	Integritas	98,59	3,73	Sangat Baik	A	119

Capaian Kinerja 2023

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3.73	$\frac{3.73}{3.1} \times 100\% = 120,03\%$

Berdasarkan Hasil Survey Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 yang diakses melalui <https://survei.balitbangham.go.id> per 31 Desember 2023, Survey Integritas Internal jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara

menunjukkan angka indeks 3,73. Nilai Integritas Internal sebesar 3,73 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik”, dan nilai ini juga menunjukkan tingkat kepuasan pegawai terkait pelayanan administrasi dan fasilitatif organisasi termasuk tinggi. Dengan membandingkan realisasi indeks integritas dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didapatkan persentase capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan layanan internal sebesar 120,03% , hal ini menunjukkan capaian kinerja telah “**Terpenuhi**” dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori predikat penilaian “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Data survey indeks kepuasan layanan internal dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan pegawai terhadap layanan internal telah terpenuhi dan terus meningkat. Dengan selalu meningkatnya hasil survey indeks kepuasan layanan internal maka berimbas pada peningkatan capaian kinerja. Di tahun 2022 capaian kinerja meningkat dari 3,72 menjadi 3,73 di tahun 2023. peningkatan yang signifikan ini merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanan internalnya. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan internal telah dilaksanakan, termasuk pemberian reward terhadap pegawai yang berprestasi dan berintegritas. Program kegiatan dan inovasi pelayanan internal penunjang keberhasilan ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Data Survey Internal Layanan Kanwil

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	8,6 (nilai indeks skala 10)	8,8 (nilai indeks skala 10)	3,69 (nilai indeks skala 4)	3,72 (nilai indeks skala 4)	3,73 (nilai indeks skala 4)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,72	120%	3,1	3,73	120,03%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks kepuasan layanan internal ditetapkan sebesar 3,1 indeks.

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	7,1 (nilai indeks skala 10)	3,1 (nilai indeks skala 4)			

Dengan tercapainya nilai indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara sebesar 3,73 di tahun 2023, menunjukkan bahwa indikator indeks layanan internal telah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENEGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya layanan fasilitatif Kantor wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor wilayah	3,1	3,73	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Internal diperoleh dari hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) pegawai. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, standar nasional untuk Survey Penilaian Integritas tahun 2023 ditetapkan sebesar 0,74 (74 dalam skala interval 100).

Hasil Survey Integritas 2023

Satker	Indeks	Nilai	Nilai Indeks Skala 4	Predikat Nilai	Mutu	Responden
Kanwil Maluku Utara	Integritas	98,59	3,73	Sangat Baik	A	119

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Standar Nasional

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah	74	98.59	Melebihi standar nasional

Realisasi hasil survey integritas tahun 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara mencapai 98,59 (dalam skala interval 100). Jika dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 74, maka dapat disimpulkan bahwa hasil survey integritas pegawai pada jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara telah melebihi standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan. Sedangkan dibidang

SDM, saat ini penerimaan pegawai, promosi dan kenaikan jabatan telah bersih dari KKN.

Terkait pelaksanaan anggaran, responden menilai bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah telah sesuai aturan dan terbebas dari pemalsuan bukti transaksi. Norma dan aturan juga telah ditegakkan, hal ini terbukti dari adanya hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar kode etik ASN dan aturan disiplin organisasi.

Selanjutnya dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara realtime, sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera. Hal ini juga berimbas dan mendorong pegawai (pemberi layanan internal) untuk selalu melaksanakan tugasnya secara profesional. Jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara memberikan pembinaan pegawai melalui internalisasi terkait tata nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan penegakan norma serta kode etik ASN, terutama pada saat pelaksanaan apel pagi. Beberapa program kegiatan dan inovasi pelayanan internal penunjang keberhasilan pada indikator ini juga telah dilaksanakan dan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator ini, Kantor Wilayah melaksanakan beberapa program kegiatan dan pengembangan inovasi berbasis TI. Untuk meningkatkan profesionalitas SDM melalui implementasi Corporate University (*Corpu*) dilaksanakan kegiatan *Couching Mentoring*, Pembinaan dan Pengembangan Karakter ASN serta Penguatan dan Pendampingan Pelaksanaan Tugas dan fungsi. Bahkan untuk mendorong semangat melayani, Kantor Wilayah memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan berintegritas berdasarkan pooling terbanyak.

Sejalan dengan peningkatan layanan internal, Divisi Administrasi Kantor Wilayah Maluku Utara telah menciptakan terobosan baru Beberapa inovasi layanan administrasi berbasis Teknologi Informasi juga dikembangkan di lingkungan Divisi Administrasi Kantor Wilayah Maluku Utara demi terwujudnya layanan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien, antara lain :

- a. SANG PELAUT, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan proses tracking sistem terkait progres pembayaran dari pertanggungjawaban diterima sampe terbit sp2d.
- b. BERLAYAR BARENG, merupakan aplikasi yang berfungsi untuk permohonan layanan pemeliharaan dari skema manual pindah ke aplikasi berbasis web serta mempermudah tracking terkait progres pemeliharaan BMN.
- c. BIMTEK PENTAS, Merupakan bimibingan teknis peningkatan kualitas laporan untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan kinerja anggaran.

❖ CAPAIAN PROGRAM DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SK.2 Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah dengan target 82 indeks.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks

IKK.1 Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR PAS-01.PR.01.01 TAHUN 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-

benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	82 Indeks	96 Indeks	117 % $(96 / 82) \times 100\% = 117\%$

Dari capaian kinerja tersebut terlihat bahwa Divisi Pemasarakatan bersungguh-sungguh dalam perbaikan pelayanan pemasarakatan, upaya pemenuhan hak asasi manusia pada Warga Binaan Pemasarakatan berupa lingkungan pemasarakatan yang layak, bersih dan sehat. dan tidak hanya itu juga pemberian bantuan hukum terhadap para Tahanan yang kurang mampu dan butuh bantuan serta penyuluhan hukum bagi masyarakat awam. Pembekalan berupa program pembimbingan keterampilan bagi narapidana yang dipersiapkan bagi mereka kembali ke tengah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa karena kebutuhan primer dan program Pendidikan bagi Narapidana dewasa dan Anak Pidana agar tidak menyalahi pemenuhan hak – hak pendidikan pada mereka yang mau belajar dan yang masih dalam rentang usia wajib belajar.

Dan bagi mereka yang sudah bebas, ada peran balai pemasarakatan yang membina mereka secara berkelanjutan dan memonitor perilaku dan pencegahan terhadap tindak criminal yang pernah mereka lakukan dan agar tidak berulang, walaupun tidak sedikit pula yang Kembali melakukan pelanggaran berupa

pengulangan ataupun tindak criminal yang lebih tinggi, tentu hal ini akibat belum optimalnya pemetaan yang memisahkan antar jenis tindak criminal di dalam Lapas dan Rutan. Dan juga tidak kalah pentingnya, pada Rubasan terkait manajemen barang sitaan dan barang bukti tindak kriminal yang perlu di lakukan penghapusan hingga lelang agar terjadi sirkulasi pada area penyimpanan Rubasan dan juga tidak mengendap terlalu lama barang-barang yang demikian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.

Data indeks Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan tidak dapat dibandingkan secara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, hal ini mengingat terdapat perbedaan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 dari 9 indeks akumulasi perhitungan Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah hanya dilakukan pengukuran pada satu indeks, yaitu Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat dengan perolehan realisasi 97. Sedangkan untuk tahun 2022, terdapat perbedaan Perjanjian Kinerja yang menyebabkan tidak adanya pengukuran indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah. Sementara untuk pengukuran indeks penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yang merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan ini merupakan suatu pengukuran yang baru dalam perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Divisi Pemasyarakatan pada Tahun 2023.

Data Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah

Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	2021	2022	2023
	80 (IKM)	81	96

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah	81	89.33	110,28%	82	96	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024**

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	80	81	82	83

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah	82	96	Melebihi Target

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah ditetapkan sebesar 82 indeks. Dengan tercapainya nilai Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara sebesar 96 indeks di tahun 2023 menunjukkan bahwa indikator Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah melampaui target jangka menengah.

Data indeks Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbaikan dan pengoptimalan target kinerja tiap tahunnya. Dengan selalu meningkatnya hasil indeks di tahun 2023, dimana capaian kinerja meningkat dari target 82 dan pada tahun 2023 ini menjadi 96, peningkatan yang cukup signifikan ini merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanan prima,

pemenuhan hak-hak warga binaan hingga persiapan pengembalian mereka ke dalam masyarakat.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam upaya menjaga terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah pada 9 indeks yakni Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak dan Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dilakukan pengukuran melalui Survei IPK- IKM. Dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Balitbangham dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara cepat sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera.

Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dan lapas/rutan jajaran berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan baru. Salah satunya adalah penempatan berdasarkan tingkat Resiko rendah, menengah dan Tinggi baik dari sisi kesehatan dan keamanannya terhadap tahanan baru yg masuk di LAPAS/RUTAN.

Pada bidang pembinaan dan kemandirian, Seluruh warga binaan pemasyarakatan telah mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas, LPKA dan Rutan yang meliputi kegiatan kerohanian dan jasmani, kesadaran berbangsa, bernegara dan kesadaran hukum (Perubahan Perilaku).

SK.3 Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

Sasaran Kinerja ini memiliki 3(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90%

IKK.1 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	90 %	$(215 : 215) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100 % Overstaying 111%

Realisasi penanganan overstaying pada LAPAS/RUTAN pada Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Tah	Jlh Penanganan Overstaying	Jlh Overstaying	Persentase (%)
1.	Lapas Ternate	-	-	-	-
2	LAPAS Sanana	25	25	-	100
3	LAPAS Tobelo	28	28	-	100
4	LAPAS Jailolo	11	11	-	100
5	LAPAS Labuha	32	32	-	100
6	LPP Ternate	5	5	-	100
7	LPKA Ternate	4	4	-	100
8	RUTAN Ternate	100	100	-	100
9	RUTAN Soasiu	26	26	-	100
10	RUTAN Weda	9	9	-	100
	TOTAL	215	215		100 %

Data over staying pada tahun 2023 sebesar 100 % atau sejumlah 215 orang tahanan tidak mengalami over staying. Sehingga tingkat keberhasilan dari target penyelesaian *over staying* sebesar 90% terlampaui yaitu sebesar 100. Semakin kecil persentase overstaying, maka semakin baik kinerja jajaran pelayan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi tahanan. Adapun untuk mengetahui persentase penurunan *overstaying* adalah dengan menghitung jumlah overstaying dibagi total tahanan dikali seratus persen.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80	80	100 %	90	100	111%

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar (100 %) sedangkan untuk realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar (111,%) sehingga dapat dinyatakan bahwa penanganan terhadap overstaying berhasil dilaksanakan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	70 %	80 %	90 %	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	Menurunnya Persentase tahanan yang overstaying	90 %	100 %	Melebihi Target

Persentase menurunnya tahanan yang overstaying pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah mengalami peningkatan sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pelayanan tahanan pada UPT Pemasarakatan di Maluku Utara telah sesuai standar

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase menurunnya tahanan yang overstaying di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun penyebab Keberhasilan dikarenakan kapasitas lapas dan rutan yang lebih besar sehingga mampu menampung semua tahanan yang ada. Serta koordinasi yang baik antara lapas rutan dan kanwil Maluku Utara.

IKK.2 Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90 %	(248 : 251) × 100% = 99%	Realisasi dibagi target dikali 100% = 110%

Persentase Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh yang mendapatkan penyuluhan hukum	Jlh Tahanan
1.	Lapas Ternate	-	
2	LAPAS Sanana	19	19
3	LAPAS Tobelo	41	41
4	LAPAS Jailolo	5	5
5	LAPAS Labuha	19	19

6	LPP Ternate	17	17
7	LPKA Ternate	5	5
8	RUTAN Ternate	100	103
9	RUTAN Soasiu	22	22
10	RUTAN Weda	20	20
11	TOTAL	248	251

Jumlah Tahanan yang mendapatkan layanan penyuluhan Hukum mengalami peningkatan 9% dari target yang ditetapkan di tahun 2023 dikarenakan Tahanan pada Lapas dan Rutan mendapatkan Penyuluhan Langsung dari Petugas Lapas dan Rutan dan juga mendapatkan Penyuluhan Hukum yang melibatkan JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80	100	125 %	90	99	110%

Realisasi Tahanan tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum tahun 2022 adalah sebesar 100% dengan capaian 125% dan realisasi tahun 2023 adalah sebesar 99% dengan capaian sebesar 110% sehingga dapat dinyatakan bahwa semua tahanan memperoleh layanan penyuluhan hukum.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70 %	80 %	90 %	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90 %	99 %	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tercapainya Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di dalam Lapas dan Rutan dikarenakan adanya Penyuluhan Hukum kepada tahanan yang dilakukan Pihak Lapas/Rutan serta LBH dan instansi terkait kepada tahanan misalnya memberikan sosialisasi pada tahanan yang baru masuk terkait Hak dan Kewajiban.

IKK.3 Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90 %	$(90 : 94) \times 100\% = 95\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 105%

lapas/rutan juga memberikan fasilitas bantuan hukum bagi Tahanan yang kurang mampu. Layanan ini diberikan kepada Tahanan yang kurang mampu dengan tujuan mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan, yang dapat dilihat pada table berikut :

Realisasi tahanan yang Memperoleh Fasilitas Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS LPKA	Jlh Tah	Jlh Tah tidak mampu (miskin)	Jlh Tah Miskin yang memperoleh bantuan hukum
1.	Lapas Ternate	-	-	-
2	LAPAS Sanana	19	6	6
3	LAPAS Tobelo	41	12	8
4	LAPAS Jailolo	5	36	36
5	LAPAS Labuha	19	-	-
6	LPP Ternate	17	-	-
7	LPKA Ternate	5	-	-
8	RUTAN Ternate	103	40	40
9	RUTAN Soasiu	22		
10	RUTAN Weda	20	-	-
11	TOTAL	251	94	90

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80	100	125 %	90	95	105%

Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di UPT Pemasarakatan Maluku Utara mencapai 95%, lebih dari target yang telah ditentukan sebesar 90%. Dengan kata lain, indikator fasilitas bantuan hukum mencapai target. Bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tahanan yang benar-benar kurang mampu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70 %	80 %	90 %	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Sesuai Standar	Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90 %	95 %	Melebihi Target

persentase tahanan yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum mengalami peningkatan target dari tahun sebelumnya, dari 80% menjadi 90%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam hal bantuan hukum pada tahun 2023 ini melebihi target dari 90% menjadi 95% dikarenakan UPT Lapas Rutan di Maluku Utara masih mengandeng beberapa OBH yang terdaftar oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara, Lapas Rutan masih koordinasi dengan OBH dan APH terkait bantuan hukum bagi Tahanan yang berada di dalam.

SK.4 Meningkatkan pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi

Sasaran Kinerja ini memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%

	4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%
	5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%
	6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
	7. Persentase narapidana yang bekerjadan produktif	72%

IKK.1 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	(1111 : 1235) × 100% = 90%	Realisasi dibagi target dikali 100% = 128 %

narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi yang memperoleh NILAI BAIK (memuaskan) pada instrument penilaian kepribadian	Jlh Napi yang mendapatkan program pembinaan
1	LAPAS Ternate	266	284
2	LAPAS Sanana	103	188
3	LAPAS Tobelo	156	156
4	LAPAS Jailolo	66	68
5	LAPAS Labuha	70	81
6	LPP Ternate	104	104
7	LPKA Ternate	41	49
8	RUTAN Ternate	170	170
9	RUTAN Soasiu	95	95
10	RUTAN Weda	40	40
	Total	1111	1235

Penilaian Kepribadian bagi narapidana dilaksanakan oleh jajaran masyarakat (Lapas dan Rutan) yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan dimaksud dapat berupa pembinaan keagamaan, olahraga, kesenian, pembinaan intelektual dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara seperti kepramukaan. Pengukuran indikator kinerja difokuskan pada narapidana yang mendapatkan penilaian baik dengan predikat “Memuaskan”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65	100	166%	70	90	128%

Data tahun 2023 terdapat 1.111 dari 1.235 narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian, menunjukkan menunjukkan 90% Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian mendapatkan penilaian baik dengan predikat “Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 70%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	97 %	98 %	70 %	75 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	90 %	Melebihi Target

Terlihat Realisasi sebesar 90% yang sudah melebihi target kinerja jangka menengah. Hal ini merupakan hasil upaya dari program yang dilaksanakan Lapas/Rutan di Maluku Utara. Diharapkan persentase kenaikan jumlah tahanan yang berpredikat “Memuaskan” dalam penilaian kepribadian terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan Lapas/Rutan dalam program pembinaan kepribadian.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Walaupun terdapat penurunan realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 10 %, namun realisasi pada tahun 2023 ini tetap diatas target jangka menengah yaitu sebesar 70% atau 20% diatas target, hal ini dikarenakan kesadaran dari Warga Binaan akan mengikuti program pembinaan kepribadian.

IKK.2 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang <u>mendapatkan Hak Remisi</u>	99%	(978 : 988) × 100% = 99 %	Realisasi dibagi target dikali 100% = 100 %

Narapidana yang memperoleh remisi Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi yang mendapat remisi	Jlh Napi yang memenuhi syarat untuk diusulkan remisi
1.	LAPAS Ternate	361	371
2	LAPAS Sanana	214	214

3	LAPAS Tobelo	67	67
4	LAPAS Jailolo	48	48
5	LAPAS Labuha	86	86
6	LPP Ternate	13	13
7	LPKA Ternate	27	27
8	RUTAN Ternate	65	65
9	RUTAN Soasiu	74	74
10	RUTAN Weda	23	23
	TOTAL	978	988

Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98	98	100%	99	99	100%

Realisasi dan capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97 %	98 %	99 %	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99 %	99 %	Melebihi Target

Data tahun 2023 menunjukkan sebanyak 978 Napi telah mendapatkan hak remisi dari total 988 Napi yang diajukan dan memenuhi syarat mendapatkan hak remisi. Artinya 99% Napi yang diajukan berhasil mendapatkan remisi. Dengan tercapainya target yang ditentukan sebesar 99%, menunjukkan kinerja jajaran Lapas/Rutan di wilayah Maluku Utara memuaskan dan lebih memperhatikan hak-hak Narapidana.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terutama diatur dalam pasal 10 terkait pemenuhan hak warga binaan, hal ini sangat berdampak pada pemberian remisi atau pengurangan hukuman sementara bagi narapidana yang telah memenuhi syarat administratif, maupun syarat substantif. Pada tahun ini pemberian hak remisi meningkat yaitu sebesar 1%, hal ini selain disebabkan oleh kepatuhan narapidana dalam menaati peraturan dalam lapas dan rutan, senantiasa aktif dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam program pembinaan yang diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak remisi.

IKK. 3 Persentase Narapidana Yang mendapatkan Hak Integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. WBP diberikan hak integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Asimilasi, Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMB). Hak tersebut akan diberikan apabila narapidana memenuhi persyaratan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang <u>mendapatkan Hak Integrasi</u>	85 %	$(185 : 205) \times 100\% = 90\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 106%

Jumlah narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi yang mendapatkan program reintegrasi social	Jlh Napi yang memenuhi syarat diusulkan Integrasi Jumlah yang diusulkan
1.	LAPAS Ternate	81	92
2	LAPAS Sanana	14	14
3	LAPAS Tobelo	19	31
4	LAPAS Jailolo	7	7
5	LAPAS Labuha	23	25
6	LPP Ternate	6	7
7	LPKA Ternate	7	1
8	RUTAN Ternate	19	19
9	RUTAN Soasiu	8	8
10	RUTAN Weda	1	1
	TOTAL	185	205

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang <u>mendapatkan Hak Integrasi</u>	80	98	123%	85	90	106%

Data narapidana yang telah memenuhi syarat diusulkan untuk mendapatkan layanan integrasi pada tahun 2023 adalah 205 Napi. Sedangkan data narapidana yang mendapatkan layanan integrasi pada tahun 2023 adalah 185 Napi. Dengan Realisasi yang meningkat 5% dari target 85% yaitu 90% yang mendapatkan hak integrasi, menunjukkan keberhasilan jajaran Lapas di Maluku Utara dalam berkinerja pada indikator ini.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang <u>mendapatkan Hak Integrasi</u>	75 %	80 %	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang <u>mendapatkan Hak Integrasi</u>	85 %	90 %	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Seperti halnya pelaksanaan remisi, pemberian hak integrasi kepada narapidana pada tahun 2023 ini juga mengalami 5% jika dibandingkan dengan target, hal ini selain disebabkan oleh dampak regulasi, namun juga lebih didorong oleh kepatuhan narapidana dalam menaati peraturan dalam lapas dan rutan, senantiasa aktif dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban serta kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam program pembinaan yang diberikan sebagai syarat untuk mendapatkan hak integrasi.

IKK.4 Persentase Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
---------	-------------------	--------	-----------	-----------------

Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang <u>mendapatkan Hak pendidikan</u>	85 %	$(87 : 87) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 125 %
---	---	------	----------------------------------	---

Narapidana yang mendapatkan hak pendidikan Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Napi yang memperoleh Hak Pendidikan		
		SD	SMP	SMA
1	LAPAS Ternate	9	15	14
2	LAPAS Sanana	-	-	-
3	LAPAS Tobelo	-	-	-
4	LAPAS Jailolo	-	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-	-
6	LPP Ternate	4	5	5
7	LPKA Ternate	7	7	21
8	RUTAN Ternate	-	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-	-
10	RUTAN Weda	-	-	-
	TOTAL	20	27	40
		87		

Direktorat Pemasyarakatan memberikan hak mendapatkan pendidikan yang layak bagi Narapidana. Memberikan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk pembinaan bagi narapidana, sehingga diharapkan melalui pendidikan narapidana tereduksi, sadar hukum dan tidak mudah terprovokasi pada hal-hal negatif. Di jajaran pemasyarakatan Maluku Utara sendiri, Hak pendidikan ini diberikan untuk narapidana yang memenuhi syarat atau tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan, dilaksanakan program Kejar paket A, paket B, dan paket C.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang <u>mendapatkan Hak pendidikan</u>	80	80	100%	85	100	125%

Divisi Pemasarakatan Maluku Utara mendukung upaya Direktorat Jenderal pemasarakatan dalam mencerdaskan bangsa dan proses pembinaan narapidana. Jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 85%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan/capaian kinerja jajaran pemasarakatan Maluku Utara dalam memberikan hak pendidikan kepada narapidana mencapai 125%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang mendapatkan Hak pendidikan	75 %	80 %	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang <u>mendapatkan Hak pendidikan</u>	85 %	100 %	Melebihi Target

Dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 85%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan/capaian kinerja jajaran pemasarakatan Maluku Utara dalam memberikan hak pendidikan kepada narapidana mencapai 125%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana yang memperoleh Tahanan yang mendapatkan Hak pendidikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan keaktifan warga binaan dalam mengikuti program pendidikan dilatarbelakangi oleh kesadaran warga binaan terkait pentingnya akan pendidikan.

IKK.5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17 %	$(10 : 10) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 588 %

Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi Resiko tinggi yang berubah perilaku / sadar dan patuh	Jlh Napi resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan
1	LAPAS Ternate	7	7
2	LAPAS Sanana	3	3
3	LAPAS Tobelo	-	-
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	TOTAL	10	10

setelah dilakukan *assessment* narapidana selama periode 2023, terdapat 10 narapidana resiko tinggi, dan seluruh narapidana tersebut wajib mengikuti kegiatan pembinaan khusus. Pembinaan khusus diimplementasikan melalui kegiatan sosialisasi

bahaya terorisme, pendidikan dan kesadaran bernegara, pembinaan keagamaan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15	100	100%	17	100	100%

Dari pengukuran diatas, persentase jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh, dan disiplin mencapai 100%, yang artinya jika dibandingkan dengan target yang ditentukan sebesar 17%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan capaian kinerja jajaran Lapas di Maluku Utara dalam pembinaan narapidana resiko tinggi mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13 %	15 %	17%	19 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17 %	100 %	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya

menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penurunan angka narapidana resiko tinggi sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang manusiawi oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagian besar perubahan perilaku Narapidana resiko tinggi menjadi sadar dan patuh serta disiplin.

IKK.6 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	$(280 : 775) \times 100\% = 36\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 116%

Direktorat Pemasyarakatan mensyaratkan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam hal ini pembinaan keterampilan kerja pada Lapas harus menerbitkan sertifikat sebagai bukti kompetensi/kemampuan kerja narapidana. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat. Untuk itu Lapas bekerjasama dengan lembaga keterampilan kerja dan Balai Latihan Kerja Kab/Kota yang dapat menerbitkan sertifikat.

Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	Jlh Napi
1	LAPAS Ternate	92	284
2	LAPAS Sanana	60	130
3	LAPAS Tobelo	32	156
4	LAPAS Jailolo	20	68
5	LAPAS Labuha	32	80
6	LPP Ternate	22	30
7	LPKA Ternate	22	27

8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	280	775

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan voaksi bersertifikasi	80	100	100%	31	36	116%

Dengan memperhatikan persentase realisasi sebesar 36% dan target kinerja sebesar 31% menunjukkan Lapas telah berhasil membina narapidana sehingga mampu hidup produktif dan mandiri, dengan nilai capaian kinerja mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25 %	28 %	31%	34 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	36 %	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasidi wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Napi yang mengikuti kegiatan keterampilan kerja berhasil mendapatkan sertifikat. Artinya 36% napi telah dipastikan memiliki kompetensi kerja sesuai standar. Diharapkan sertifikat tersebut dapat digunakan mantan napi sebagai bekal untuk mencari pekerjaan di tengah masyarakat sehingga dapat hidup produktif, mandiri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan

IKK.7 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Sebelum Kembali ke tengah masyarakat, narapidana mengikuti program asimilasi.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Peningkatan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	(189 : 211) × 100% = 89 %	Realisasi dibagi target dikali 100% = 123%

Narapidana yang bekerja dan produktif Tahun 2023

No	RUTAN / LAPAS / LPKA	Jlh Napi yang bekerja dan produktif	Jumlah Napi yang menjalankan program asimilasi
1	LAPAS Ternate	64	25
2	LAPAS Sanana	15	25
3	LAPAS Tobelo	30	32

4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	80	129
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	TOTAL	189	211

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana narapidana yang bekerja dan produktif	67	67	100%	72	89	123%

Tinggi rendahnya capaian pada indikator ini, diukur dari berapa jumlah mantan narapidana yang telah menjalani program asimilasi, mendapatkan pekerjaan dan produktif setelah mereka bebas. Berdasarkan hasil pantauan Bapas dan Lapas, pada tahun 2023 terdapat 189 napi mendapatkan pekerjaan ataupun bekerja secara mandiri setelah bebas dari total 211 narapidana yang telah mengikuti program asimilasi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana narapidana yang bekerja dan produktif	62 %	67 %	72%	77 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Peningkatan Pelayanan Pembinaan	Persentase narapidana narapidana yang	72 %	89 %	Melebihi Target

Kepribadian, Pelatihan Pendidikan Penanganan Narapidana Tinggi	Vokasi, dan Resiko	bekerja dan produktif		
---	--------------------------	--------------------------	--	--

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase narapidana narapidana yang bekerja dan produktif di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Lapas dan Rutan di Maluku Utara menyelenggarakan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, serta minat dan bakat warga binaan, disamping itu juga peningkatan kualitas SDM petugas pembinaan, sehingga skill warga binaan yang telah selesai menjalani pembinaan dapat langsung menerapkan ilmunya.

SK.5 meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan Baran di wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.5	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%

IKK 1 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Keberadaan basan baran ini sangat penting karena digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan/peradilan, dan pada akhirnya kepemilikannya kembali pada pemilik basan baran berdasarkan putusan pengadilan. Kinerja Rupbasan pada indikator ini difokuskan pada kondisi baik basan baran. Kondisi baik ini dinilai melalui proses depreciasi (proses penilaian taksiran wajar oleh tim penilai), sehingga basan baran tersebut patut dan mendapatkan rekomendasi untuk dilelang.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	80 %	$(8:9) \times 100\% = 88\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 110 %

Data jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya

No	RUPBASAN	Jlh rekomendasi lelang Basan baran	Jumlah penilaian depriasi basan baran
1.	Rupbasan Ternate	8	9

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Basan baran yang dititipkan pada Rupbasan selama periode 2023 telah melalui proses penilaian taksiran wajar. Namun setelah dilakukan taksiran kondisi pada seluruh basan baran, terdapat 8 basan baran yang mendapat rekomendasi lelang sehingga dengan data dan formulasi pengukuran seperti diatas.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	80	80	100%	80	88	110%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	60 %	70 %	80%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan

Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	80 %	88 %	Melebihi Target
--	--	------	------	-----------------

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka pencapaian realisasi kinerja pada pengelolaan basan baran tahun 2023 terjadi kenaikan 8 %. Langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan tahun 2024 sebagai berikut : meningkatkan koordinasi dengan para APH, mengusulkan tambahan anggaran Biaya pemeliharaan barang titipan.

IKK. 2 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pengelolaan Basan / Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80 %	$(3:3) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 125 %

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan
Putusan yang berkekuatan hukum tetap

No	RUPBASAN	Jlh basan yang telah dieksekusi	Jlh basan yang dikeluarkan berkekuatan hukum tetap.
1.	Rupbasan Ternate	3	3

Saat ini yang menjadi permasalahan utama Rupbasan di Indonesia adalah Overload. Semakin banyaknya barang sitaan yang dititipkan menyebabkan penuhnya gudang Rupbasan yang selanjutnya menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan dan pengamanan barang sitaan tersebut. Salah satu solusi menanggulangi masalah tersebut

adalah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk segera menetapkan status hukum barang sitaan. Dengan adanya ketetapan hukum pasti yang dimiliki barang sitaan (inkrah) maka selanjutnya Rupbasan dapat melaksanakan eksekusi (mengeluarkan barang sitaan dari gudang Rupbasan).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	60	100	166%	80	100	125%

Formulasi diatas memiliki hubungan berbanding lurus, artinya semakin tinggi persentase eksekusi barang sitaan maka kinerja Rupbasan semakin baik. Selama periode 2023 di jajaran Rupbasan Maluku Utara telah berhasil mengeksekusi 3 unit dari total 3unit barang sitaan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	40 %	60 %	80%	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80 %	100 %	Melebihi Target

4. Perdingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Bahwa Pelaksanaan Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan peningkatan Koordinasi APH sehingga tidak terjadi penumpukan basan baran dan koordinasi tentang status hukum basan baran, adapun kendala dalam pelaksanaan tugas adalah lambatnya pihak kejaksaan mengeksekusi

SK.6 Meningkatnya Pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar Lembaga di wilayah sesuai standar

Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang Memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%

IKK 1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga

Berdasarkan UU No.12 Tentang Masyarakat, Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap : terpidana bersyarat, anak pidana, dan anak negara. Terhadap terpidana bersyarat pembimbingan dapat dilaksanakan dengan memberikan pembinaan latihan kerja sebagai bekal memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar Lapas.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien	Persentase klien usia produktif	60 %	$532: 532) \times 100\% =$	Realisasi dibagi target dikali 100%

pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak padaluar lembaga di wilayah sesuai standar lembaga di wilayah sesuai standar	yang Memperole atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga pekerjaan di luar lembaga		100%	166%
---	---	--	------	------

Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan diluar lembaga

No	BAPAS	Jlh Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	Jlh Klien
1.	BAPAS Ternate	390	390
2	BAPAS Tidore	124	124
	Total	532	532

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50	50	100	60	100	166%

Data diatas menerangkan bahwa sebesar 100% klien Bapas usia produksi berhasil memperoleh/melanjutkan pekerjaan di luar Lapas setelah mendapatkan pembinaan Latihan kerja. Hal ini berarti Bapas telah berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai pembimbing masyarakat. Dan jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebesar 60%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan Bapas pada indikator ini mencapai 166%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40 %	50 %	60%	70 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang Memperole atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60 %	100%	Melebihi Target

Data diatas menerangkan bahwa realisasi sebesar 100% yang melebihi target 60% dikarenakan Meningkatnya realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase klien usia produktif yang Memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Meningkatnya realisasi persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga tahun 2023 tidak terlepas dari keberhasilan Bapas dalam melaksanakan fungsinya.

IKK.2. Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55 %	$(18: 37) \times 100\% = 48\%$	Realisasi dibagi target dikali 87 %

Data Jumlah klien anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2023

No	BAPAS	Jlh Klien Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Jumlah pendampingan anak

1.	BAPAS Ternate	5	12
2	BAPAS Tidore	13	25
	Total	18	37

Litmas Anak difokuskan pada kepentingan terbaik bagi klien anak dengan tujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan klien anak maka putusan pengadilan anak harus lebih bersifat humanis dan menghindari *judgement* yang justru membuat mereka mendapat stigma negatif dan bisa mengganggu psikologis Anak. Dengan kata lain putusan pengadilan anak sedapat mungkin diarahkan pada putusan diversifikasi dan menghindari putusan penjara bagi klien anak.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60	50	83,3%	55	48	87%

Penjelasan diatas menunjukkan formulasi tersebut memiliki hubungan berbanding terbalik, dimana semakin rendah angka persentase realisasi maka kinerja Bapas semakin baik. Terlihat dari data diatas bahwa persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 48% , lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 55%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	65 %	60 %	55%	50 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55 %	48 %	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam penurunan angka prosentase anak yang mendapatkan putusan pidana dikarenakan kolaborasi yang baik antara Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dengan Aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) Disisi lain rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan sangat berperan dan memberikan referensi dalam penjatuhan putusan terkait anak berhadapan dengan hukum.

IKK.3 Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bapas berprinsip, klien anak adalah korban dari cara pengasuhan yang salah dan pergaulan negatif, sehingga dibutuhkan penanganan yang bersifat lebih humanis serta menghindari penghakiman bagi anak oleh aparat penegak hukum maupun dinas pendidikan/sekolah.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Data klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35 %	$(15:38) \times 100\% = 39\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 111%

Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2023

No	BAPAS	Jlh Klien Anak yang melanjutkan pendidikan	Jlh Klien Anak
1.	BAPAS Ternate	1	11
2.	BAPAS Tidore	14	27
	Total	15	38

2. Perbandingan Realisasi Kerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Data klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30	33	110%	35	39	111%

Data diatas menunjukkan bahwa sebesar 39% klien anak tetap melanjutkan sekolah setelah pembinaan. Hal ini berarti Bapas telah berhasil dalam menjalankan fungsinya dalam membimbing klien anak, meyakinkan dan memotivasi mereka untuk tetap bersekolah. Dan berhasil menghilangkan stigma negatif terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum serta meyakinkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk tetap mendukung keberlanjutan klien anak dalam melanjutkan pendidikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Data klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25 %	30 %	35%	40 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Data klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35 %	39%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Sebagai upaya perlindungan hak anak khususnya hak mendapatkan pendidikan pada klien anak, PK Bapas selain melakukan pendampingan dan pengawasan klien anak agar tetap bersekolah, juga melakukan pendekatan ke pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk menjamin kelanjutan pendidikan klien anak. Jaminan keberlanjutan dan kemudahan akses pendidikan bagi klien anak akan sangat berarti bagi masa depan anak. Melalui pendidikan, mereka akan mampu meningkatkan kepercayaan dirinya dan kualitas hidupnya. Karena apapun status hukum anak, mereka memiliki hak yang sama atas pendidikan dan setiap anak berhak atas kesempatan kedua.

SK.7 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar

Sasaran Kinerja ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.7	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%

IKK.1 Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan	80 %	$(27:27) \times 100\% =$	Realisasi dibagi target

LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Pendidikan keterampilan dan bersertifikat		100%	dikali 100% 125 %
---	---	--	------	-----------------------------

Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan dan bersertifikat Tahun 2023

No	Jlh Anak yang terampil	Jlh Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan
1.	27	27

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPKA mengamanatkan salah satu fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Pembinaan Keterampilan ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya .

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75	75	100%	80	100	125%

Pada indikator ini, penilaian difokuskan pada berapa banyak ABH yang terampil dan memperoleh sertifikat dari total keseluruhan ABH yang mengikuti pembinaan keterampilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70 %	75 %	80%	85 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Hak	Persentase Anak yang mengikuti	80 %	100%	Melebihi Target

Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat			
--	--	--	--	--

Pada indikator ini, penilaian difokuskan pada berapa banyak ABH yang terampil dan memperoleh sertifikat dari total keseluruhan ABH yang mengikuti pembinaan keterampilan, sehingga ditahun 2023 dapat realisasi sebesar 100% dari target yang dipatok 80%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah anak yang terampil dan memiliki sertifikat. Karena saat ini pembinaan keterampilan harus diiringi dengan pemberian sertifikat pelatihan, sebagai bentuk bukti kompetensi yang dimiliki ABH yang dapat digunakan sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Pembinaan keterampilan diberikan agar ABH mempunyai keahlian/keterampilan (life skill) sehingga bisa diterapkan ketika kembali di tengah masyarakat nanti.

IKK. 2 . Persentase anak yang memperoleh hak integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hak Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu hak tersebut adalah hak integrasi, dimana hak ini akan diberikan jika telah memenuhi syarat persyaratan baik secara administratif maupun substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan. Pemberian hak integrasi dapat berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	$(16: 16) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 100 %

Persentase anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2023

No	LPKA	Jlh Anak yang memperoleh hak integrasi	Jlh anak yang memenuhi syarat diusulkan integrasi
1.	LPKA Ternate	16	16

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100	100	100%	100	100	100%

Dari 16 ABH yang memenuhi syarat mendapatkan hak integrasi, 100% ABH tersebut telah mendapatkan hak integrasi. Artinya LPKA Kelas II Ternate berhasil melaksanakan kinerjanya, sesuai target yang telah ditentukan sebesar 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100 %	100%	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Sama halnya dengan narapidana dewasa, bagi anak yang menjalani pembinaan di LPKA juga mendapatkan hak integrasi, hanya saja kepada anak diberikan lebih cepat yaitu $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya.

IKK.3 Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90 %	$(25:27) \times 100\% = 92\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 102 %

Data perolehan Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar

No	LPKA	Jlh Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	Jumlah Anak
1.	LPKA Ternate	25	27

Disetiap lembaga LPKA harus ditunjuk beberapa wali/pengasuh yang dilatih secara khusus. Petugas yang ditunjuk sebagai pengasuh disebut Pengasuh Pemasarakatan yang diangkat oleh Kepala LPKA untuk mengurus ABH dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan ABH. Wali/pengasuh juga berperan membantu ABH dalam mengajukan permohonan cuti, keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu ABH dalam administrasi proses hukum.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80	80	100	90	92	102%

Data diatas diketahui bahwa 92% ABH telah mendapatkan hak pengasuhan selama menjalani proses hukum di LPKA sehingga jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 90%, maka dapat dikatakan tingkat keberhasilan dari indikator ini mencapai 102%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70 %	80 %	90%	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dari pelaksanaan Tusi ini diukur dari semakin besar persentase ABH yang mendapatkan hak pengasuhan maka kinerja LPKA semakin baik Sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan program pembinaan dan perawatan ABH, seluruh ABH pada LPKA Ternate wajib didampingi Pengasuh Pemasarakatan.

IKK 4. Persentase anak yang mengikutipendidikan formal dan non formal

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk mencapai standar hidup yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, maka Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu bentuk pembinaan yang

memfasilitasi ABH dari sisi akademik.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90 %	$(25: 27) \times 100\% = 92\%$	Realisasi dibagi target dikali 102 %

Data Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2023

No	LPKA	Jlh anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Jlh Anak
1.	LPKA Ternate	25	27

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80	80	100	90	92	102%

Data diatas merupakan realisasi sebesar 92% yang melebihi target sebesar 90% dikarenakan Seluruh ABH pada LPKA Ternate telah mendapatkan Pendidikan formal maupun non formal, karena tersedianya akses dan fasilitas Pendidikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70 %	80 %	90%	100 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	100 %	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

LPKA Ternate memberikan kesempatan memenuhi hak anak dalam mendapatkan Pendidikan formal dan non formal.

SK. 8 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasnayaran Bidang keamanan dan ketertiban

Sasaran Kinerja ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasnayaran Bidang keamanan dan ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

IKK.1 Persentase pengaduan yang diselesaikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85 %	$(3:3) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 117 %

Data jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2023

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jlh Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	(%)
1.	LAPAS Ternate	-	-	
2	LAPAS Sanana	-	-	

3	LAPAS Tobelo	3	3	
4	LAPAS Jailolo	-	-	
5	LAPAS Labuha	-	-	
6	LPP Ternate	-	-	
7	LPKA Ternate	-	-	
8	RUTAN Ternate			
9	RUTAN Soasiu	-	-	
10	RUTAN Weda	-	-	
11	Total	3	3	100

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi diperlukan kontrol sosial sebagai umpan balik (*feedback*) atas layanan yang telah diberikan. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik, Kantor Wilayah Maluku Utara telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan kepada Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan terhadap kinerja ataupun pelanggaran yang terjadi di jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Persentase pengaduan yang diselesaikan	80	100	125	85	100	117%

Selama periode tahun 2023 terjadi 3 laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi E.LAPOR, sesuai data seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan. Sehingga dapat diartikan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang diselesaikan	75 %	80 %	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pengaduan yang diselesaikan di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Kantor Wilayah kemenkumham Maluku Utara terkait pengaduan tersebut karena selalu melakukan koordinasi dengan satker atau UPT yang diadakan untuk melakukan Klarifikasi penyelesaian Pengaduan, serta Kantor Wilayah membentuk Tim Pemeriksaan Penyelesaian pengaduan yang berada di UPT.

IKK. 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT pemasyarakatan dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan system pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pencegahan masuknya barang berbahaya ke dalam Lapas/Rutan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80 %	$(25: 7) \times 100\% = 357\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 446%

Data jumlah kegiatan pencegahan gangguan keamanan ketertiban

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah gangguan kamtib
1	LAPAS Ternate	8	5
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	-	0
4	LAPAS Jailolo	2	0
5	LAPAS Labuha	10	0
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	5	2
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	25	7

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70	70	100	80	357%	446%

Data realisasi pencegahan gangguan kamtib tahun 2023 sebesar 357% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 70% sehingga dapat dikatakan persentase gangguan kamtib terlaksana dengan baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60 %	70 %	80%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	357%	Mencapai Target

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi pada tahun 2023 pada Lapas/Rutan Wilayah Maluku Utara sebanyak 25 kasus.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pencegahan gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencegahan gangguan kamtib dikarenakan petugas yang sellau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang maupun badan bagi Pengunjung serta juga melakukan pengeledahan bagi petugas yang masuk ke dalam Lapas/ Rutan Serta dapat mencegah masuknya barang terlarang kedalam Lapas/ Rutan.

IKK. 3 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	$(9: 5) \times 100\% = 180\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 211 %

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jlh Tah/Napi/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi perbuatan	Jumlah pelaku gangguan kamtib
1	LAPAS Ternate	2	1
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	2	1
4	LAPAS Jailolo	5	3
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	9	5

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana /Anak pelaku gangguan kamtib	80	100	125	85	180	211%

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian 180% Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75 %	80%	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	80%	180%	Mencapai Target

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator sebesar 80% yang melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100. Keberhasilan ini merupakan hasil upaya dari petugas Lapas/Rutan dalam melaksanakan pembinaan dan memberlakukan sanksi tegas pada Napitah pelaku pelanggaran tata tertib.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan keberhasilan dengan bersosialisasi / memberikan arahan dari Petugas Lapas Rutan terkait aturan tata tertib WBP di dalam Lapas Rutan, sehingga dapat menekan angka Pengulangan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh WBP di Lapas Rutan , serta Kantor Wilayah juga melakukan penguatan kepada Petugas dan juga memberikan pengarahan kepada WBP di Lapas/ Rutan Maluku Utara.

IKK. 4 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	80 %	$(7: 7) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 125%

Persentase pemulihan kondisi gangguan kamtibmas secara tuntas

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jlh pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	Jlh gangguan kamtibmas
1	LAPAS Ternate	5	5
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	0	0
4	LAPAS Jailolo	0	0
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate		
9	RUTAN Soasiu	2	2
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	7	7

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	80	100	125	80	100	125%

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Realisasi 100% Kinerja indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	60 %	70%	80%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibmas secara tuntas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan keberhasilan dengan bersosialisasi/ memberikan arahan dari Petugas Lapas Rutan terkait aturan tata tertib WBP di dalam Lapas Rutan, sehingga dapat menekan angka Pengulangan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh WBP di Lapas Rutan , serta Kantor Wilayah juga melakukan penguatan kepada Petugas dan juga memberikan pengarahan kepada WBP di Lapas/ Rutan Maluku Utara

SK.9 Meningkatnya pelayanan Keamanan dan ketertiban diwilayah sesuai standar

Sasaran Kinerja ini memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtibmas yang dapat dicegah	80%

	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibsecara tuntas	80%

IKK. 1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	$(3:3) \times 100\% = 100\%$	Capaian kinerja sebesar 117 %

perhitungan Persentase Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
1	LAPAS Ternate	-	-
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	3	3
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	3	3

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	70	70	100	85	100	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	60 %	70 %	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pencegahan gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Kantor Wilayah kemenkumham Maluku Utara terkait pengaduan tersebut karena selalu melakukan koordinasi dengan satker atau UPT yang diadakan untuk melakukan Klarifikasi penyelesaian Pengaduan, serta Kantor Wilayah membentuk Tim Pemeriksaan Penyelesaian pengaduan yang berada di UPT.

IKK. 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT pemasyarakatan dapat dianggap sebagai elemen krusial dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Gangguan keamanan dan ketertiban yang berujung pada konflik kekerasan tersebut tentu berakibat negatif dan berimplikasi pada kondisi lingkungan sosial di dalam UPT pemasyarakatan. Sehingga penciptaan suasana aman dan tertib terus diupayakan oleh para petugas pemasyarakatan melalui berbagai program pencegahan masuknya barang berbahaya ke dalam Lapas/Rutan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80 %	$(45: 48) \times 100\% = 93\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% = 116%

Data jumlah kegiatan pencegahan gangguan keamanan ketertiban

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah	Jumlah gangguan kamtib
1	LAPAS Ternate	9	9
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	7	4
4	LAPAS Jailolo	-	0
5	LAPAS Labuha	24	24
6	LPP Ternate	2	2
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	6	6
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	48	45

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70	70	100	80	93%	116%

Data realisasi pencegahan gangguan kamtib tahun 2023 sebesar 93% mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 70% sehingga dapat dikatakan persentase gangguan kamtib terlaksana dengan baik.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pencegahan gangguan kamtib	60 %	70 %	80%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	93%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pencegahan gangguan kamtib di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencegahan gangguan kamtib dikarenakan petugas yang sellau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang maupun badan bagi Pengunjung serta juga melakukan pengeledahan bagi petugas yang masuk ke dalam Lapas/ Rutan Serta dapat mencegah masuknya barang terlarang kedalam Lapas/ Rutan.

IKK. 3 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan maka dibuat tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	$(9:9) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 117 %

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jlh Tah/Napi/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi perbuatan	Jumlah pelaku gangguan kamtib
1	LAPAS Ternate	5	5
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	4	4
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	9	9

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80	100	125	85	100	117%

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian 100 % Kinerja indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	75 %	80%	85%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	Mencapai Target

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh realisasi indikator sebesar 85% yang melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Keberhasilan ini merupakan hasil upaya dari petugas Lapas/Rutan dalam melaksanakan pembinaan dan memberlakukan sanksi tegas pada Napitah pelaku pelanggaran tata tertib.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian

Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan keberhasilan dengan bersosialisasi / memberikan arahan dari Petugas Lapas Rutan terkait aturan tata tertib WBP di dalam Lapas Rutan, sehingga dapat menekan angka Pengulangan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh WBP di Lapas Rutan , serta Kantor Wilayah juga melakukan penguatan kepada Petugas dan juga memberikan pengarahan kepada WBP di Lapas/ Rutan Maluku Utara.

IKK. 4 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtibsecara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	$(7: 7) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 125%

Persentase pemulihan kondisi gangguan kamtib secara tuntas

No	LAPAS / RUTAN / LPKA	Jlh pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Jlh gangguan kamtib
1	LAPAS Ternate	5	5
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	0	0
4	LAPAS Jailolo	0	0
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate		
9	RUTAN Soasiu	2	2
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	7	7

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80	100	125	80	100	125%

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh Capaian 100 % Kinerja indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60 %	70%	80%	90 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan PAS dibidang keamanan dan ketertiban	Persentase pemulihan keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan keberhasilan dengan bersosialisasi / memberikan arahan dari Petugas Lapas Rutan terkait aturan tata tertib WBP di dalam Lapas Rutan, sehingga dapat menekan angka Pengulangan kembali pelanggaran yang dilakukan oleh WBP di Lapas Rutan , serta Kantor Wilayah juga melakukan penguatan kepada Petugas dan juga memberikan pengarahan kepada WBP di Lapas/ Rutan Maluku Utara.

SK 10. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

IKK. 1. Persentase pemenuhan layananmakanan bagi tahanan / Narapidana/Anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk masyarakat yang berada di dalam Lapas/LPKA/Rutan, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan fasilitas lainnya. Pelayanan pemenuhan makanan Napitah telah distandarkan melalui Permenkumham No. 40 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Didalam Permenkumham diatas di jelaskan terkait : perencanaan menu, perencanaan anggaran BAMA (Bahan Makanan), perhitungan BAMA (meliputi permintaan bama,penerimaan bama dll), serta monitoring dan evaluasi.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan/Anak,Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80 %	$(1220:1220) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 125%

jumlah pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jlh pemenuhan Layanan Makanan bagi Tah / Napi / Anak	Jlh Napi / Tahanan dan Anak
1	LAPAS Ternate	284	284
2	LAPAS Sanana	145	145
3	LAPAS Tobelo	197	197
4	LAPAS Jailolo	73	73
5	LAPAS Labuha	95	95
6	LPP Ternate	39	39
7	LPKA Ternate	27	27
8	RUTAN Ternate	185	185
9	RUTAN Soasiu	126	126
10	RUTAN Weda	49	49
	Total	1220	1220

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80	80	100	80	100	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar sesuai dengan standar	80%	100%	Mencapai Target

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan (SIMONEV BAMA) bertujuan untuk mempermudah :

- Proses pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan secara real time,transparan dan akuntabel;
- Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat layk hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS secara tepat, transparan dan akuntabel;
- Penyampaian infirmasi terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan;

- Koordinasi antara Ditjenpas, Kanwil dan UPT PAS dalam hal penyelenggaraan makanan. Formulasi pengukuran indikator kinerja “persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar sesuai dengan standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk pemanfaatan Aplikasi SIMONEVBAMA sampai dengan bulan Desember 2023 seluruh UPT Lapas dan Rutan di MALUKU UTARA telah memanfaatkan Aplikasi SIMONEVBAMA. Artinya sebanyak 10 UPT Lapas Rutan Maluku Utara telah melaporkan pemenuhan layanan makanan bagi seluruh tahanan/Narapidana/Anak selama tahun 2023 Jika dibandingkan dengan target sebesar 80%, menunjukkan capaian kinerja dalam pemenuhan makanan Napitah tahun 2023 mencapai 100%.

IKK.2 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari Tahanan /Narapidana/Anak adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembenaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Perhitungan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	(1220:1220) × 100% = 100 %	Capaian kinerja sebesar 106 %

Data jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jlh Tah / Napi/Anak yang memperoleh layanan kesehatan Preventif berkualitas	Jlh Napi / Tahanan dan Anak
1	LAPAS Ternate	284	284
2	LAPAS Sanana	145	145
3	LAPAS Tobelo	197	197
4	LAPAS Jailolo	73	73
5	LAPAS Labuha	95	95
6	LPP Ternate	39	39
7	LPKA Ternate	27	27
8	RUTAN Ternate	185	185
9	RUTAN Soasiu	126	126
10	RUTAN Weda	49	49
	Total	1220	1220

Dari data diatas digambarkan pemenuhan layanan kesehatan bagi sejumlah 1220 narapidana / tahanan dan anak, pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik 100%,

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Perhitungan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93	93	100	94	100	106%

Dengan mengacu pada target yang telah ditentukan sebesar 94% , mengindikasikan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Upaya pemberian pelayanan kesehatan (preventif) berkualitas yang telah dilakukan Lapas/Rutan di Maluku Utara meliputi :

- Pemeriksaan (screening) awal pada saat pertama kali masuk ke dalam Lapas dan Rutan (pemeriksaan WBP baru);
- Penyuluhan kesehatan dan pembentukan kader kesehatan;
- Pemeriksaan kesehatan secara berkala pada Tahanan/Narapidana/Anak;
- Kontrol keliling memantau kesehatan WBP;
- Isolasi pada Tahanan/Narapidana/Anak yang menderita penyakit menular;
- Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar sesuai dengan persyaratan higiene dan sanitasi makanan maupun dengan

kebutuhan energi dan nutrisi;

- Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Lapas dan Rutan,
- Berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait yang di tuangkan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Perhitungan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95 %

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Perhitungan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	Mencapai Target

Dengan target Kinerja 94% untuk realisasi melebihi target sebesar 100% dikarenakan Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas dan Rutan, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan Tahanan/Narapidana/Anak, sebagai berikut :

- Secara lembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.
- Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Lapas.
- Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Perhitungan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan

kesehatan (preventif) secara berkualitas di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan keberhasilan yang melebihi target yang sebesar 95 untuk Layanan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan Tahanan /Narapidana/Anak Adapun cara perhitungan indikator kinerja persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas, Pencegahan Penyakit menular dan penyalagunaan NAPZA di Lapas / Rutan

IKK 3. Persentase Tahanan Dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil Dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Narapidana/tahanan perempuan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana/tahanan laki-laki karena narapidana/tahanan perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana/tahanan laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana/tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui perlu mendapatkan layanan kesehatan maternal dalam proses pembinaan.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %	(1:1) × 100% = 100 %	Capaian kinerja sebesar 103 %

jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

No	LAPAS / RUTAN	Jlh Napi/ Tah Hamil dan menyusui	Jlh Napi / Tah Hamil yg mendapat akses layanan kesehatan maternal	Ket
1.	LAPAS Ternate	-	-	
2	LAPAS Sanana	-	-	
3	LAPAS Tobelo	-	-	
4	LAPAS Jailolo	1	1	
5	LAPAS Labuha	-	-	
6	LPP Ternate	-	-	
7	LPKA Ternate	-	-	
8	RUTAN Ternate	-	-	
9	RUTAN Soasiu	-	-	
10	RUTAN Weda	-	-	
	Total	1	1	

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	96	100	97	100	100%

Berdasarkan data tersebut di atas, maka untuk narapidana/ tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) telah mendapatkan akses maternal secara baik dan optimal. Target yang ditetapkan untuk indikator persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal adalah sebesar 97% dan berdasarkan perhitungan di atas target kinerja telah tercapai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil	95%	96%	97%	98 %

dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal berkualitas				
--	--	--	--	--

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tenaga kesehatan Lapas/Rutan telah melakukan kegiatan prosedur pemeriksaan pada ibu dan bayi dan melakukan laporan tiap bulan terkait ibu hamil, bayi yang meliputi tumbuh kembang kepada Kantor Wilayah dan tenaga kesehatan Lapas Rutan juga memberikan penyuluhan terhadap populasi rentan.

IKK 4 Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tahanan/Narapidana/Anak adalah sebagaimana manusia umumnya, hanya saja kebebasan dan kemerdekaannya dibatasi, meskipun demikian hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai kesamaan di bidang hukum tidak diperkenankan dilakukannya tindakan diskriminatif. Salah satu pemicu terjadinya sumber stres bagi narapidana dan tahanan antara lain keterlibatan masalah hukum. Misalnya, tuntutan hukum, pengadilan, dan penjara. Selain itu, tingkat hunian yang tinggi, kehilangan atau terpisahnya seseorang dari keluarga dalam jangka waktu yang lama, perubahan aktivitas sosial, serta perubahan lingkungan fisik dan sosial secara mendadak.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	(3:3) × 100% = 100 %	Capaian kinerja sebesar 125 %

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangan

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jlh Tah / Napi yang mengalami gangguan mental yang dapat tertangani	Jlh yang mengalami gangguan mental
1.	LAPAS Ternate	2	2
2	LAPAS Sanana	-	-
3	LAPAS Tobelo	1	1
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	3	3

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70	70	100	80	100	125%

Kondisi kesehatan mental/jiwa tidak bisa dianggap remeh, khususnya di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Dampak yang ditimbulkan harus ditangani cepat oleh petugas lapas dan rutan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan mental/jiwa bagi narapidana dan tahanan. Jika terlambat ditangani dikhawatirkan dalam kondisi ekstrem diikuti percobaan bunuh diri atau tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

Perbandingan Realisasi 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	Mencapai Target

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental di Maluku Utara tahun 2023 sebanyak 3 orang dan sebanyak 3 orang dapat tertangani, artinya 100% Napitah/Anak penderita gangguan metal telah tertangani dan mendapat perawatan. Jika disandingkan dengan target sebesar 80% dapat dikatakan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tenaga kesehatan Lapas Rutan telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit setempat untuk pemberian obat-obatan anti depresan terhadap warga Binaan Pemasarakatan yang mengalami gangguan mental. Selain itu untuk WBP yang mengalami depresi juga dilibatkan tenaga psikolog klinis untuk konseling individu.

IKK 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tah / Napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	$(58:58) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 117%

Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No	LAPAS / RUTAN	Jlh Tah / Napi Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jlh Tah / Napi Lansia
1.	LAPAS Ternate	13	13
2.	LAPAS Sanana	20	20
3.	LAPAS Tobelo	10	10
4.	LAPAS Jailolo	2	2
5.	LAPAS Labuha	1	1
6.	LPP Ternate	3	3
7.	LPKA Ternate	-	-
8.	RUTAN Ternate	1	1
9.	RUTAN Soasiu	4	4
10.	RUTAN Weda	4	4
	Total	58	58

Dari data diatas menggambarkan bahwa jumlah napi/Tah lansia sebesar 58 orang dari jumlah keseluruhan yaitu 1220 mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pada kisaran umur tersebut maka kesehatan akan menurun karena tidak lagi termasuk dalam masa produktif sehingga diperlukan perawatan intens bagi kelompok rentan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tah / Napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	75	100	85	100	117%

Menurut data jumlah tahanan/narapidana lansia yang menderita sakit dan butuh pengobatan pada Lapas Rutan di Maluku Utara pada tahun 2023 sebanyak 58. Dari 58 Lansia tersebut seluruhnya mendapatkan perawatan sesuai dengan kondisi dan penyakit yang diderita.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tah / Napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tah / Napi lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Lapas Rutan telah melakukan posbindu untuk kegiatan kesehatan Lansia dan dikelompokkan sendiri dalam 1 kamar dan bagi Napitah Lansia penderita penyakit telah dilakukan pemetaan terhadap jenis penyakit yang diderita, menyiapkan kamar/blok khusus, bekerjasama dengan Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat dalam pengobatan dan perawatan, serta memperhatikan pola makan dan gizi Napitah Lansia dengan penyakit tertentu segala macam penyakit.

IKK 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pelayanan dan perawatan tahanan/narapidana/anak penyandang disabilitas adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka pemenuhan hak

mereka, karena negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tah/Napi/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	$(9:9) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% 117 %

Jumlah tah/napi/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jlh Tah / Napi Disabilitas yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Jlh Tah / Napi / Anak Disabilitas yang membutuhkan layanan
1	LAPAS Ternate	1	1
2	LAPAS Sanana	7	7
3	LAPAS Tobelo	-	-
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate	-	-
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-
9	RUTAN Soasiu	1	1
10	RUTAN Weda	-	-
	Total	9	9

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tah/Napi/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80	80	100	85	100	117%

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa seluruh tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 100%, tidak berbeda dengan realisasi tahun lalu. Pemberian layanan kesehatan kepada napi/ta yang menyandang disabilitas dalam

bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan, dukungan psikologis, pemberian perlengkapan sehari-hari sesuai kebutuhan, seperti kursi roda, tongkat, kruk, dan lain-lain yang diatur dengan ketentuan yang berlaku. Dilakukan kontrol kesehatan secara rutin terhadap napitah penyandang disabilitas dan memberikan akses untuk perawatan kesehatan sesuai indikasi medis.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tah/Napi/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase Tah/Napi/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	Mencapai Target

Menurut Perbandingan Realisasi Kinerja dari Tahun 2022 sampai 2023 naik yang 80% menjadi 85%, tetapi untuk realisasi di tahun 2023 masih sama dengan jumlah 100% dan melebihi target yang di patok sebesar 85%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Lapas Rutan telah memberikan prioritas terhadap penyandang disabilitas terkait sarana dan prasana, dan tenaga kesehatan juga dilatih untuk menghadapi WBP yang menyandang disabilitas dan melaporkan ULD ke SDP dan terpantau oleh Kantor Wilayah

IKK.7 Persentase keberhasilan penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) Dan TB Positif (Berhasil Sembuh)

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	(8:8) × 100% = 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 125 %

Keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jumlah penderita		Jumlah Penanganan	
		Jlh HIV yang berhasil ditekan jumlah Virus	Jlh napi penyakit HIVAIDS	Jlh Napi TB positif penanganan yang berhasil sembuh)	Jumlah TB Positif
1	LAPAS Ternate	0	1	6	6
2	LAPAS Sanana	-	-	-	-
3.	LAPAS Tobelo	-	-	-	-
4.	LAPAS Jailolo	-	-	-	-
5.	LAPAS Labuha	-	-	-	-
6	LPP Ternate	-	-	1	1
7	LPKA Ternate	-	-	-	-
8	RUTAN Ternate	-	-	-	-
9	RUTAN Soasiu	-	-	-	-
10	RUTAN Weda	-	-	-	-
	Total	0	1	7	7

Pelayanan untuk HIV AIDS dan TB Positif sudah berkembang di beberapa Lapas/Rutan di Maluku Utara, dimana narapidana/tahanan mudah mendapat akses lanjutan perawatan dan dukungan setelah mendapatkan konseling dan tes. Pemeriksaan HIV untuk narapidana/tahanan sudah ditawarkan saat pertama kali masuk Lapas/Rutan, ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan dasar oleh tenaga kesehatan (BAP kesehatan). Petugas akan mengidentifikasi dengan melakukan penilaian risiko sehingga dapat mengetahui siapa saja yang perlu dilakukan

mendapatkan konseling dan tes..

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70	70	100	80	100	125%

Berikut adalah data keberhasilan penanganan penyakit menular HIVAIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) pada Lapas/Rutan di Maluku Utara tahun 2023 mencapai 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	Mencapai Target

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa indikator persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan, dan meningkat dari tahun sebelumnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) di wilayah hanya dilakukan

oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Lapas Rutan secara rutin melakukan skrining penyakit HIV dan TBC setiap 3 bulan dan setiap Tahanan Baru, selain itu juga dilakukan penyuluhan terkait penyakit menular HIV dan TBC dan melaporkan setiap bulan dan Triwulan ke laporan Watkesrehab dan direkapitulasi oleh Kantor Wilayah, serta Keberhasilan penanganan penyakit menular ini tidak terlepas dari upaya Petugas Pemasarakatan, dengan melaksanakan langkah strategis berikut ini:

- Berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan kesehatan dan mendapatkan akses dalam mendapatkan obat ARV (Anti Retro Viral) dan OAT (Obat Anti TBC).
- Menunjuk kader kesehatan.
- Melaksanakan screening penyakit HIV-AIDS dan TB.
- Menyiapkan sarana penyakit TB meliputi kamar/blok khusus bagi WBP penderita TB.
- Pengawasan minum obat rutin bagi WBP penderita HIV-AIDS dan TB.

IKK. 8. Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Negara menjamin hak Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi narkotika diawali dengan tahapan skrining untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkotika. Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan dengan hasil Skrining dengan risiko berat akan dilakukan Asesmen Rehabilitasi. Hasil Asesmen Rehabilitasi dipergunakan sebagai dasar pemberian layanan rehabilitasi narkotika.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27 %	$(157:157) \times 100\% = 100\%$

jumlah perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

No	LAPAS / RUTAN DAN LPKA	Jlh perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	Jlh Napi pecandu/penyalahguna /korban yang direhabilitasi
1	LAPAS Ternate	20	20
2	LAPAS Sanana	5	5
3	LAPAS Tobelo	25	25
4	LAPAS Jailolo	-	-
5	LAPAS Labuha	-	-
6	LPP Ternate		
7	LPKA Ternate	-	-
8	RUTAN Ternate	87	87
9	RUTAN Soasiu	12	12
10	RUTAN Weda	8	8
	Total	157	157

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25	25	100	27	100	370%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika)	23%	25%	27%	29%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana /Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika)	27%	100%	Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari capaian target yang ditetapkan adalah sebesar 27% dengan realisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 100%, hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan penanganan terhadap pecandu / Bandar narkotika.

JUMLAH PNBP PEMASYARAKATAN

No	UPT	Pemenuhan PNBP 2023			Ket
		Target	Realisasi	Persentase	
1	Lapas Kelas IIA Ternate	8,260,000	2,600,000	31,48%	Tidak tercapai
2	Lapas Kelas IIB Sanana	3,360,000	4,350,000	129%	Melebihi target
3	Lapas Kelas IIB Tobelo	3,600,000	3,600,000	100%	tercapai
4	Lapas Kelas IIB Jailolo	2,100,000	-	0%	Tidak terlaksana
5	Lapas Kelas III Labuha	-	-	0%	tidak dibebani PNBP
6	LPP Kelas III Ternate	1,700,000	1,850,000	108%	Melebihi target
7	Rutan Kelas IIB Ternate	-	-	0%	tidak dibebani PNBP
8	Rutan Kelas IIB Soasiu	2,000,000	-	0%	Tidak terlaksana
9	Rutan Kelas IIB Weda	770,000	-	0%	Tidak terlaksana
		21,790,000	12,400,000	56,91%	

JUMLAH KAPASITAS HUNIAN

NO	UPT	KAPASITAS	TAHANAN	NAPI	TOTAL
1	LAPAS KELAS IIA TERNATE	240	0	283	283
2	LAPAS KELAS IIB SANANA	85	28	130	158
3	LAPAS KELAS IIB JAILOLO	150	7	67	74
4	LAPAS KELAS IIB TOBELO	250	45	161	206
5	LAPAS KELAS III LABUHA	150	15	81	96
6	LPP KELAS III TERNATE	250	11	32	43
7	LPKA KELAS II TERNATE	70	0	25	25
8	RUTAN KELAS IIB TERNATE	122	97	82	179
9	RUTAN KELAS IIB SOASIU	103	103	32	135
10	RUTAN KELAS IIB WEDA	150	25	44	69
	TOTAL	1.570	331	937	1.268

PEROLEHAN INTEGRASI WBP DI MALUKU UTARA

No	UPT PAS	Tahun 2023			
		PB	CB	CMB	ASM
1	LAPAS KELAS IIA TERNATE	83	1	0	7
2	LAPAS KELAS IIB SANANA	16	3	0	22
3	LAPAS KELAS IIB JAILOLO	12	2	0	5
4	LAPAS KELAS IIB TOBELO	32	12	0	27
5	LAPAS KELAS III LABUHA	25	10	0	28
6	LPP KELAS III TERNATE	9	2	0	4
7	LPKA KELAS II TERNATE	10	2	0	23
8	RUTAN KELAS IIB TERNATE	23	25	1	9
9	RUTAN KELAS IIB SOASIU	13	4	0	14
10	RUTAN KELAS IIB WEDA	10	2	0	2
	TOTAL	233	63	1	150

KERJA SAMA INSTANSI TERKAIT PEMBINAAN WBP

No	Instansi	Kegiatan	Ket
1	BPVP	Pelatihan produksi dan pemasaran	
2	Johan Meubel	Pertukangan. Pembuatan Meja, Kursi, Kerajinan Tangan, Lemari dan Barang benda berbahan kayu lainnya.	
3	BPVP	Perekrutan, Seleksi Peserta, Penempatan on the job Training (OJT)/ Magang dan Penempatan kerja bagi Alumni Pelatihan Barbasis Kompetensi	
4	Dinas Pertanian	Pelatihan Tata Cara Bercocok Tanam	
5	Dinas Tenaga Kerja	Pelatihan Kegiatan Kerja Kemandirian Pertanian, Pertukangan, Otomotif dan Kerajinan Tangan	Perubahan pihak ketiga Dinas Pertanian

6	BVSP dan IPEMI	Program pembinaan dan pemasaran hasil	
7	Kementerian Agama	Pembinaan kerohanian dan kepribadian	
8	Dinas Pendidikan dan SKB	Pendidikan formal, informal (paket A, B, C), dan non formal (pelatihan dan kerajinan)	
9	LBH	Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	
10	DISDUKCAPIL	Pendataan NIK	
11	Dinas Kesehatan	Perawatan Kesehatan	

PEMUTAKHIRAN DATA NIK WBP DI MALUT

UPT	Jumlah Penghuni	Ada NIK				Tidak Ada NIK			
		Tah	Nap	Ank	Tot	Tah	Napi	Ank	Tot
Lapas Ternate	283	0	276	0	276	0	7	0	7
Lapas Sanana	158	18	134	3	155	3	0	0	3
Lapas Tobelo	206	44	155	2	201	5	0	0	5
Lapas Jailolo	74	7	65	0	72	0	2	0	2
Lapas Labuha	95	10	81	0	91	3	1	0	4
LPP Ternate	42	10	32	0	42	1	0	0	1
Rutan Ternate	179	97	82	0	179	0	0	0	0
Rutan Soasiu	140	36	88	0	124	8	8	0	16
Rutan Weda	69	25	44	0	69	0	0	0	0
LPKA Ternate	26	0	10	10	20	0	3	2	5
Total	1272	247	967	15	1229	20	21	2	43

RINCIAN PERKARA WBP PADA LAPAS/RUTAN DI MALUT

No	UPT	PIDSUS									
		TER	NAR	KOR	MONEY L	HUMAN TRF	PIDUM	PID. MATI	SH	WNA	
1	LAPAS KELAS IIA TERNATE	0	129	31	0	0	117	1	6	0	
2	LAPAS KELAS IIB SANANA	0	4	7	0	0	147	0	0	0	
3	LAPAS KELAS IIB JAILOLO	0	8	7	0	0	59	0	0	0	
4	LAPAS KELAS IIB TOBELO	0	27	10	0	0	169	0	0	0	
5	LAPAS KELAS III LABUHA	0	5	0	0	0	91	0	0	0	
6	LPP KELAS III TERNATE	0	13	10	0	1	19	0	0	0	
7	LPKA KELAS II TERNATE	0	0	0	0	0	25	0	0	0	
8	RUTAN KELAS IIB TERNATE	0	68	31	0	2	78	0	0	0	
9	RUTAN KELAS IIB SOASIU	0	12	0	0	0	122	0	0	0	
10	RUTAN KELAS IIB WEDA	0	10	4	0	0	55	0	0	0	
	TOTAL	0	276	100	0	3	882	1	6	0	

❖ **CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TAHUN ANGGARAN 2023****SK.11 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah**

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.13 Indeks

IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id>. Prosedur ini mengacu pada survey yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi survey kelompok terhadap jenis layanan survey tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

Dalam pelaksanaannya, survey ini terdiri dari 4 (empat) unsur layanan, yaitu Intelijen, Penyidikan, TAK, Pengawasan, Pengaduan dan Pencegahan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BSK Kumham, diperoleh data sebagai berikut:

UNSUR LAYANAN	NILAI TAHUN 2023
Intelijen	3,40
TAK	3,30
Pengawasan	3,40
Pengaduan	3,40
Pencegahan	-3,20
Responden	4
Nilai SKM	3,34

Hasil SKM Divisi Keimigrasian yang diperoleh berdasarkan survey yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Imigrasi Kanwil Malut adalah sebesar 3,55 dari target sebesar 3,25 atau dengan capaian sebesar 109%

Capaian IKM:

$$= \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$= \frac{3,55}{3,25} \times 100\% = 109\%$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Divisi Keimigrasian Kanwil Malut pada tahun 2023, telah tercapai. Sesuai Peraturan MenpanRB No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara berada dalam kategori Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3.97 dan 2021 sebesar 3.87, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 mengalami Penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3.55 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3.97	124	3,25	3.55	109

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3.55 indeks atau nilai capaian sebesar 108%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\%$$

$$\frac{[3,55]}{[3,25]} \times 100\% = [109\%]$$

Secara struktur, Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara juga melaksanakan urvey kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil SKM Kantor Wilayah Maluku Utara tahun 2023 sebesar 16,37, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Imigrasi Kanwil Maluku lebih kecil 12,82 poin atau capaiannya 27,69 jika dibandingkan dengan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.

No	Unit/Satuan Kerja	Capaian SKM	Capaian IKM	Capaian (%)
1	Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara	16,37	3,55	27,69

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. *Pembuatan Paspor*
2. *Visa*
3. *Ijin Tinggal*

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari survei Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari 5 unsur yang digunakan sebagai survey penilaian, unsur Pencegahan memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat keseluruhan. Dibandingkan dengan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2022, keseluruhan unsur penilaian survey mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan survey yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survey, terdapat 3 (tiga) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran IKM layanan keimigrasian di Maluku Utara menggunakan pengukuran survey Balitbangham dengan indeks skala 4 yang diunduh melalui laman website <https://survei.balitbangham.go.id>. Tata cara pengukuran dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam survey kepuasan masyarakat ini terdapat beberapa unsur pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian, antara lain: ketepatan waktu pelayanan, sikap dan kompetensi petugas, kemudahan alur, dan kesesuaian biaya. Hasil survey IKM layanan keimigrasian per Desember 2023 yang diunduh ditunjukkan pada matrik dibawah ini

Data Survey IKM Balitbangham Tahun 2023

NO	WILAYAH/SATUAN KERJA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
		JUMLAH RESPONDEN	INDEKS
KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA		19	3.55
1	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU UTARA	4	3.34
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	10	3.57
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	5	3.66

Capaian Kinerja 2023

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.25	3,55	109% ----- 3.55 3.25 x 100% = 109,23%

Dengan menggunakan indeks skala 4, hasil survey IKM dengan nilai indeks 3,55 masuk dalam kriteria predikat “Sangat Baik” dengan mutu “A”. Nilai ini juga menunjukkan tingkat kepuasan pemohon terkait pelayanan dan fasilitas publik termasuk tinggi. Dengan membandingkan realisasi indeks IKM dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didapatkan persentase capaian kinerja pada indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah sebesar 109,23% , hal ini menunjukkan capaian kinerja telah “**Terpenuhi**” dan melebihi dari target yang telah ditetapkan, sehingga masuk dalam kategori predikat penilaian “**Sangat Baik**”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Data survey IKM layanan keimigrasian dari tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan disetiap tahunnya. Meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu significant, hal ini tetap mengindikasikan bahwa kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan telah terpenuhi. Dengan selalu dinaikkannya target kinerja disetiap tahunnya sedangkan peningkatan indeks IKM tidak terlalu significant,

berimbang pada penurunan capaian kinerja di tahun 2023 . Di tahun 2022 capaian kinerja mencapai 120% namun turun menjadi 109% di tahun 2023. Namun demikian capaian kinerja di tahun 2023 ini dianggap berhasil karena telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor program/kegiatan serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan jajaran Keimigrasian di wilayah Maluku Utara dan akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Data Survey IKM Layanan Keimigrasian

	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	9,64 (nilai indeks skala 10)	3,74 (nilai indeks skala 4)	3,85 (nilai indeks skala 4)	3,55 (nilai indeks skala 4)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,85	120%	3,25	3,55	109%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah ditetapkan sebesar 3,3 indeks.

Rencana Strategis Kanwil MALUKU UTARA 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,1	3,15	3,2	3,25	3,3

Dengan tercapainya nilai Indeks IKM sebesar 3,55 di tahun 2023, menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,3	3,55	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum diampu oleh 5 Unit Esselon I, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN). Sebagai perbandingan capaian hasil nilai IKM pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dari ke-5 Unit Esselon I tersebut, berdasarkan perhitungan survey IKM yang diperoleh dari <https://survei-bsk.kemenkumham.go.id> per 31 Desember 2023. Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan hasil survey IKM Satuan Kerja Keimigrasian wilayah Maluku Utara per 31 Desember 2023 dengan nilai indeks 3,55.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian kinerja di tahun 2023 ini dianggap berhasil karena telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor utama yang menjadi pemicu tercapainya target kinerja ini adalah karena adanya perbaikan layanan publik pada Satuan Kerja Keimigrasian, terlebih lagi seluruh Satuan Kerja Keimigrasian berlomba-lomba mengikuti kontestasi untuk menjadi Satuan Kerja berpredikat WBK/WBBM. Sarana layanan publik mendapat perhatian khusus untuk diperbaiki terutama penyediaan ruang tunggu yang nyaman, toilet yang bersih, lahan parkir yang luas, tempat ibadah dan taman bermain anak. Dibentuk Duta Layanan yang menerapkan 3S (Senyum-Sapa-Salam) dan bahkan diciptakan inovasi aplikasi layanan. Selain itu untuk mengoptimalkan layanan tersebut digalakkan Program Layanan *Eazy Passport* yaitu melakukan penawaran secara aktif dengan mengirim surat penawaran layanan penerbitan paspor secara langsung kepada Perkantoran Pemerintah, TNI, POLRI, BUMN/BUMD, Swasta, Institusi pendidikan (sekolah/pesantren), komunitas/ organisasi dan Komplek perumahan/apartemen. Dengan adanya Layanan *Eazy Passport*, publik merasa terbantu dan terlayani dengan baik. Terdapat beberapa inovasi program

layanan keimigrasian yang digalakkan Satuan Kerja Keimigrasian di Maluku Utara dengan maksud mempermudah dan mempercepat layanan, yaitu : Layanan Paspor Simpatik (Layanan di luar Hari Kerja), Layanan *Pasport Mobile* pada tempat-tempat tertentu, Layanan Jemput Bola pada Orang Sakit, Kelompok Rentan dan Difabel, Pengambilan Paspor di luar jam kerja, Pelayanan Perizinan Bagi Orang Asing secara Online. Dan pelaksanaan program layanan tersebut tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat.

NO	URAIAN	SATKER		TOTAL
		KANIM TERNATE	KANIM TOBELO	
1	Penerbitan Paspor	5475	1669	7.144
2	Layanan Eazy paspor (Pemohon)	384	589	973
3	Kegiatan Layanan Eazy Paspor (Kegiatan)	18	13	31
4	Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	5336	-	5.336
5	Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)	274	688	962
6	Perpanjangan ITAS	5407	5684	11.091
7	Perpanjangan ITK	-	15.535	15.535
8	Alih Status ITAS	3064	1.747	4.811
9	Izin Tinggal Tetap (ITAP) (Pemohon)	-	2	2
10	Pendeportasian	5	3	8
11	Pendetensian	1	2	3
12	Affidavit (Pemohon)	-	1	1
13	Overstay	-	-	-
14	Pencekalan	-	2	2
15	Operasi Mandiri (Intelijen)	76	7	83
16	Operasi Lapangan (Pengawasan)	20	-	20
17	Operasi Gabungan	-	2	2
18	Rapat Timpora (Operasi Gabungan)	4	3	7
19	Pemeriksaan -Kedatangan Crew	4805	3.562	8.367
20	Pemeriksaan – Keberangkatan Crew	4805	2.654	7.459

IKK.2 Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2023 telah dilakukan urvey pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 5. Responden survey pada Divisi Keimigrasian Kanwil Malut melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. *[Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi .* Penyusunan unsur-unsur pada urvey dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survey berskala 4. Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	4,00
2	Penyidikan	10	3,84
3	TAK	10	4,00
4	Pengawasan	20	4,00
5	Pengaduan	20	4,00
6	Pencegahan	20	4,00

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,40
2	Penyidikan dan TAK	20	3,30
3	Pengawasan	20	3,40
4	Pengaduan	20	3,40
5	Pencegahan	20	3,20

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 5 responden internal dan 4 responden eksternal dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Maluku Utara sebesar 3,98 untuk internal dan 3,34 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai IPK} &= \frac{(3,98 \times 5) + (3,34 \times 4)}{5 + 4} \\
 &= \frac{19,9 + 13,36}{9} \\
 &= 3,70
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara sebesar 3.70.

Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2023 sebesar 3,13 atau memiliki capaian sebesar 118%

Capaian IPK:

$$= \frac{\text{Realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\text{Target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\% = \frac{3,70}{3,13} \times 100\% = [118\%]$$

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara pada tahun 2023, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2022 sebesar 3,81 dan 2021 sebesar 3,83, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 3,79 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,81	122	3,13	3,70	119

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2023 adalah sebesar 3,73 indeks atau nilai capaian sebesar 119%.

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\text{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimigrasian tahun 2023}}{\text{Target nilai IKM Tahun 2024}} \times 100\% = \frac{3,70}{[3,14]} \times 100\% = [118\%]$$

Secara struktur, Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara berada di bawah Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara, dimana Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara dengan Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2023 sebesar 16,41, maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian lebih kecil 12,71 poin atau capaiannya 22,54 dibanding dengan Kantor Wilayah.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK	Capaian IPK	Capaian (%)
1	Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara	16,41	3,70	22,54

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Divisi Keimigrasian Kanwil Hukum dan HAM Maluku Utara, seperti:

1. Desa Binaan Imigrasi di Halmahera Utara
2. Pemetaan Warga Negara Asing(WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
3. Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi
4. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;
5. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik

Serupa dengan perlakuan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2023 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari

survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi hasil survey IPK mengalami penurunan di tahun 2022 namun mengalami sedikit peningkatan tahun 2023 dari indeks 3,70. Hal ini juga berimbas pada peningkatan capaian kinerja pada indikator 119%. Data tersebut menandakan terjadi perbaikan dalam penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di wilayah Maluku Utara.

Data E-Survey IPK Wilayah Maluku Utara

Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	2021	2022	2023
	3,71	3,83	3,70

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,83	122%	3,13	3,70	119%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah ditetapkan sebesar 3,14 indeks. Dengan tercapainya nilai Indeks IPK sebesar 3,70 di tahun 2023, menunjukkan bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah melampaui target jangka menengah

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14	3,70	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena indeks pengamanan keimigrasian hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun untuk satuan kerja imigrasi dapat mengacu nilai capaian indeks pengamanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai standar nasional. Dari tabel perbandingan dibawah ini dapat disimpulkan bahwa hasil e-survey IPK wilayah Maluku Utara sebesar 3,70 telah melebihi nilai dari indeks IPK Direktorat Jenderal Keimigrasian.

Perbandingan Hasil E-Survey IPK

Unit	Indeks	Mutu
Ditjen Imigrasi	3,70	Sangat Baik (A)
Satker Keimigrasian Maluku Utara	3,73	Sangat Baik (A)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Satuan Kerja Keimigrasian di jajaran Kanwil Maluku Utara telah berhasil bahkan melebihi target pada indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah. Keberhasilan ini tentu saja hasil upaya beberapa program dan kegiatan dibidang pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian yang diselenggarakan oleh satuan kerja. Beberapa diantaranya meliputi:

1. Pembentukan dan pelaksanaan TIMPORA yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh stakeholder di Maluku Utara.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).
3. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di wilayah Maluku Utara.
4. Penyelesaian pengaduan yang lebih responsif dan penegakan hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti dengan baik.

SK.12 Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

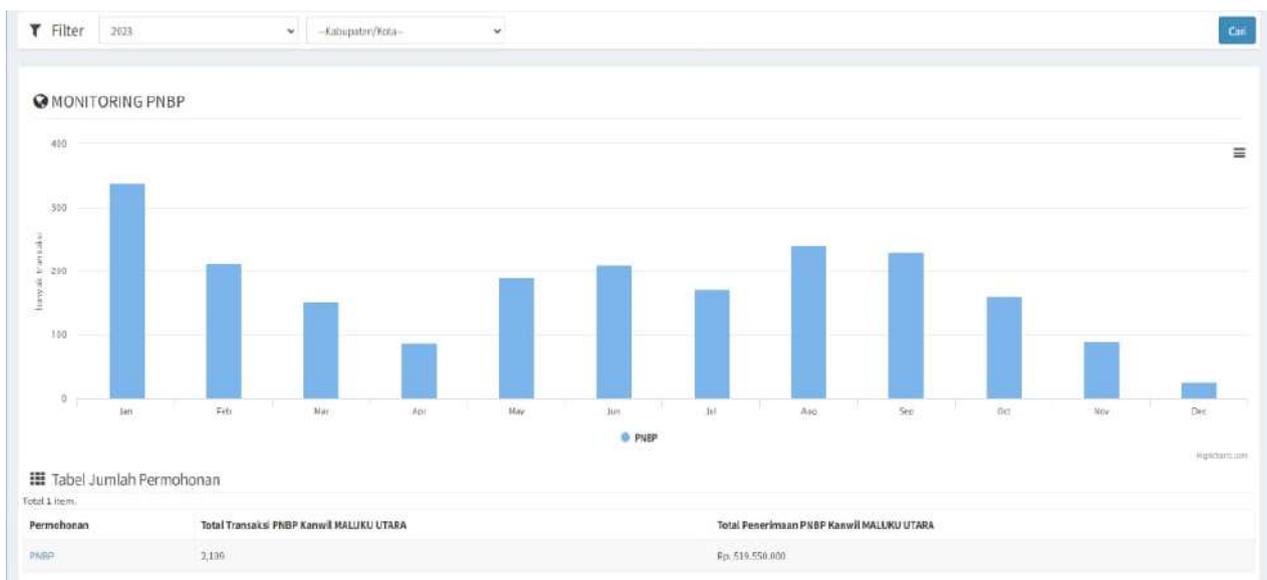
Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.12	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%

IKK.1 Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Grafik: Penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2023



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dimana pada tahun 2023 sebesar 519.550.000 dan tahun 2022 sebesar 678.650.000. Dengan demikian, realisasi peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Maluku Utara sebesar - 0,23%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, maka capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2023 sebesar -4,68%.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPNP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNBPNP 2023 dikurang jumlah PNBPNP 2022 dibagi jumlah PNBPNP 2022 dikali 100% $\frac{519.550.000 - 678.650.000}{678.650.000} \times 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $-0,23\%$ $(-0,23\%) \times 100\% = -0,23\%$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data PNBPNP di Kantor Wilayah Maluku Utara pada tahun 2022 adalah Rp 678.650.000, berdasarkan data penerimaan PNBPNP Tahun 2023 sebesar Rp 519.550.000.

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
SK.4	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPNP Administrasi Hukum Umum di wilayah	1%	-0,23%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase peningkatan PNBPNP Administrasi Hukum Umum di wilayah ditetapkan sebesar 5%.

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	5%

Pada tahun 2022 penerimaan PNBPA AHU Rp 678.650.000, namun untuk Tahun 2023 penerimaan PNBPA AHU Rp 519.550.000. Pada 2021 Penerimaan PNBPA AHU Maluku Utara adalah Rp 673.150.000 yang jika dibandingkan dengan Penerimaan PNBPA 2022 yaitu Rp 678.650.000.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi 2023	Keterangan
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-0,23%	Belum Mencapai Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Layanan Administrasi Hukum Umum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka upaya peningkatan PNBPA AHU di Wilayah, Kantor Wilayah Maluku Utara melaksanakan program sosialisasi dan promosi layanan AHU yang disesuaikan dengan potensi daerah dan potensi masyarakat. Beberapa kegiatan seperti Layanan Kumham Bergerak dengan tema Layanan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan yang dilaksanakan pada Layanan Apostile serta Layanan Perseroan Perorangan.

Adapun capaian kinerja mengalami hambatan beberapa diantaranya karena adanya peraturan baru mengenai kewajiban korporasi untuk melaporkan Beneficial Ownership, yang apabila tidak melaporkan maka korporasi tersebut diblokir tidak dapat melakukan transaksi di AHU online.

SK.13 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.13	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%

IKK.1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pelanggaran atas perilaku atau pelanggaran pelaksanaan jabatan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap notaris, diperlukan penyatuan sikap serta pemikiran guna optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris, oleh karena itu dalam pengawasan Notaris terdapat 1 (satu) organ pengawasan di Wilayah, yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun Realisasi Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% 1 $(---) \times 100\% = 100\%$ 1	Realisasi dibagi target dikali 100% 100 $(---) \times 100\% = 116,27\%$ 86

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Adapun pada tahun 2022 data perkara yang masuk adalah 1 Perkara di MKNW dan MPW dimana ada 1 (satu) perkara yang diputusnya adalah di tahun 2023. Sementara di Tahun 2023 ada 1 perkara masuk dengan penyelesaian perkara 1 kasus

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah ditetapkan sebesar 86%.

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	88%

Pada Tahun 2023, capaian ini telah tercapai, yaitu dengan besaran persentase penyelesaian laporan 100%.

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100%.	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Sidang Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Kehormatan Wilayah dilakukan secara rutin, jadwal yang rutin meminimalisir adanya keterlambatan penyelesaian kasus.

SK 14. Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.14	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus

IKK 1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baiksekali	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan	499 Layanan	Realisasi dibagi targetdikali 100% 499 (---) × 100% = 4990% 10

No	Jenis Kekayaan Intelektual	2022	2023
1	Hak cipta	432	402
2	Merek	43	66
3	Paten	1	4
4	Desain Industri	-	-
5	Rahasia Dagang	-	-
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-
7	Indikasi Geografis	1	-
8	KI Komunal	400	25
9	Penegakan HKI	-	-
10	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis KI	1	2

11	<i>One Village One Brand</i>	-	-
Total		878	499

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	JENIS PERMOHONAN KI	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1.	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	499 Layanan	878 Layanan

Berdasarkan data diatas selama tahun 2023 ini capaian kinerja bidang kekayaan intelektual terkait jumlah pemohon kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh kantor wilayah mencapai 499 Layanan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, jumlah pemohon kekayaan intelektual yang difasilitasi kantor wilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA	REALISASI 2023
1.	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Permohonan	499 Permohonan

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang terlampir pada table diatas, target untuk indikator kerja jumlah permohonan kekayaan intelektual yang difasilitasi oleh kantor wilayah sebanyak 499 permohonan. Realisasi tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebanyak 17 permohonan, dengan besaran capaian kinerja yaitu 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Integritas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja ini, merupakan hasil upaya tim bidang kekayaan intelektual yang selalu mengoptimalkan kegiatan diseminasi dan promosi sehingga masyarakat mulai melek terhadap kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan di daftarkan. Loker layanan pada pelayanan publik yang ada di kantor wilayah juga selalu memberikan

pelayanan yang prima membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan dan membantu masyarakat konsultasi mengenai kekayaan intelektual dan diberikan solusi atas kendala yang ada.

IKK 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas baiksekali	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 lokus	1 lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel diatas realisasi IKK yang berhasil dilakukan berjumlah 8 lokus. Angka ini telah melampaui target IKK yang ditetapkan pada tahun 2023. Pada tahun ini kegiatan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah dilakukan di 8 (delapan) tempat yaitu :

- Diseminasi Kekayaan Intelektual dilaksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2023 di Hotel Emerald, Kota Ternate.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	JENIS PERMOHONAN KI	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	TAHUN 2022
1.	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	100 %	1 Lokus

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai 1 lokus dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2023 yaitu sebanyak 1 lokus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA 2020 -2024	REALISASI 2023
1.	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang terlampir pada table diatas, target untuk indikator kerja Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah sebanyak 1 Lokus Realisasi tahun 2023 telah melebihi target yaitu sebanyak 1 Lokus, dengan besaran capaian kinerja yaitu 100 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Integritas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan yang dicapai dilakukan melalui kegiatan yang aktif dilakukan secara berkelanjutan. Sasaran tempat diseminasi dan promosi yang dilakukan disesuaikan dengan substansi layanan kekayaan intelektual. Untuk diseminasi paten dan desain industri kami lakukan di universitas dengan melakukan penguatan terhadap proses pangajuan permohonan sehingga tidak ada kendala teknis yang dialami oleh para pemohon.

SK 15. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal

Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

KODE	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.15	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan

IKK 1. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

" Sampai dengan Semester II Tahun 2023 Belum Terdapat Pengaduan terkait Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada tahun 2023 dan dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah berjalan dengan baik sehingga dapat disimpulkan capaiannya adalah 100% "

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Jumlah aduan yang dapat ditangani dibagi jumlah aduan dikali 100% 100 (---) × 100% = 100% 100	Realisasi dibagi target dikali 100% 100% (---) × 100% = 100% 100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	TAHUN 2022
1.	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	100 %	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya presentase penanganan pelanggaran kekayaan intelektual tidak mengalami kemunduran dan cenderung konsisten dalam menyelesaikan aduan yang ada

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA 2020 - 2024	REALISASI 2023
1.	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %	100 %

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang terlampir pada table diatas, target untuk indikator kerja Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah adalah sebesar 100 %. Pada tahun 2023 tidak terdapat aduan atas pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk pada kantor wilayah, dan aduan tersebut telah kami tangani dengan realisasi penanganan sebesar 100 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 ini dikarenakan pelayanan tanggap dan cermat yang kami berikan terhadap aduan yang masuk baik melalui konsultasi layanan loket baik melalui pos surat yang dikirim ke kantor wilayah. Prinsip kekeluargaan yaitu mediasi yang selalu kami utamakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran intelektual. Namun, jika pemohon telah melayangkan laporan ke pihak kepolisian, kami berkolaborasi dengan kepolisian dalam penanganan kasus aduan pelanggaran kekayaan intelektual dimana kami dapat dijadikan sebagai pihak dari instansi yang dapat dijadikan sebagai saksi ahli dalam kasus pelanggaran merek yang terjadi.

IKK 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang ditargetkan 2 kegiatan dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah tercapai seluruhnya, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023	TAHUN 2022
1.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	100 %	2 Lokus

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya presentase realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah tidak mengalami kemunduran dan cenderung konsisten dalam pelaksanaan kegiatannya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA 2020 - 2024	REALISASI 2023
1.	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus

Sesuai dengan renstra 2020 - 2024 kantor wilayah pada indikator Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor

Wilayah adalah 2 (dua) lokus. Pada tahun ini target tersebut tercapai yaitu dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di 2 (dua) lokus

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan tepat berdasarkan target kinerja dan sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan, kerjasama tim yang solid membuat target dapat terpenuhi dan terealisasi dengan baik.

IKK 3. Kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 laporan	10 laporan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 10 (sepuluh) kali dimana target yang telah ditetapkan adalah 10 kegiatan dan menghasilkan 10 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan standar

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TAHUN 2022
1.	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	2 Laporan

Berdasarkan data pada tabel diatas indikator kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah terealisasi sebanyak 10 laporan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal tersebut telah melampaui dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 10 (tiga) laporan dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA 2020-2024	REALISASI 2023
1.	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan	10 Laporan

Sesuai dengan renstra 2020-2024 kantor wilayah pada indikator Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah adalah 10 laporan. Pada tahun ini target tersebut tercapai yaitu dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di 10 laporan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan tepat berdasarkan target kinerja dan sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan, kerjasama tim yang solid membuat target dapat terpenuhi dan terealisasi dengan baik.

SK.16 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Sasaran Kinerja ini memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.16	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah

	3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
--	---	-----------------------

IKK.1 Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Tingkat partisipasi Provinsi Maluku Utara serta Kab/Kota Provinsi Maluku Utara dalam melaporkan aksi HAM pada sampai dengan periode B12 adalah konsisten 100 persen, yaitu seluruh Provinsi Maluku Utara serta Kab/Kota Provinsi Maluku Utara yang menjadi penanggung jawab Aksi HAM sesuai Perpres 75 Tahun 2021 seluruhnya melaporkan Aksi

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi <https://serambi.ksp.go.id> yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2023 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis.

Koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM dilaksanakan di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota. Koordinasi dilaksanakan secara langsung di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2023

Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 4 instansi yaitu:

Tabel: 3.17. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM

NO	INSTANSI PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

3	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
4	Pemerintah Kota Ternate

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 instansi pemerintah	4 instansi pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{4}{2} \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan program Aksi HAM. Hal ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Maluku Utara memenuhi target tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan realisasi persentase capaian aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Maluku Utara di tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 instansi pemerintah	4 instansi pemerintah

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Aksi HAM realisasi Persentase capaian Aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota Maluku Utara memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 dan TA 2024 adalah 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RENSTRA 2020-2023	REALISASI 2023
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	2 instansi pemerintah	4 instansi pemerintah

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi <https://serambi.ksp.go.id> yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2023 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis.

Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan mengadakan High Level Meeting dan Multi Stakeholder Forum, melaksanakan bimtek dan penajaman Aksi HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut antara lain masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar OPD, mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah, belum adanya koordinasi efektif antara BAPPEDA dan Biro Hukum, dan masa pelaporan aksi yang belum digunakan secara efisien oleh beberapa daerah sehingga ketika terjadi kendala teknis, daerah kehilangan

waktu untuk mengecek dan memasukkan data dengan benar.

Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan pendekatan baik secara luring/daring dengan melaksanakan asistensi, bimtek serta komunikasi yang lebih aktif, melakukan penguatan pada Panitia Nasional RANHAM dalam hal kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemantauan dan evaluasi RANHAM, serta membuat pedoman terhadap substansi Aksi HAM yang lebih jelas dan tata kalimat yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk keterangan penilaian dari kriteria nilai pada skor penilaian aksi HAM

IKK.2 Jumlah kab/kota peduli HAM

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengumpulan data penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara telah terlaksana dengan baik dan telah diinput kedalam aplikasi KKP HAM oleh Tim Sub Bidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk selanjutnya memasuki tahap proses verifikasi dan penilaian oleh Direktorat Jenderal HAM dan Tim Penilai dari Pusat.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Kab/Kota peduli HAM	1 instansi pemerintah	2 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{2}{1} \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 2 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang meraih predikat penghargaan dari pemerintah pusat tentang Kabupaten/Kota peduli HAM yaitu Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Hal ini telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni 1 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Jumlahkab/kota peduli HAM belum memenuhi target tahun 2022. Sedangkan realisasi

persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Maluku Utara memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 dan TA 2024 adalah 100

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Jumlah kab/kota peduli HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan kriteria penilaian daerah Kabupaten/ Kota peduli Hak Asasi Manusia guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, yang arahnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 - 2025, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Rapat Koordinasi di kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut dilaksanakan untuk memantau pelaksanaan Aksi HAM pada Kabupaten/ Kota terhadap kepedulian akan isu HAM.

Untuk memantapkan implementasi RANHAM dan Aksi HAM Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk melaksanakan Aksi HAM daerah dengan beberapa kriteria yaitu :

- Hak Atas Kesehatan;
- Hak Atas Pendidikan;
- Hak Perempuan dan Anak;
- Hak Atas Kependudukan;
- Hak Atas Pekerjaan;
- Hak Atas Perumahan Yang Layak; dan
- Hak Atas Lingkungan Yang Berkelanjutan.

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM mempunyai payung hukum untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2023 dan payung hukum tersebut untuk menjaring dan mengumpulkan data yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) khususnya implementasi penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang terkait 7 hak tersebut yang harus dipenuhi.

Pada tahun 2023, penilaian kabupaten kota peduli HAM diserahkan kepada Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore Kepulauan yang di dalam laporannya memenuhi klasifikasi indikator-indikator yang disyaratkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM

IKK.3 Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 seluruh Unit Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah melaksanakan pencanangan baik secara daring maupun luring dihadiri Direktur Jenderal HAM. Berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang P2HAM Tahap selanjutnya dari pencanangan adalah tahap pembangunan, Direktorat Diseminasi dan Penguatan telah melakukan tahap pembangunan (diseminasi dan penguatan) secara langsung yang telah dilaksanakan termasuk Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Dari 15 Unit Kerja yang telah dilakukan Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM, sebanyak 15 UPT telah menindaklanjuti dalam bentuk

Pencanangan P2HAM periode tahun 2022 sd 2023. Berikut tabel data UPT yang telah melaksanakan pencanangan dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM tahun 2023

NO	UNIT PELAKSANA TEKNIS
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate
2	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sanana
3	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo
5	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate
6	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate
7	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha
8	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ternate
9	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soasio
10	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Weda
11	Balai Pemasyarakatan Kelas II Ternate
12	Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore
13	RUPBASAN Kelas II Ternate
14	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate
15	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM telah memenuhi target di Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1 Instansi Pemerintah sedangkan realisasinya adalah 1 Instansi pemerintah sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100%.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	FORMULASI
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	1 instansi pemerintah	1 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dari 15 Unit Kerja yang telah dilakukan Diseminasi dan Penguatan dalam bentuk Pelayanan Publik Berbasis HAM, sebanyak 15 UPT telah menindaklanjuti dalam bentuk Pembangunan dan Pencanangan P2HAM

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 instansi pemerintah daerah yakni Kabupaten Pulau Morotai di Wilayah Maluku Utara yang mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari

target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM memenuhi target tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah Yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Maluku Utara memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 100 % dan TA 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan yaitu masih kurangnya fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.

SK.17 Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.17	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

IKK.1 Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 telah masuk pengaduan baik secara langsung dikomunikasikan maupun tidak langsung sebanyak 4 total kasus pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut telah ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi sebanyak 4 kasus dugaan pelanggaran HAM. Adapun yang menjadi target tahun 2023 untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti adalah 4 kasus dugaan pelanggaran HAM. Dari penanganan tersebut, terdapat beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti/ditanggapi oleh instansi terkait. Apabila merujuk pada target capaian di tahun 2023 yaitu 3 rekomendasi dari kasus penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait, maka capaian penanganan dugaan pelanggaran HAM pada tahun 2023 dapat dikatakan melebihi dari target yang ditetapkan menjadi 133%.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIANKERJA
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 rekomendasi	4 rekomendasi	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{4}{3} \times 100\% = 133,3\%$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase capaian Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah memenuhi target tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 133%.

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM realisasi Persentase capaian Kabupaten/Kota Maluku Utara memenuhi target tahun di TA 2021 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi target di TA 2023 adalah 133 % dan TA 2024.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara mengusulkan:

1. Rekomendasi Laporan Kasus Pemerkosaan Bahwa peristiwa tersebut terjadi, korban yang merupakan tuna rungu bersama dengan kedua temannya sedang berada di Kelurahan Mangga Dua.
2. Rekomendasi Laporan Beredar sebuah video berisi kekerasan terhadap bocah berusia 7 tahun di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan, yang viral di jagad media social, Senin, 24/04/2023.
3. Rekomendasi Laporan Kasus Sengketa Tanah 03 Februari 2023, di Kelurahan

Kalumata No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi Ket Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Kecamatan Kota Ternate Selatan.

4. Rekomendasi Laporan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Tanggal 4 Januari 2023 alamat pelapor di Kelurahan Maliaro Kota Ternate Tenggara.

SK.18 Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.18	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

IKK.1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

A. Rekomendasi Hasil Analisis Kebijakan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara telah membentuk Tim Kegiatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, Nomor : W29. 719 LT.01.02 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan surat keputusan tersebut Tim telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data;
2. Pelaksanaan verifikasi lapangan;
3. Pengolahan data;
4. Melakukan analisis data;
5. Menyusun draf laporan rekomendasi;
6. Menyusun Rekomendasi hasil analisis kebijakan.

Berikut sasaran Startegis Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang telah dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada tahun 2023

Tabel: 3.37. Sasaran Strategis Rekomendasi hasil kajian di wilayah

No	Judul Laporan Analisis Kebijakan	Pemangku Kepentingan (stakeholder)	Rekomendasi	Tindak lanjut dari stakeholder
1	Analisis Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeng Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19	Kementerian Hukum dan HAM	Melihat kondisi kekinian dimana situasi sudah kembali kondusif dari wabah Covid-19 yang kemudian diikuti dengan secara resmi dicabutnya status pandemi menjadi endemic oleh pemerintah pusat yang disampaikan langsung Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2023, maka alasan mendasar yang melatarbelakangi penerbitan Permenkumham 43 Tahun 18 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sudah tidak relevan lagi. Apabila semangat dari Permenkumam ini akan tetap dilanjutkan atau Asimilasi dan reintegrasi akan dilaksanakan pada kondisi yang sudah kondusif dari Covid-19 perlu ditinjau beberapa penyempurnaan terutama dilihat dari aspek kebutuhan dan kedaruratannya, karena Peraturan Perundang-undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”	Sudah ditindak lanjut
2	Analisis Implementasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan revisi Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk menegaskan kewenangan Kantor Wilayah di daerah dalam hal penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia; 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM melakukan langkah percepaan dengan memetakan skala prioritas terhadap kedala yang ditemui di lapangan 3. Masyarakat diharapkan dapat lebih 	Sudah ditindak lanjut

			<p>peka terhadap adanya dugaan pelanggaran HAM baik yang dialaminya sendiri maupun yang terjadi dilingkungannya dengan mengadakan kepada pemerintah/non pemerintah atau lembaga mandiri yang bergerak dalam penanganan HAM dan hendaknya dapat melengkapi semua persyaratan dan data pendukung lainnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sampai kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil; 5. Menentukan skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini serta meningkatkan peran media, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan 6. Melakukan upaya pembenahan dan perbaikan serta peningkatan kinerja sehingga pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal, profesional, akuntabel dan transparan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, serta dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. 	
3	Analisis Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 3. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dapat mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara ke Mahkamah Agung. 2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara memberikan sosialisasi/ arahan/ pemahaman kepada masyarakat yang menjadi lokus konflik karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2019 dan atau mendengarkan apapun keluhan masyarakat pada 6 desa yang menjadi titik konflik untuk bersama-sama mencari solusi 	Sudah ditindak lanjut

			yang terbaik	
4	Analisis Komitmen Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendampingan berupa monitoring dan evaluasi lebih mendalam dan konkrit terhadap implemntasi Kepmenkumham No. M.HH.06.OT.03.02 Tahu 2023 tetang Pedoman Pembagunan Agen Perubahan di Lingkungan Kemenkumham; 2. optimalisasi internalisasi pembagunan Zona Integritas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana; 3. penguatan pemahaman perubahan pegawai terhadap pembangunan zona integritas, agen perubahan, dan WBK/WBBM berkelanjutan; 4. meningkatkan sarana dan prasarana pada satker/UPT, termasuk didalamnya sumber daya manusia yang berkompetensi, serta model pembinaan yang professional; 5. melakukan pembinaan, penguatan, dan pendampingan yang komperhensif dan integral terhadap keberlanjutan WBK/WBBM di setiap satuan kerja/UPT, 6. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana perlu memperhatikan perilaku birokrasi pemerintah, kepada seluruh ASN untuk tidak memiliki perilaku kepedulian, kedisiplinan dan tanggungjawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan perilaku ASN perlu ditingkatkan dan diperbaiki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang datang melakukan pengurusan memberikan apresiasi atas perilaku aparat dalam melayani 	Sudah ditindak lanjuti

Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dibagi Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100% 100% $(\frac{4}{4}) \times 100\% = 100\%$ 80%
			4 $(\frac{4}{4}) \times 100\% = 100\%$ 4	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 4 rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dari total 4 rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Dengan demikian, realisasi pada indikator tersebut adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas terlaksananya kegiatan selama tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Maluku Utara sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada IKK. 1 Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM adalah sebesar 60%.

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60%	60%	60%	60%	60%

Dengan tercapainya Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia di lingkungan Kantor Wilayah Maluku Utara sebesar 60% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa indikator tersebut telah melampaui target jangka menengah.

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH	REALISASI 2023	KETERANGAN
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	60%	100%	Melebihi Target

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan kajian pengembangan hukum dan HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Dapat Dinyatakan Berhasil Karena Telah Mencapai Dan Melebihi Target Yang Telah Ditetapkan.

IKK.2 Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Telah dilaksanakan Kegiatan sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM dengan judul "Survey Index Kepuasan Masyarakat dan Index Persepsi Anti Korupsi adalah cara menyebarluaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Kegiatan sosialisasi telah

dilaksanakan sebanyak 1 kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada hari Kamis 15 Juni 2023 bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan telah dibukukan.

Tabel: 3.39. Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIANKERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku. Maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas terlaksananya kegiatan selama tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kanwil Maluku Utara sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	1 Buku	100%

Realisasi dan Capaian Kinerja indikator Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah pada periode tahun 2023 sama dengan realisasi dan capaian di tahun 2022 yaitu 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020 – 2024 yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini, target jangka menengah pada IKK. 2 Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah adalah 1 buku.

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2020 - 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku				

Dengan tercapainya indikator Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah Maluku Utara yaitu 1 buku pada tahun 2023, menunjukkan bahwa indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan sosialisasi ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM telah mensosialisasikan buku hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan forum Obrolan Peneliti (OPini). Keberhasilan pencapaian target kinerja ini disebabkan karena kerja sama yang baik antara tim OPini Kantor Wilayah Maluku Utara dengan Tim OPini Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

SK.19 Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.19	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

IKK.1 Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran kegiatan Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah dengan indikator kinerja Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham dengan target sebesar 80% rancangan produk hukum daerah yang

terfasilitasi, dimana peran dari perancang peraturan perundang-undangan sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja kantor wilayah Maluku Utara dalam memfasilitasi raperda di wilayah Maluku Utara. Pada Tahun anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menerima sebanyak 118 permohonan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum di Daerah. Untuk mengukur kinerja tersebut dilakukan analisis sebagai berikut

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	80%	Jumlah Raperda 2023 dibagi jumlah Raperda 2023 yang terfasilitasi dikali 100% 118 (--) \times 100% = 100% 118	Realisasi dibagi target dikali 100% 100 (---) \times 100% = 125% 80

Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Maluku Utara yang telah terfasilitasi pada Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut

NO	RAPERDA/RANPERDA TAHUN 2023	KABUPATEN/KOTA
1	Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah	Halmahera Barat
2	Penyelenggaraan Penganggulangan Bencana Daerah	Halmahera Barat
3	Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	Provinsi Malut
4	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan fasilitasi Penanaman Modal	Provinsi Malut
5	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023-2042	Provinsi Malut
6	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Halmahera Tengah
7	Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut	Halmahera Tengah
8	Penyelenggaraan Kersipan	Halmahera Tengah
9	Penyelenggaraan Budaya Literasi	Halmahera Tengah
10	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Halmahera Tengah
11	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Halteng Tahun 2023-2043	Halmahera Tengah
12	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Pada Perusahaan Umum Daerah Fogogoru Maju Bersama Kab.Halmahera Tengah	Halmahera Tengah

13	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Tidore
14	Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Kota Tidore
15	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kepulauan Sula
16	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Kepulauan Sula
17	Gerakan Literasi	Kepulauan Sula
18	Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Bobong	Pulau Taliabu
19	Retribusi Pelayanan kesehatan Dasar Pada Sarana kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu	Pulau Taliabu
20	Penertiban Hewan Ternak	Halmahera Timur
21	Kabupaten layak Anak	Halmahera Timur
22	Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum	Halmahera Timur
23	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Halmahera Timur
24	Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Korban Kekerasan	Halmahera Timur
25	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Halmahera Timur
26	Pemilihan Kepala Desa	Halmahera Timur
27	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Halmahera Timur
28	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Halmahera Timur
29	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Halmahera Utara
30	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Provinsi
31	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2041	Provinsi
32	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Daerah	Provinsi
33	Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif	Provinsi
34	Izin Pertambangan Rakyat	Provinsi
35	Penyelenggaraan Pesantren	Provinsi
36	Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang	Provinsi
37	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Provinsi
38	Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi
39	Penanggulangan Kemiskinan	Halmahera Timur
40	Pembentukan UPT Pelabuhan Sangowo Pada Dinas Perhubungan Kab Pulau Morotai	Pulau Morotai
41	Pembentukan UPT Pelabuhan Posi-Posi Pada Dinas Perhubungan Kab Pulau Morotai	Pulau Morotai
42	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pulau Morotai
43	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Halmahera Barat
44	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2023-2043	Halmahera Timur
45	Desa Wisata	Halmahera Selatan

46	Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial	Halmahera Selatan
47	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan pangan	Halmahera Selatan
48	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
49	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
50	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
51	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kilong Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
52	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Keramat Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
53	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
54	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Loho Bubba Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
55	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Meranti Jaya Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
56	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
57	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Ratahaya Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
58	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
59	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
60	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
61	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat	Pulau Taliabu
62	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kasango Kecamatan Taliabu Barat Laut	Pulau Taliabu
63	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut	Pulau Taliabu
64	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut	Pulau Taliabu
65	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut	Pulau Taliabu
66	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Balohang Kecamatan Ledé	Pulau Taliabu
67	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Langanu Kecamatan Ledé	Pulau Taliabu
68	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Ledé Kecamatan Ledé	Pulau Taliabu
69	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Todoli Kecamatan Ledé	Pulau Taliabu
70	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Tolong Kecamatan Ledé	Pulau Taliabu
71	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
72	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Air Kalimat Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
73	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Bija Mbono Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
74	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu

75	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
76	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Hai Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
77	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
78	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa London Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
79	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Mananga Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
80	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
81	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Natang Kuning Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
82	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
83	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
84	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
85	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
86	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Tanjung Una Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
87	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
88	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
89	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Wahe Kecamatan Taliabu Utara	Pulau Taliabu
90	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur	Pulau Taliabu
91	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Penu Kecamatan Taliabu Timur	Pulau Taliabu
92	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Samuya Kecamatan Taliabu Timur	Pulau Taliabu
93	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Tubang Kecamatan Taliabu Timur	Pulau Taliabu
94	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Belo Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
95	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kamaya Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
96	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
97	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
98	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Mantarara Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
99	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
100	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Waikadai Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
101	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Waikadai Sula Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
102	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Waikoka Kecamatan Taliabu Timur Selatan	Pulau Taliabu
103	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu

104	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
105	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
106	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
107	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
108	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
109	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Nggoli Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
110	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Pancando Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
111	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan	Pulau Taliabu
112	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Fayaunana Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
113	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Habunuha Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
114	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kabunu Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
115	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Kataga Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
116	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Peleng Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
117	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Tabona Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu
118	Rancangan Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Peta Batas Desa Wolio Kecamatan Tabona	Pulau Taliabu

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi dengan perhitungan Jumlah Raperda tahun 2023 (118 Raperda).

Jumlah Raperda yang Terfasilitasi Tahun 2023 (118 Raperda) dibagi Jumlah Permohonan Raperda Tahun 2023 (118 Raperda). maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%.

2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2022:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERBANDINGAN		
			TARGET	2022	2023
1	Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	16,25%

Terdapat perbedaan realisasi kinerja di Tahun 2021 dengan Tahun 2022 dan tahun 2023 dimana untuk kegiatan Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum Di Daerah

yang tercermin dalam perbandingan dimana pada Tahun 2021 target kinerja yang tergambar adalah persentase jumlah permohonan yang terfasilitasi dengan anggaran pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum daerah, akan tetapi pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 prosentase menggambarkan jumlah permohonan yang terfasilitasi dengan permohonan dari pemerintah Daerah sehingga pada Tahun 2023 ini tidak menggambarkan anggaran yang mengakomodir kebutuhan anggaran pada Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara persentase capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, namun apabila dilihat dari jumlah permohonan yang dimohonkan Pemerintah Daerah maka capaian Kinerja pada Tahun 2023 dibandingkan pada Tahun 2022.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PERBANDINGAN		
			TARGET RENSTRA	2022	2023
1	Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	125%	125%

Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham pada tahun 2022 dengan target 80 terealisasi 125. Apabila merujuk target jangka menengah pada dokumen rencana strategis yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 tidak mengalami perubahan target yaitu sebesar 80.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

5. Penyebab Keberhasilan

- Peningkatan yang cukup signifikan terkait permohonan Raperda/Raperkada untuk dilakukan harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara karena kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota terhadap kinerja dari tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait kegiatan fasilitasi harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- Kualitas Sumber Daya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang semakin meningkat.

SK.20 Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.20	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang

IKK.1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

Capaian kinerja Pembinaan Hukum diukur menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja dan sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

Pada Tahun anggaran 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ditargetkan sebanyak 12 (dua belas) peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur kinerja tersebut dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di seluruh wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	12 orang	12 orang	100%

Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Daerah dan Perancangan Peraturan Daerah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara adalah penambahan wawasan perancang peraturan perundang-undangan

untuk menghasilkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, profesional, berintegritas, dan berdedikasi, dan mempunyai keahlian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2023
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di seluruh wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	12 orang	11 orang	12 Orang

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020-2024	Realisasi Kinerja 2023
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di seluruh wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	12 orang	12 Orang

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat. Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah permohonan harmonisasi, sehingga berdampak pada kurangnya tenaga fungsional Perancang dan tenaga administratif, solusi yang telah dilakukan dengan melakukan penguatan terhadap Tim Kelompok Kerja dan melibatkan Analis Hukum dan Peserta Magang untuk membantu pengelolaan administratif.

SK.21 Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.21	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum diWilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan

IKK.1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Capaian kinerja pembinaan Hukum di wilayah diukur menggunakan rumus semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja dan sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

Pada Tahun anggaran 2023 pembinaan Hukum di wilayah dituangkan dalam kegiatan:

- a. Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah melalui Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum
- b. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, melalui:
 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik,
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah, dan
 - Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan./atau Naskah Akademik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIANKERJA
fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	11 kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{11}{2} \times 100\% = 550\%$

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah yang dilaksanakan Kantor Wilayah Maluku Utara 11 Kegiatan dengan rincian yaitu; 8 lembaga dari target 1 lembaga untuk Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah, serta Terbentuknya 3 Rekomendasi Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum dari Target 1 Rekomendasi. Jadi dapat disimpulkan jumlah kegiatan Fasilitasi

Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah telah melebihi sesuai Target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023
fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	1 kegiatan	11 kegiatan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2023	TAHUN 2023
fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	11 kegiatan

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap jumlah permohonan harmonisasi, sehingga berdampak pada kurangnya tenaga fungsional Perancang dan tenaga administratif, solusi yang telah dilakukan dengan melakukan penguatan terhadap Tim Kelompok Kerja dan melibatkan Analis Hukum dan Peserta Magang untuk membantu pengelolaan administratif.

SK.22 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.22	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

IKK.1 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturanperundang-undangan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2023 untuk litigasi setelah addendum sebesar Rp 915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar Rp 914.810.000 (sembilan ratus empat belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau 99,99% dari perhitungan Omspan;
- Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) orang penerima bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 3.26 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Penyidikan/ Gugatan (Orang)	Persidangan (Orang)	Bandung (Orang)	Kasasi (Orang)	Peninjauan Kembali (Orang)
1	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) MALUKU UTARA	9	25	0	0	0

2	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) TRUST MALUKU UTARA	2	19	0	0	0
3	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) KAPITA MALUKU UTARA	1	21	0	0	0
4	POSBAKUMADIN KOTA TIDORE	4	19	0	0	0
5	YAYASAN BANTUAN HUKUM (YBH) SIPAKALEMALUT	1	32	0	0	0
6	YAYASAN YUSTISIA MALUT	13	26	0	0	0
7	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) ADIN CABANG HALMAHERA UTARA	0	21	0	0	0
8	YAYASAN YUSTISIA CABANG HALBAR	5	27	0	0	0
9	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) WALIMA SULA	18	18	3	0	0
JUMLAH		53	208	3	0	0

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	82%	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani dibagi volume bantuan hukum litigasi dikali 100% 246 (---) × 100% = 189% 130	Realisasi dibagi target dikali 100% 189 (---) × 100% = 230% 82

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 189%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 82%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 230%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 sebesar 123% dan pada Tahun 2023 sebesar 230%. Untuk Capaian Kinerjanya mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	189%	230%	81%	100%	123,24%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebanyak 130 orang, sementara realisasi di Tahun 2023 adalah 246 orang untuk kurun waktu 1 tahun dan realisasi di tahun 2022 adalah 147 orang

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 189%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 82%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 230%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan

hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada Pemberi Bantuan Hukum. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

IKK.2 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Kegiatan non litigasi dilaksanakan oleh 9 (sembilan) OBH, dan total permohonan seluruhnya sebanyak 246 permohonan dengan 54 (empat puluh empat) kegiatan bantuan hukum non litigasi;
- Pagu anggaran tahun 2023 untuk non litigasi setelah addendum sebesar Rp 159.650.000 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar 159.650.000 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100% dari perhitungan Omspan;
- Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2023 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Maluku Utara berjumlah 54 (lima puluh empat) kegiatan bantuan hukum non litigasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 3.28. Perhitungan Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	80%	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani dibagi jumlah volume bantuan hukum non litigasi dikali 100% 54 (---) × 100% = 360% 15	Realisasi dibagi target dikali 100% 360 (---) × 100% = 450% 80

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 360%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 80 %, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 450%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2023 dan 2022, realisasi Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 sebesar 100%, dan pada Tahun 2023 sebesar 450%. Untuk Capaian Kinerjanya mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100%	125%	80%	360%	450%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebanyak 15 kegiatan, sementara realisasi di Tahun 2023 adalah 54 kegiatan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggarakan ya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang / kelompok masyarakat miskin	15 kegiatan				

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Capaian Tahun 2023 dari target 80%, dan berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 360% dan Capaian Kinerja sebesar 450%, hal ini menunjukkan bahwa target indikator kinerja Presentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tercapai dengan Sangat Baik.

IKK.3 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum adalah 76,75 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei Kepuasan Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui "Kuisisioner Indeks Kinerja OBH" pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum

setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 hasilnya adalah 90,44 indeks.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	90,44%	Realisasi dibagi target dikali 100% 90,44 (---) × 100% = 118% 76,75

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Target Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum adalah 76,75 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei Kepuasan Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “Kuisisioner Indeks Kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah (PANWASDA) terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 hasilnya adalah 90,44 indeks

Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum di Tahun 2022 mencapai 83,33 indeks dari target 76,61 indeks dengan capaian sebesar 90,44

INDIKATOR KINERJA	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75 indeks	90,44 indeks	188%	76,61 indeks	83,33 indeks	108%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebanyak 76,61% (Baik), sementara Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun

2023 hasilnya adalah 90,44 indeks dan realisasi di tahun 2022 adalah 83,33 indeks

SASARANKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	n/a	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)	76,61% (Baik)

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks kepuasan layanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Agar terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2023 dengan baik dan optimal sesuai keluaran atau output yang diharapkan maka penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi di wilayah harus diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tugas Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

- 1) melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- 2) membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
- 3) mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian;

Panitia Pemantauan dan Evaluasi oleh Pengawas Daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi melalui wawancara dengan penerima bantuan hukum.

IKK.4 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dari 7 Desa Sadar Hukum di Maluku Utara, keseluruhannya telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi DSH (existing) TA. 2023 sesuai dengan SE BPHN No. PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Capaian Target Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023 :

- 1) Terdapat 24 Desa/Kelurahan Desa Binaan Persiapan yaitu 14 Desa/Kelurahan di Kota Tidore Kepulauan, dan 10 Desa/Kelurahan di Kabupaten Halmahera Selatan
- 2) Telah terbentuk 10 Desa Binaan di Kota Ternate yang siap dikukuhkan menjadi Desa Sadar Hukum di Maluku Utara, sesuai SK Walikota Ternate Nomor 248/II/KT/2023 tentang Penetapan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ternate Tahun 2023

Selain pemenuhan data dukung, kegiatan tersebut juga dikemas dalam bentuk Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2023. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat melalui diskusi tanya jawab dalam pola penyuluhan hukum. Dalam kegiatan Penyuluhan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memberikan informasi berkaitan dengan program bantuan hukum gratis dan inovasi pelayanan permohonan bantuan hukum (si perahu - sistem pelayanan permohonan bantuan hukum) gratis yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Maluku Utara MOU dengan beberapa Kelurahan di Maluku Utara. Adapun data desa/kelurahan sadar hukum yang dilakukan Pembentukan/Pembinaan Desa Sadar Hukum oleh Kanwil Kemenkumham Maluku Utara yaitu sebagai berikut:

Kelurahan Yang Sudah Di Resmikan Pada Tahun 2010 Untuk Tahun 2023

No	Nomor Surat Keputusan	Penanggung Jawab
1.	KELURAHAN SOA SIO 180/156/CAMTARA/2023	CAMAT KOTA TERNATE UTARA
2.	KELURAHAN STADION 226/773/2023	CAMAT KOTA TERNATE TENGAH
3.	KELURAHAN TADENAS 140/53/VIII/2023	LURAH TADENAS KECAMATAN PULAU MOTI

Kelurahan Sadar Hukum Yang Berhasil Ditetapkan Tahun 2023

No	Nama Kelurahan Sadar Hukum	Kecamatan
1.	KELURAHAN MOYA	TERNATE TENGAH
2.	KELURAHAN TAKOME	TERNATEBARAT
3.	KELURAHAN TOMAJIKO	PULAU HIRI
4.	KELURAHAN TARAU	TERNATE UTARA
5.	KELURAHAN TOBOLEU	TERNATE UTARA
6.	KELURAHAN TABAM	TERNATE UTARA
7.	KELURAHAN SANGAJI	TERNATE UTARA
8.	KELURAHAN KASTELA	PULAU TERNATE
9.	KELURAHAN FORAMADIAHI	PULAU TERNATE
10.	KELURAHAN JAMBULA	PULAU TERNATE

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	Jumlah desa sadar hukum yang dibentuk Tahun 2023 dibagi jumlah desa sadar hukum yang dibentuk dikali 100% 7 (---) × 100% = 100% 7	Realisasi dibagi target dikali 100% 100% (---) × 100% = 143% 70%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah di Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 100% sedangkan target 70%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 143%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dan 2022, realisasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing- masing Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2023			2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Presentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum	70%	100%	143%	70%	70%	100%
---------------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah	70%	70%	70%	70%	70%

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah sebesar 70%, sementara Realisasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah Tahun 2023 adalah 100%. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum ditunda pelaksanaannya oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan realisasi di tahun 2022 adalah 70%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dari 7 Desa Sadar Hukum di Maluku Utara, keseluruhannya telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi DSH (existing) TA. 2023 sesuai dengan SE BPHN No. PHN.HN.04.04-01 tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

IKK.5 Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:

Tabel: 3.34. Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN

NO	ANGGOTA JDIHN
1.	Pem. Prov Maluku Utara
2.	Pem Kab Halmahera Barat
3.	Pem Kab Halmahera Selatan
4.	Pem Kab Halmahera Tengah
5.	Pem Kab Halmahera Timur
6.	Pem Kab Halmahera Utara
7.	Pem Kab Kepulauan Sula
8.	Pem Kab Pulau Morotai
9.	Pem Kab Pulau Taliabu
10.	Pem Kota Ternate
11.	Pem Kota Tidore Kepulauan
12.	Set DPRD Provinsi Maluku Utara
13.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Barat
14.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
15.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
16.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Timur
17.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Utara
18.	Set DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
19.	Set DPRD Kabupaten Pulau Morotai
20.	Set DPRD Kabupaten Pulau Taliabu
21.	Set DPRD Kota Ternate
22.	Set DPRD Kota Tidore Kepulauan

Tabel: 3.35. Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Persentase Anggota JDIH yang Berpartisipasi Aktif	20%	Anggota JDIHN yang telah melapor e-report dibagi jumlah anggota JDIHN Maluku Utara dikali 100% 10 (---) × 100% = 45,45% 22	Realisasi dibagi target dikali 100% 45,45 (---) × 100% = 227% 20%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif diukur berdasarkan pelaporan e-report JDIHN di Wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebanyak 10 anggota dari total 22 anggota (100%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 20%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 227%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	TARGET 2023
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat diwilayah	Persentase Anggota JDIH yang Berpartisipasi Aktif	20%	45,45%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	20%	20%	20%

Realisasi kinerja dengan Target Kinerja mulai tahun 2020 hingga 2024 telah ditetapkan sebesar 20% dalam Renstra Kemenkumham. Target 20% di Tahun 2023 telah dijalankan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	STANDAR NASIONAL	REALISASI 2023	KETERANGAN
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	45.45%	Melebihi Target

Pada Renstra Kemenkumham tahun 2020-2024, ditetapkan sebesar 20% pada persentase anggota JDIH yang berpartisipasi aktif. JDIH Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara berusaha memenuhi target 20% di tahun-tahun sebelumnya agar bisa sesuai.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, terutama adalah perhatian dari Pimpinan dan kerjasama internal antar divisi sebagai support system guna kemajuan Kemeterian Hukum dan HAM Kanwil Maluku Utara.

1. BIDANG PELAYANAN HUKUM

• JUMLAH LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	JENIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	Hak cipta	432	402
2	Merek	43	66
3	Paten	1	4
4	Desain Industri	-	-
5	Rahasia Dagang	-	-
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-
7	Indikasi Geografis	1	-
8	KI Komunal	400	25
9	Penegakan HKI	-	-
10	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis KI	1	2
11	<i>One Village One Brand</i>	-	-
Total		878	499

- JUMLAH LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No	Jenis Layanan AHU	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Fidusia	26047	31089
2	Perseroan Perorangan	126	223
3	Jumlah Notaris	37	42
4	Pengawasan Notaris	25	25
5	Partai Politik	-	75
6	PPNS	3	7
7	Kewarganegaraan	-	-
8	<i>Apostille</i>	26	1
Total		26.264	31.462

2. BIDANG HUKUM

- JUMLAH LAYANAN BANTUAN HUKUM**

No	Jenis Layanan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Layanan dan Penerima Bantuan Hukum	180	300
2	Jumlah OBH	9	9
Total		189	309

- JUMLAH PRODUK BIDANG HUKUM**

No	Jenis Layanan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah	30	118
2	Jumlah Perancang PerUU Kanwil Malut	11	12
Total		41	130

- JUMLAH PENYULUHAN HUKUM & JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI**

No	Jenis Layanan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Pelaksanaan penyuluhan hukum	10	9
2	Masyarakat yang memperoleh penyuluhan hukum	371	298
3	Desa/Kelurahan Sadar Hukum	7	17
4	Produk Dokumentasi Informasi	390	390
Total		778	714

3. BIDANG HAM

• JUMLAH PELAKSANAAN TUSI HAM

No	Jenis Layanan	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Aksi HAM	10	4
2	Kabupaten/Kota Peduli HAM	1	2
3	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM	2	2

A. JUMLAH PELAKSANAAN TUSI BALITBANG

No	Jenis Layanan	2022	2023	Tema 2022	Tema 2023
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian	4	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemulihan Hutan Mangrove di Provinsi Maluku Utara 2. Analisis Pecegahan Pelarian Narapidana pada Lembaga Pemasarakatan di Jajaran Kanwil. Kemenkumham Maluku Utara 3. Tinjauan Yuridis Destructive Fishing di Perairan Maluku Utara 4. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dalam Penanggulangan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjeng Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 2. Analisis Implementasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 3. Analisis Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat Dengan Kabupaten Halmahera Utara 4. Analisis Komitmen Pembangunan Zona Integritas Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sanana
2	Karya tulis / Buku yang disosialisasikan	1	1	alitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan	urvey Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat
Total		5			

B. REALISASI ANGGARAN**❖ DIVISI ADMINISTRASI**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN per 31 Desember 2023 realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pagu Anggaran

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
13,232,087,000	16,609,138,000	16,454,658,979	154,479,021	99.07%

*) Pagu Awal

**) Pagu setelah Automatic Adjustment

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	12,301,933,000	16,609,138,000
REALISASI	12,241,608,743	16,454,658,979
CAPAIAN	99.51%	99.07%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian realisasi anggaran Tahun 2022–2023 Program Dukungan Manajemen, pada tahun 2023 terdapat realisasi sekitar 99.07%. Oleh karena itu penyerapan anggaran kegiatan maksimal terserap. Serta pelaksana kegiatan/pemangku kegiatan telah melakukan revisi agar dapat memaksimalkan anggaran agar dapat di fungsikan dan dimaksimalkan untuk kegiatan / program yang ada.

❖ DIVISI PEMASYARAKATAN

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
719,077,000.-	719,077,000	716,270,110	2,806,890	99.61%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	829,564,000	719,077,000
REALISASI	823,095,100	716,270,110
SISA	6,468,900	2,806,890
CAPAIAN	99.22%	99.61%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 Capaian 99.61%. Kenaikikan realisasi tersebut dikarenakan sisa anggaran yang dapat diserap secara maksimal serta adanya pembukaan Automatic Adjustment yang berdampak pada penyerapan anggaran.

❖ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,712,140,000	1,712,140,000	1,698,569,142	13,570,858	99.21%

*) Pagu Awal

**) Pagu setelah Automatic Adjustment

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	1,462,670,000	1,712,140,000
REALISASI	1,451,018,170	1,698,569,142
CAPAIAN	99.20%	99.21%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.21% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 99.20%.

❖ DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
2,234,412,000	2,234,412,000	2,207,242,650	27,169,350	98.78%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	2,031,284,000	2,234,412,000
REALISASI	2,008,199,920	2,207,242,650
CAPAIAN	98.86%	98.78%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat kenaikan realisasi anggaran di periode tahun 2023 yaitu 98.78% dibandingkan tahun 2022 sebesar 98.86%. berdasarkan kalender kerja yang sudah ditetapkan.

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,587,436,000	1,587,436,000	1,585,006,420	2,429,580	99.85%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	913,609,000	1,587,436,000
REALISASI	903,031,988	1,585,006,420
CAPAIAN	98.84%	99.85%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.85% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 98.84%.

C. PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
272,000,000	272,000,000	271,176,692	823,308	99.70%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	217,000,000	272,000,000
REALISASI	215,810,000	271,176,692
CAPAIAN	99.45%	99.70%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.70% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 99.45%.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN REGULASI, PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Penyelenggaraan

Pembentukan Regulasi, Penegakan dan Pelayanan Hukum di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,316,698,000	1,540,638,000	1,540,448,000	190,000	99.99%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	949,655,000	1,540,638,000
REALISASI	948,644,180	1,540,448,000
CAPAIAN	99.89%	99.99%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.99% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 99.89%.

E. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
253,345,000	253,345,000	252,550,389	794,611	99.69%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 – 2023
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	182,131,000	253,345,000
REALISASI	181,094,360	252,550,389
CAPAIAN	99.43%	99.69%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran di tahun 2023 sebesar 99.69% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 99.43%.

F. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU*	PAGU**	REALISASI	SISA	CAPAIAN
283,561,000	283,561,000	281,181,000	2,380,000	99.16%

Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2022	2023
PAGU	273,061,000	283,561,000
REALISASI	270,483,360	281,181,000
CAPAIAN	99.06%	99.16%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99.16% di tahun 2023 dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2022 yaitu sekitar 99.06%.

➤ Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 dan Anggaran Tahun 2023

Salah satu tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai sarana informasi terkait capaian kinerja organisasi, untuk itu perlu disajikan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembanding capaian kinerja tahun berjalan. Berikut capaian kinerja terkait pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran Satuan Kerjanya.

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022 DAN TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

NO	KODE SATKER	SATKER	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	649022	SEKJEN	12,301,933,000	12,241,608,743	99.51%	16,609,138,000	16,454,658,979	99.07%
2	649023	DITJEN AHU	2,031,284,000	2,008,199,920	98.86%	2,234,412,000	2,207,242,650	98.78%
3	649024	DITJEN PAS	829,564,000	823,095,100	99.22%	719,077,000	716,270,110	99.61%
4	649025	DITJEN IMIGRASI	1,462,670,000	1,451,018,170	99.20%	1,712,140,000	1,698,569,142	99.21%
5	649026	DITJEN KI	913,609,000	903,031,988	98.84%	1,587,436,000	1,585,006,420	99.85%
6	649027	DITJEN PP	217,000,000	215,810,000	99.45%	272,000,000	271,176,692	99.70%
7	649028	DITJEN HAM	273,061,000	270,483,360	99.06%	283,561,000	281,181,000	99.16%
8	649029	BPHN	949,655,000	948,644,180	99.73%	1,540,638,000	1,540,448,000	99.99%
9	649030	BALITBANGKUMHAM	182,131,000	181,094,360	99.43%	253,345,000	252,550,389	99.69%
10	652827	LAPAS TERNATE	8,371,188,000	8,084,777,017	96.58%	7,636,669,000	7,570,454,057	99.13%
11	109153	LAPAS SANANA	5,981,079,000	5,745,678,992	96.06%	5,810,769,000	5,750,343,100	98.96%
12	109152	LAPAS TOBELO	6,099,138,000	5,906,720,188	96.85%	6,190,304,000	6,159,690,575	99.51%
13	497840	LAPAS JAILOLO	4,642,541,000	4,537,903,187	97.75%	4,413,312,000	4,315,450,781	97.78%
14	407503	LAPAS LABUHA	3,902,043,000	3,832,312,526	98.21%	2,234,412,000	2,207,242,650	98.78%
15	407499	RUTAN TERNATE	6,213,168,000	6,001,590,920	96.59%	6,245,533,000	6,216,368,928	99.53%
16	531891	RUTAN SOASIO	4,153,489,000	4,143,357,511	99.76%	4,376,162,000	4,369,297,207	99.84%
17	684003	RUTAN WEDA	2,930,701,000	2,801,367,179	95.59%	3,260,820,000	3,042,133,473	93.29%
18	418350	LAPAS PEREMPUAN	10,403,869,000	10,293,203,517	98.94%	4,381,774,000	4,337,061,641	98.98%
19	352614	LPKA TERNATE	5,398,599,000	5,392,501,573	99.89%	5,283,835,000	5,240,853,473	99.19%
20	632712	RUPBASAN TERNATE	2,338,796,000	2,365,725,296	101.15%	2,347,914,000	2,329,304,371	99.21%
21	626161	BAPAS TERNATE	4,001,221,000	3,803,757,968	95.06%	3,439,044,000	3,397,190,216	98.78%
22	632047	BAPAS TIDORE	2,664,219,000	2,625,975,726	98.56%	5,340,103,000	5,234,969,824	98.03%
23	480505	KANIM TERNATE	10,141,604,000	9,949,786,512	98.11%	9,862,919,000	9,698,504,076	98.33%
24	662968	KANIM TOBELO	5,973,083,000	5,905,150,279	98.86%	8,224,370,000	8,105,538,175	98.56%
TOTAL			101,320,035,000	95,025,194,079	98.10%	106,205,259,000	104,906,335,510	98.78%

sumber <http://spanint.kemenkeu.go.id/>

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. SMART DJA

Aplikasi SMART DJA termasuk salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan Indonesia dimana *e-government* ini mulai banyak digunakan untuk memudahkan kinerja pemerintah. Dengan mengusung tema *e-government* menuju *good governance*, SMART DJA ini adalah bentuk *e-monev* penganggaran, khususnya kinerja penganggaran. Monitoring kinerja penganggaran dalam bentuk aplikasi SMART DJA ini adalah upaya penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Terdapat dua langkah penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yakni penataan struktur dan informasi kinerja program dalam RKA-K/L dan efektifitas penggunaan *monev* kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. SMART DJA digunakan sebagai sarana pengumpul data kinerja kementerian negara/lembaga di Indonesia. Adanya SMART DJA merupakan terobosan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana pada awalnya Kementerian Negara/Lembaga diharuskan melaporkan data yang sama dan berulang kali kepada beberapa instansi yang berbeda.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mendasari diciptakannya SMART DJA sebagai aplikasi *e-monev* kinerja penganggaran. Sistem pelaporan online dalam SMART memudahkan satuan kerja dalam melaporkan kinerjanya yang mana langsung terkoneksi dengan instansi di atasnya. Kemudahan akses internet serta jangkauan komunikasi antar instansi mempermudah mekanisme pelaporan, baik dalam pengisian data maupun dalam menyampaikan seputar pertanyaan dan/atau keluhan. Jika satuan kerja mendapati kesulitan dapat langsung menghubungi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran. Capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran;
- b) Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan;
- c) Capaian keluaran kegiatan; dan
- d) Efisiensi.

Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi

realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Capaian keluaran (output) kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rekap nilai SMART DJA per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Rekapitulasi SMART DJA Tahun Anggaran 2023

Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	649026	Ditjen KI	99.98	SANGAT BAIK
2	531891	Rumah Tahanan Negara Soasiu	99.98	SANGAT BAIK
3	649027	Ditjen PP	99.97	SANGAT BAIK
4	649029	BPHN	99.97	SANGAT BAIK
5	649030	Balitbangkumham	99.96	SANGAT BAIK
6	407499	Rumah Tahanan Negara Ternate	99.94	SANGAT BAIK
7	109152	Lembaga Pemasyarakatan Tobelo	99.94	SANGAT BAIK
8	649025	Divisi Keimigrasian	99.91	SANGAT BAIK
9	649028	Ditjen HAM	99.91	SANGAT BAIK
10	649022	Sekjen	99.89	SANGAT BAIK
11	652827	Lembaga Pemasyarakatan Ternate	99.86	SANGAT BAIK
12	649023	Ditjen AHU	99.85	SANGAT BAIK
13	649024	Divisi Pemasyarakatan	99.8	SANGAT BAIK
14	662968	Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo	99.3	SANGAT BAIK
15	418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	99.27	SANGAT BAIK
16	352614	LPKA Kelas II Ternate	99.19	SANGAT BAIK
17	480505	Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	98.64	SANGAT BAIK
18	407503	Lembaga Pemasyarakatan Labuha	99.87	SANGAT BAIK
19	497840	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	99.75	SANGAT BAIK
20	626161	Balai Pemasyarakatan Ternate	99.81	SANGAT BAIK
21	632712	Rupbasan Ternate	99.90	SANGAT BAIK
22	632047	Balai Pemasyarakatan Tidore	99.45	SANGAT BAIK
23	109153	Lembaga Pemasyarakatan Sanana	99.88	SANGAT BAIK
24	684003	Rumah Tahanan Negara Weda	99.19	SANGAT BAIK
TOTAL			99.72	SANGAT BAIK

Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id>

Dari hasil monitoring dan evaluasi nilai SMART, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memperoleh nilai sebesar 99,72. Apabila di konversikan sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 60%. Berikut perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian SMART} = 99,72 \times \frac{60}{100} = 59,83\%$$

- Efisiensi

Dalam laporan ini, juga disajikan nilai kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran pada tiap program per satuan unit kerja. Sarana pengukuran ini telah tersedia dalam aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran). Berdasarkan aplikasi SMART tahun 2023 diatas didapatkan rekapitulasi Nilai Kinerja dan Capaian Efisiensi Kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara mencapai **99,66**. Jika efisiensi kinerja merupakan nilai perbandingan dari capaian kinerja dengan penggunaan sumberdaya yang digunakan, dalam hal ini alokasi anggaran, maka secara rata-rata nilai efisiensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dianggap sangat baik. Meskipun beberapa satuan kerja belum dapat membuktikan efisiensi kinerjanya, namun hal ini menjadi koreksi dalam pelaksanaan anggaran ditahun berikutnya.

2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut:

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian
- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/diseter;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian

kinerja anggaran;

- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif.5. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00;
- Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut:

- Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
- Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;
- Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
- Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar 99,38. Apabila di konversikan sesuai dengan perhitungan capaian kinerja anggaran maka dikalikan dengan bobot penilaian yaitu sebesar 40%. Berikut perhitungannya dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Capaian IKPA} = 99,38 \times \frac{40}{100} = 39,75\%$$

Sesuai dengan bobot penilaian yang ditetapkan, maka capaian kinerja anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara 2023 mencapai **99,38**

VARIABEL	NILAI	BOBOT	CAPAIAN PER VARIABEL	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
SMART	99,89	60%	59,83	99,58
IKPA	99,38	40%	39,75	

**NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
PER 31 Desember 2023**

No	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	684003 Rutan Kelas II B Weda	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	649026 DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	100	100	100	100	100	0	100	100	100
3	649023 DITJEN AHU	100	100	100	100	100	0	100	100	100
4	649030 BALITBANG KUMHAM	100	100	100	0	0	0	100	100	100
5	649025 DITJEN IMIGRASI	100	100	100	0	0	0	100	100	100
6	418350 Lapas Perempuan Kelas III Ternate	100	100	100	100	100	99.82	100	100	99.98
7	407503 LAPAS KELAS III LABUHA	100	100	100	100	100	99.45	100	100	99.95
8	531891 RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	100	100	100	100	100	99.28	100	100	99.93
9	352614 LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	100	100	100	100	100	99.21	100	100	99.92
10	109153 LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	100	100	100	100	100	99.22	100	100	99.92
11	652827 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	100	100	100	100	100	99.96	100	100	99.92
12	649029 BPHN	100	100	100	0	0	99.34	100	100	99.92
13	649027 DITJEN PP	100	100	100	0	0	98.00	100	100	99.75
14	649022 SETJEN	100	100	98.63	100	100	99.96	100	100	99.72
15	109152 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	100	100	100	100	100	97.23	100	100	99.72
16	649024 DITJEN PEMASYARAKATAN	100	100	100	0	0	96.68	100	100	99.59
17	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	100	94.90	100	100	100	99.33	100	100	99.42
18	632712 RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	100	94.06	100	0	0	100	100	100	99.26
19	649028 DITJEN HAM	100	92.26	100	0	0	99.56	100	100	98.98
20	480505 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	100	92.62	100	92.80	100	100	100	100	98.54
21	626161 BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	100	86.60	100	0	0	100	100	100	98.33
22	662968 KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	100	87.15	100	95.50	100	99.78	100	100	98.24
23	632047 BAPAS KELAS II TIDORE	100	100	90	91.00	100	99.90	100	100	97.06
24	497840 LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	100	100	85	100	100	100	100	100	97.04
Total Nilai		100	97.82	98.89	98.71	100	99.34	100	100	99.38

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjina kinerja Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam kurun waktu tahun anggaran 2023.

E-performance Kementerian Hukum dan HAM, menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertujuan menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi E-Performance berisi tentang:

- a) Perencanaan kinerja (renstra, perjanjian kinerja, program/kegiatan dan anggaran);
- b) Realisasi Kinerja/kegiatan/anggaran;
- c) Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

Adapun Rekapitulasi pengisian aplikasi e-performance TA. 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah sebagai berikut (screenshot terlampir) berdasarkan <https://e-performance.kemenkumham.go.id>.

SCREEN SHOOT PENGISIAN E-PERFORMANCE TAHUN 2023
DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

The screenshot shows the E-PERFORMANCE system interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items like Home, Dashboard, BSC, Data Master, Target Kinerja, Input Data, Perencanaan, Realisasi, Sakip, Lainnya, Ubah Password, and Keluar. Below the navigation bar is a banner with the logo of PENGAYOMAN and the text "E-PERFORMANCE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA".

Below the banner, there is a greeting: "Hai Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara. Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Kamis, 04 Januari 2024 | 07:43:20 WIB".

The main content area shows a search filter for the year 2023, the unit "KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA", and a "Tampilkan" button. Below the filter is a table with the following data:

ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)					Total	TERCAPAI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				00.00 s/d 49.99	50.00 s/d 64.99	65.00 s/d 74.99	75.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99				
51	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	TW1	9							52		61
		TW2	9							52		61
		TW3	9							52		61
		TW4								61		61
5110	DIVISI ADMINISTRASI MALUKU UTARA	TW1								1		1
		TW2								1		1
		TW3								1		1
		TW4								1		1

E-PERFORMANCE SISTEM AKUP

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&ed_unit_kerja...

Home Dashboard BSC Data Master Target Kinerja Input Data Perencanaan Realisasi Sakip Lainnya Ubah Password Keluar

5111	DIVISI PEMAYARAKATAN MALUKU UTARA	TW1							28	28
		TW2							28	28
		TW3							28	28
		TW4							28	28
511101	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	TW1	9						17	26
		TW2	9						17	26
		TW3	9						17	26
		TW4							26	26
511102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	TW1							27	27
		TW2							27	27
		TW3							27	27
		TW4							27	27
511103	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	TW1							24	24
		TW2							24	24
		TW3							24	24
		TW4							24	24
511104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	TW1							8	8
		TW2							8	8
		TW3							8	8
		TW4							8	8

E-PERFORMANCE SISTEM AKU

e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&ed_unit_kerja...

Home Dashboard BSC Data Master Target Kinerja Input Data Perencanaan Realisasi Sakip Lainnya Ubah Password Keluar

511.105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE	TW1							19	19
		TW2							19	19
		TW3							19	19
		TW4							19	19
511.106	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TERNATE	TW1	9						16	25
		TW2	9						15	25
		TW3	9						16	25
		TW4	1						24	25
511.107	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	TW1	9						15	24
		TW2	9						15	24
		TW3	9						15	24
		TW4	1						22	24
511.108	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	TW1	7						16	23
		TW2	9						14	23
		TW3	7						16	23
		TW4	4						19	23
511.109	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WEDA	TW1	9						15	24
		TW2	9						15	24
		TW3	9						15	24
		TW4							24	24

SEMAKIN PASTI

E-PERFORMANCE SISTEM AKU

e-performance.kemankumham.go.id/main.php?mcd=home&ed_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&ed_unit_kerja...

Home Dashboard BSC Data Master Target Kinerja Input Data Perencanaan Realisasi Sekip Lainnya Ubah Password Keluar

511110	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA LABUHA	TW1	9						17		26
		TW2	9						17		26
		TW3	9						17		26
		TW4							26		26
511111	BALAI PEWASARAKATAN TERNATE	TW1							12		12
		TW2							12		12
		TW3							12		12
		TW4							12		12
511112	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	TW1	9						2		11
		TW2	9						2		11
		TW3	9						2		11
		TW4							11		11
511113	BALAI PEWASARAKATAN KELAS II TIDORE	TW1	9						3		12
		TW2	9						3		12
		TW3	9						3		12
		TW4							12		12
511112	DIVISI IMIGRASI MALUKU UTARA	TW1	2								2
		TW2	2								2
		TW3	2								2
		TW4							2		2

Browser: e-PERFORMANCE SISTEM AKUP | URL: e-performance.kemenkumham.go.id/main.php?mod=home&ed_tahun=2023&renstra_tahun=2015&renstra_tahun_sd=2019&dokumen=3&ed_unit_kerja=...

Menu: Home | Dashboard | BSC | Data Master | Target Kinerja | Input Data | Perencanaan | Realisasi | Sakip | Lainnya | Ubah Password | Keluar

S11201	KANTOR IMIGRASI TERNATE UTARA	TW1								3		3
		TW2								3		3
		TW3								3		3
		TW4								3		3
S11202	KANTOR IMIGRASI TOBELO	TW1								3		3
		TW2								3		3
		TW3								3		3
		TW4								3		3
S113	DIVISI PELAYANAN HUKUM MALUKU UTARA	TW1	15							6		21
		TW2	15							6		21
		TW3	15							6		21
		TW4								21		21
TOTAL INDIKATOR		TW1	96	0	0	0	0	0	0	264	0	380
		TW2	98	0	0	0	0	0	0	282	0	380
		TW3	96	0	0	0	0	0	0	264	0	380
		TW4	6	0	0	0	0	0	0	274	0	380

© BIRO PERENCANAAN KEMENKUMHAM 2024

Adapun realisasi perjanjian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 rata-rata mencapai target yang telah ditetapkan di Tahun 2023.

2. TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban atas kinerja instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dilaporkan setiap bulannya selama satu tahun anggaran berjalan. Namun dalam pelaksanaannya pencapaian target kinerja belum diimbangi dengan pencapaian yang maksimal. Karena selain masih banyaknya data dukung target kinerja yang tidak sesuai dengan permintaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2023 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

Hasil dari pencapaian target kinerja sudah barang tentu menjadi pengukuran kinerja dari Kantor Wilayah. Karena dari data target kinerja tersebut proses akuntabilitas Kantor Wilayah dapat terukur berdasarkan strategi, program, maupun kegiatan yang tergambar dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Target Kinerja. Melalui optimalisasi pencapaian target kinerja diharapkan dapat membantu Kantor Wilayah dalam mencapai tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, capaian dari target kinerja periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel: Target Kinerja Tahun 2023

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
DIVISI ADMINISTRASI														
DIVISI ADMINISTRASI	1	Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	100	100	100			100			100			100
	3	Implementasi Manajemen Risiko (MR)			100			100	100	100	100			100
	4	Setiap usulan revisi anggaran belanja modal dari satuan kerja ke unit utama wajib melalui kantor wilayah			100			100						
	5	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan			100			100			100			100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		yang tercatat pada SIMAK BMN												
	6	Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan dilingkungan Kantor Wilayah			100									
	7	Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah	-	-	100			100			100			100
	8	Penyajian informasi kinerja dan pemberitaan positif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	-	-	100	-	100	100	100	100	100			100
	9	Optimalisasi implementasi Corporate University dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	-	-	100	-		100	100	100	100			100
	10	Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	-	-	100	-		100	100	100	100			100
	11	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja	-	-	100	-		100			100	100		100
DIVISI PEMASYARAKATAN	1	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakat Di Bidang Pelayanan Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	Percepatan pelaksanaan Back to Basic Penyelenggaraan Pemasarakat di Bidang Pemenuhan Hak Tahanan di Lapas dan Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan di bidang pengelolaan basan baran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	Penyelenggaraaan layanan rehabilitasi pemsarakatan	95	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Terwujudnya pengembangan SDP dalam rangka transformasi layanan pemsarakatan melalui pertukaran data SPPT TI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah Piloting	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	8	Narapidana yang dinilai dan	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		memperoleh nilai sangat baik dalam pembinaan kepribadian dengan instrumen SPPN sebanyak 70%.												
	9	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	10	Pemutakhiran Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	-	100	100	-	100	-	100	100	100	-	-	-
	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	4	Monitoring dan Evaluasi Hasil Survei IPK-IKM serta Indeks integritas Organisasi dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	5	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6	Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7	Penerapan PMPJ dan Pengawasan Audit Kepatuhan Terhadap Notaris	100	100	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	8	Pembaharuan Data Notaris & Identifikasi Status Notaris	100	100	100	-	-	100	-	-	100	-	100	100
	9	Pengumpulan data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	10	Pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TUPOKSI	NO	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN											
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
		Indonesia												
	11	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stakeholder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	12	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka mendukung tahun Hak Merek dan peningkatan KIK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
	13	Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	-	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
	14	Menyelenggarakan kegiatan konsultasi teknis terkait pemanfaatan informasi paten bagi kalangan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang	100	-	-	100	-	100	100	-	-	-	-	-
	15	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi Pusat belanja perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual dengan Ruang lingkup Kab/Kota dan tradisional	-	-	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	16	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	17	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
	18	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Divisi Keimigrasian	1	Implementasi Pengembangan layanan paspor secara kesisteman	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	2	Peningkatan profesionalisme SDM dalam melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan Final Rejected di Wilayah Indonesia	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100
	3	Pengawasan penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100

Sumber: <https://kinerja.kemenkumham.go.id> per 31 Desember 2023.

3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi E-MONEV Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

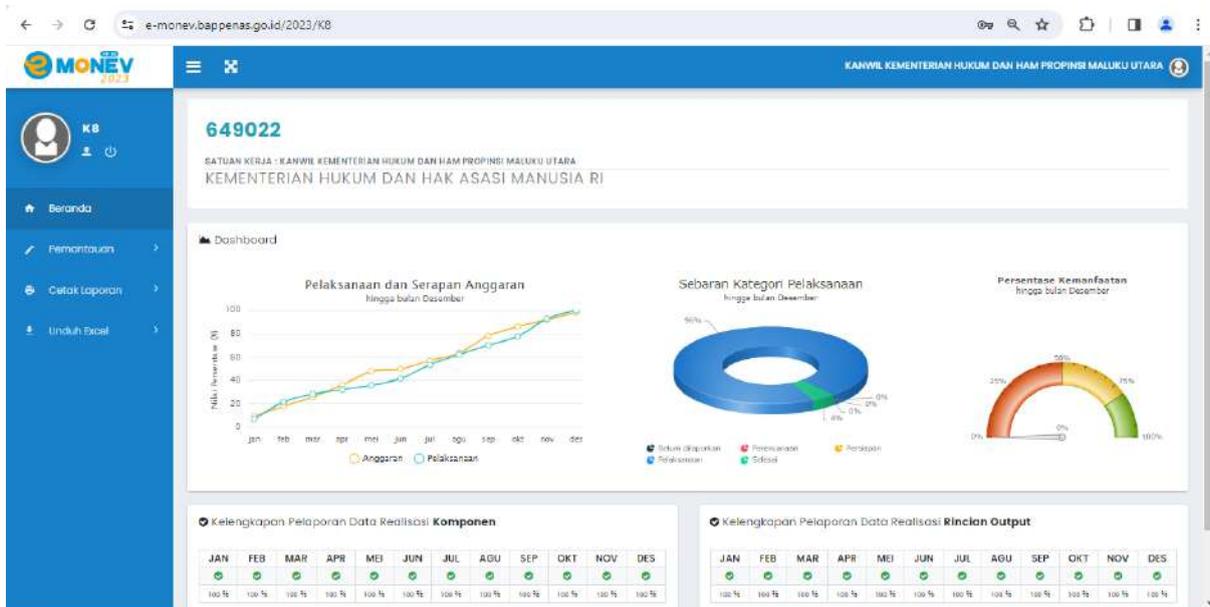
Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, diharapkan satuan kerja dapat menginput data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun rekapitulasi pengisian E-MONEV Bappenas tahun anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

**ELECTRONIC MONITORING DAN EVALUATION
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
31 Desember 2023**

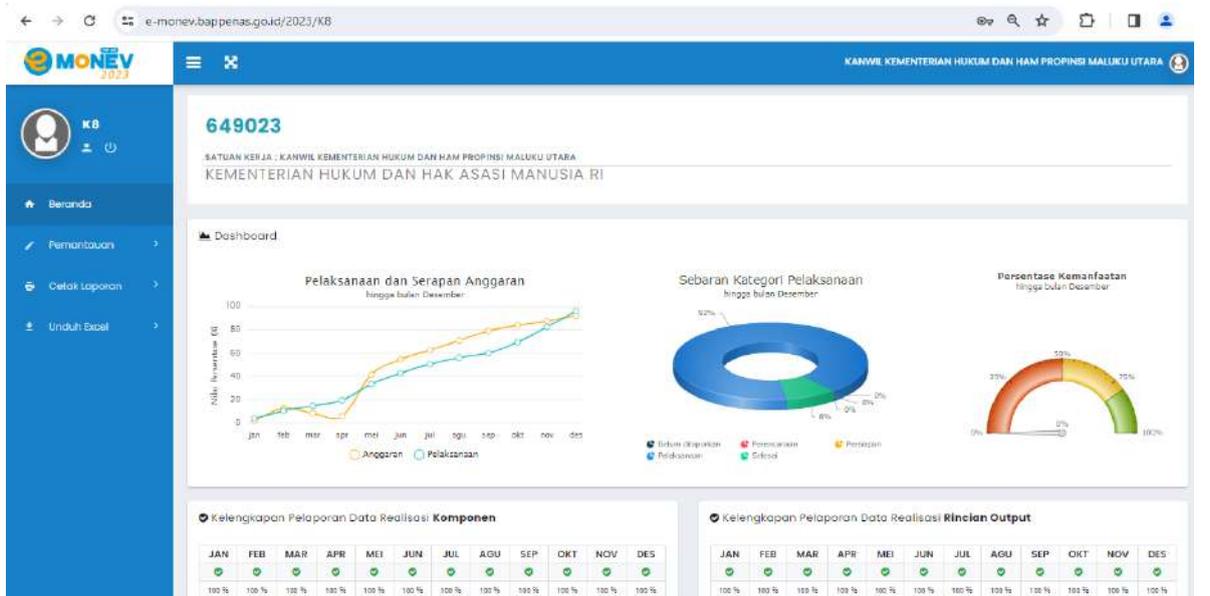
NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	STATUS KELENGKAPAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	649022	DIVISI ADMINISTRASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	649023	DITJEN AHU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	649024	DIVISI PEMASYARAKATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	649025	DIVISI KEIMIGRASIAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	649026	DITJEN KI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	649027	DITJEN PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	649028	DITJEN HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	649029	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	649030	BALITBANGKUMHAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	531891	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	684003	RUMAH TAHANAN NEGARA WEDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	352614	LPKA KELAS II TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	418350	LAPAS PEREMPUAN KELAS III TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	626161	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	632047	BALAI PEMASYARAKATAN TIDORE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	632712	RUPBASAN TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TERNATE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II TOBELO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/> Per 31 Desember 2023

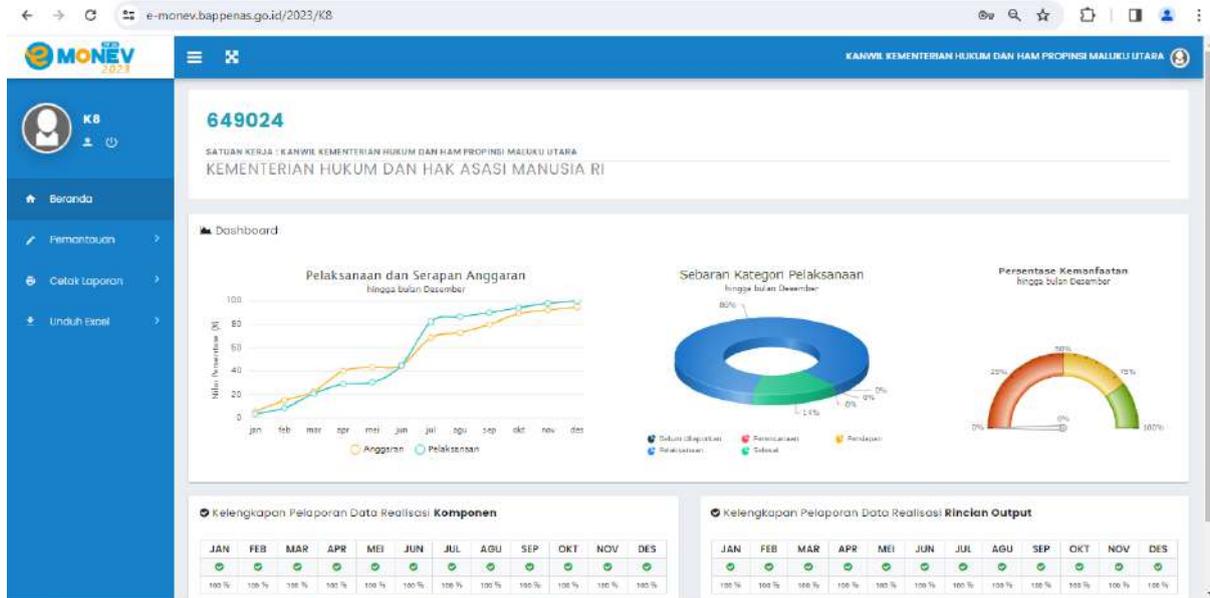
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Sekretariat Jenderal



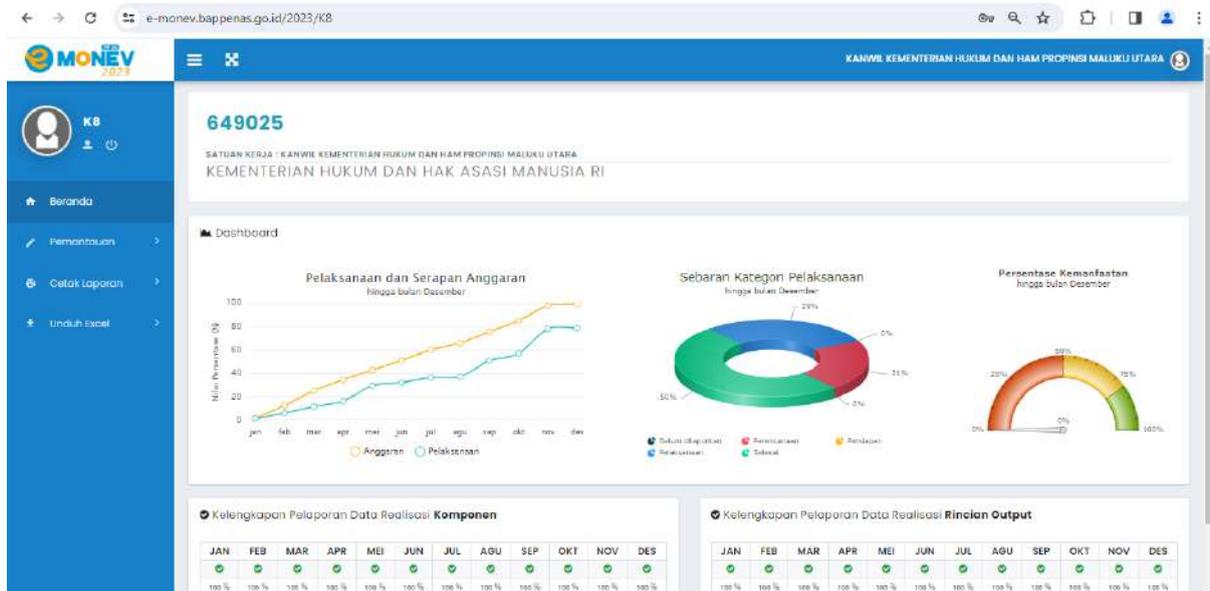
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 AHU



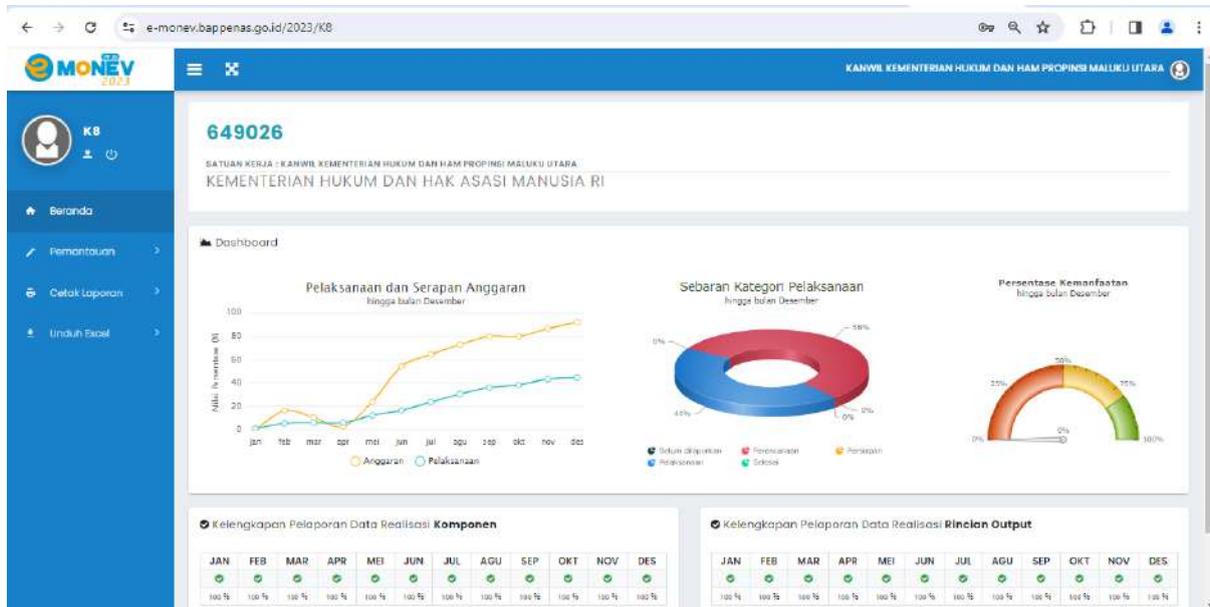
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Divisi Pemasarakatan



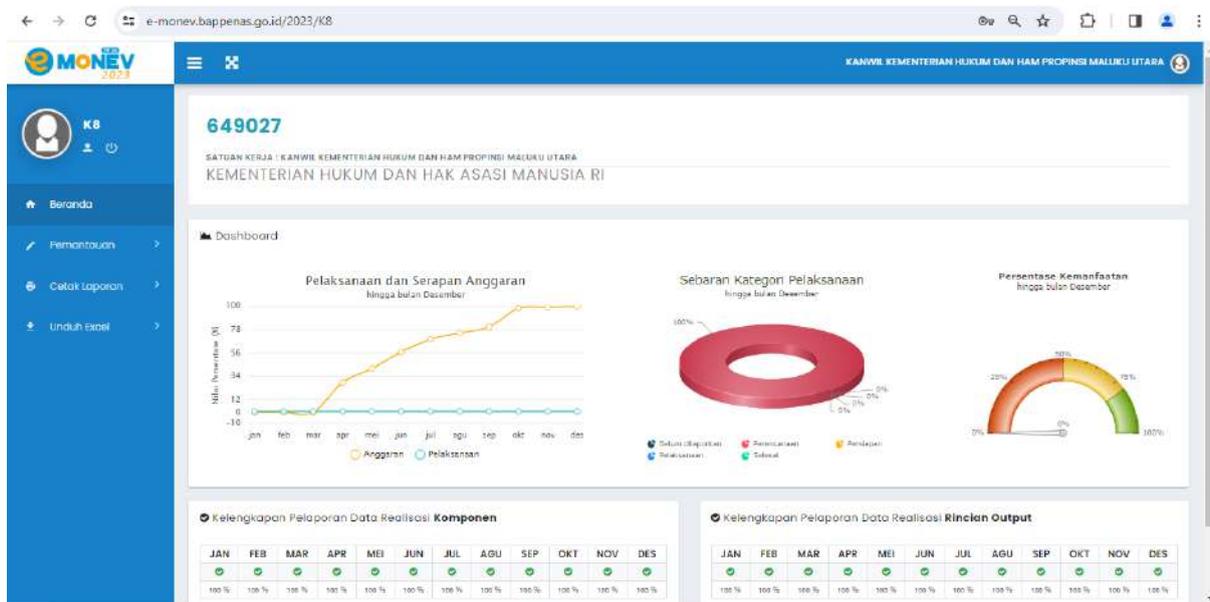
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Divisi Keimigrasian



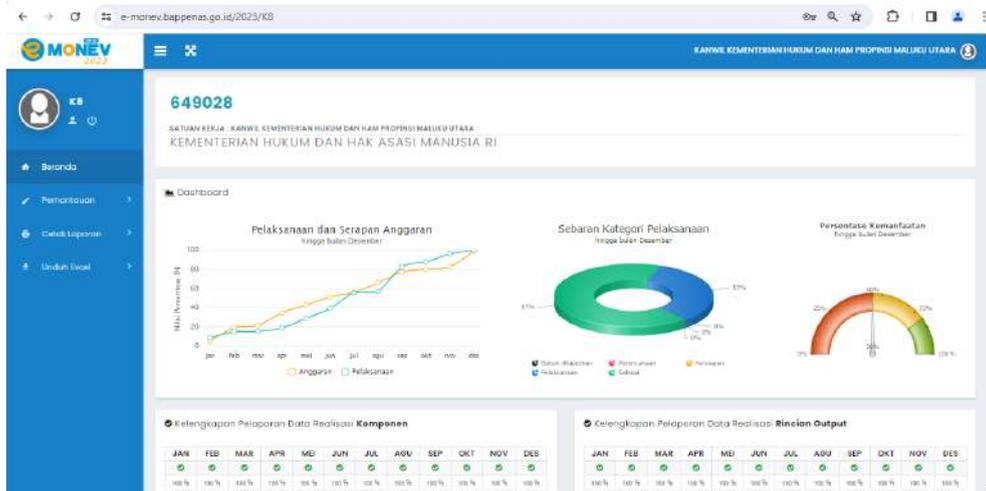
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Kekayaan Intelektual



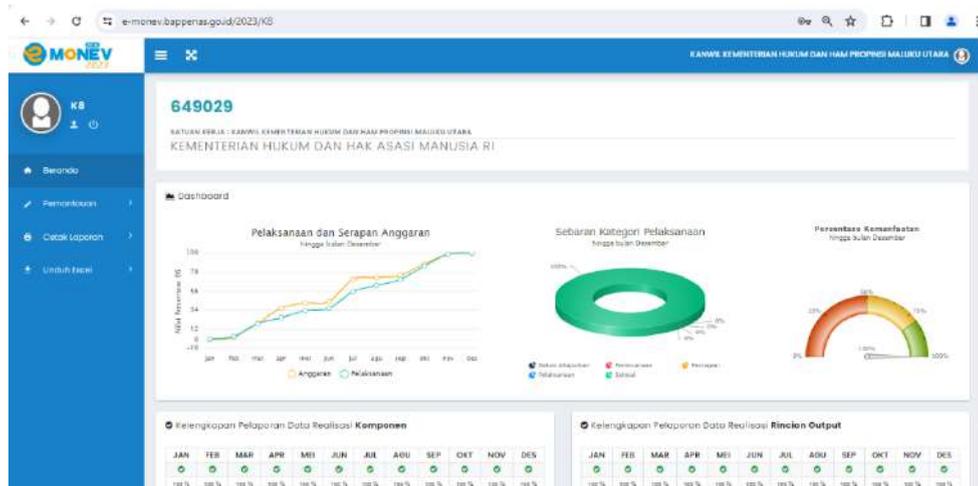
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Ditjen PP



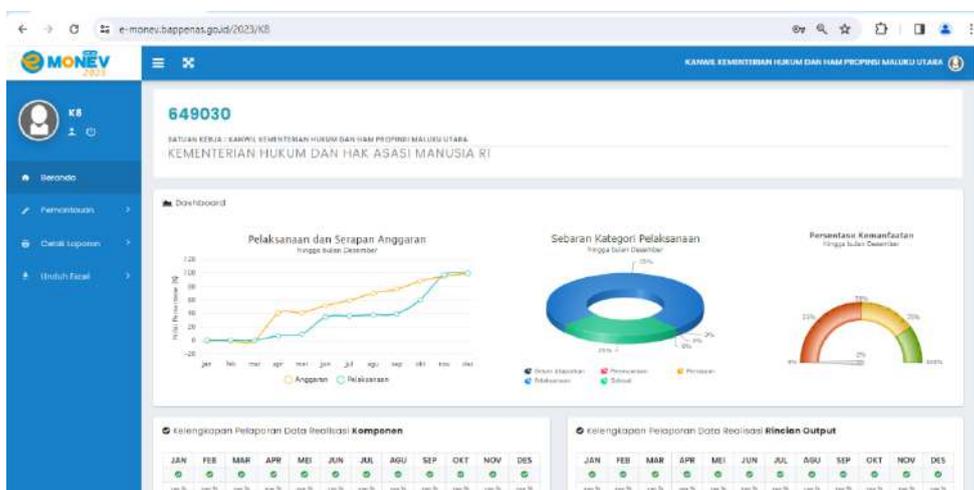
Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 Ditjen HAM



Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 BPHN



Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2023 BALITBANGKUMHAM



4. Kegiatan Prioritas Nasional



Kantor Wilayah Maluku Utara sebagai pelaksana Tusi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah juga mengemban tanggung jawab atas terlaksananya Program Prioritas Nasional. Kantor Wilayah Maluku Utara mengampu

1. Program Prioritas Nasional ke-1 "Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan"
2. Program Prioritas Nasional ke-3 "Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing"
3. Program Prioritas Nasional ke-4 "Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan"
4. Program Prioritas Nasional ke-7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik".

Dalam menjabarkan Program Prioritas Nasional ke-7 "Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik", Kantor Wilayah Maluku Utara melaksanakan program layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Secara garis besar pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk membantu rakyat miskin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Negara menjamin bahwa seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh keadilan. Di Maluku Utara sebanyak **300** orang telah mendapatkan manfaat dari layanan ini, dan **99.98%** dari anggaran bantuan hukum telah terserap.

Bantuan Hukum	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Penerima Manfaat
Litigasi	Rp.915.000.000	Rp. 914.810.000	99,97%	246 Orang
Non-Litigasi	Rp. 159.650.000	Rp. 159.650.000	100%	54 Orang
Total	Rp. 1.074.650.000	Rp. 1.074.460.000	99,98%	300 Orang

Selain itu untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional ke-7, Kanwil juga melaksanakan tuisi fasilitasi pembentukan regulasi. Tuisi ini dilaksanakan oleh subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang selanjutnya disebut Subbidang FP2HD) Pada Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi. Dalam kurun periode 2023, Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah difasiltasi sebanyak 118 rancangan/produk hukum.

Dalam mendorong transformasi pelayanan publik, Kanwil Maluku Utara berupaya memaksimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui monitoring dan evaluasi secara periodik. Monitoring penerapan standar pelayanan publik dilakukan untuk melihat apakah standar pelayanan publik sudah tersusun secara benar, terinternalisasi dengan baik dan terimplementasi secara maksimal. Disamping itu jajaran Kanwil Maluku Utara juga telah menciptakan dan mengembangkan metode layanan publik berbasis IT. Beberapa aplikasi diciptakan dan berdampak langsung pada masyarakat sehingga layanan jauh lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya **Program Prioritas Nasional ke-4 “Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan”** dilaksanakan melalui program pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Satuan Kerja. 15 Satuan Kerja dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sudah dimulai sejak 6 tahun Tahun lalu (Tahun 2018 sampai tahun 2023). Dari tahun ke tahun Kantor Wilayah Maluku Utara beserta jajarannya terus berupaya menciptakan inovasi di layanan publik, mempersiapkan SDM pelayan masyarakat, pemenuhan sarana prasarana layanan, memberikan layanan informatif media sosial, mempermudah dan mempercepat layanan publik sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Jumlah Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dalam 6 tahun ini sebanyak 2 Satuan Kerja dengan rincian **2 Satker WBK** atau **12.5% dari jumlah 15 satker + 1 Kanwil** yang ada di Maluku Utara.

TAHUN	PREDIKAT	NAMA SATUAN KERJA
2022	WBK	Kanim Kelas II Non TPI Tobelo
2023	WBK	Rutan Kelas IIB Ternate

Program Prioritas Nasional ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada Pembimbing Kemandirian (PK Bapas). Diklat PK Bapas dilaksanakan dalam rangka membentuk PK Bapas yang handal, profesional dan memahami pembaharuan hukum di Indonesia. Corporate University yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM juga ikut serta dalam mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran individu dan organisasi dilingkungan internal Kantor Wilayah. Pembinaan, sosialisasi, maupun pendampingan dilaksanakan dilingkungan jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara sebagai upaya membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat.

Program Prioritas Nasional ke-1 “Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Untuk mencapai target pada program prioritas ini, Kanwil Maluku melayani pendaftaran Perusahaan Perorangan. UMKM didorong untuk berbadan hukum sehingga dapat meningkatkan kedudukannya di lingkungan perekonomian global. Selain itu layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) juga dilaksanakan untuk melindungi hak perorangan/kelompok untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang diciptakannya. Layanan Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam, yaitu pendaftaran hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan komunal.

5. Capaian kinerja dan prestasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara berhasil meraih beragam capaian kinerja dan prestasi Tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

- 1) Terbaik I Kategori Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2022, Jakarta, 7 Februari 2023



- 2) Terbaik II Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2022, Jakarta 13 Februari 2023



- 3) Terbaik I Kategori Kinerja Anggaran Terbaik Semeste I Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe C, 17 Juli 2023



- 4) Terbaik II Kategori Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023, 25 Oktober 2023



- 5) Peringkat II Kategori Pengelolaan BMN dengan Kontribusi PNBP Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023



- 6) Peringkat II Kategori Mitra Layanan Penilaian BMN/BMD Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023



- 7) Peringkat II Kategori IKPA Terbaik pagu sedang Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, baik dari aspek finansial maupun non finansial, selama periode tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (public accountability).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2020-2024. Dengan memiliki 22 Sasaran Strategis dan 60 Indikator Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis dari 4 Program Utama yang diemban Kementerian Hukum dan HAM RI. Seluruh indikator kinerja Kantor Wilayah Maluku Utara di tahun 2023 tercapai secara optimal dan bahkan melebihi targetnya.

Sementara itu capaian kinerja dari aspek keuangan, penyerapan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara ditahun 2023 mencapai mencapai 98,78% atau sebesar Rp. 104,906,335,510,- dari total anggaran sebesar Rp. 106,205,259,000. Walaupun capaian kinerja dari aspek serapan anggaran belum mencapai 100%, namun apabila dinilai dari kualitas kegiatan yang dilaksanakan, maka dapat dikatakan pelaksanaan program kegiatan pada Kantor Wilayah Maluku Utara berjalan dengan cukup efisien dengan nilai efisiensi kinerja sebesar 99,72 berdasarkan aplikasi SMART. Sedangkan Capaian Kinerja Anggaran yang didapatkan dari bobot nilai SMART dan IKPA didapatkan nilai 98,38. Keaktifan dalam pengisian aplikasi E- Monev Bappenas juga membuahkan hasil dengan nilai 100% pada Januari sd. Desember 2023 (kategori hijau).

Bukan berarti tercapainya kinerja ini berjalan tanpa hambatan. Beberapa hambatan dan kondisi yang dihadapi dalam periode 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (Rencana Penarikan Dana/RPD) yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilaksanakan diakhir tahun hingga akhir jadwal pertanggungjawaban keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran.
2. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan Tusi.
3. Kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan pelaksanaan Tusi.
4. Masih terdapat Gap di beberapa Layanan Hukum, terutama pada Layanan KI, AHU dan Yankomas.

Pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja yang telah dicapai akan dievaluasi dan dipertahankan serta disesuaikan dengan sasaran strategis tahun yang akan datang, dengan komitmen yang lebih baik dan terarah dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

B. SARAN

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara:

1. Akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan melalui peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan yaitu dengan memastikan RPD menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/ kegiatan Satker.
2. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), dengan cara melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama pada kegiatan yang merupakan Program Prioritas Nasional (PRINAS). Selanjutnya monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, dengan melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan

- dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
3. Peningkatan koordinasi yang intensif, lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
 4. Melakukan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; pengelolaan Sarpras dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.
 5. Meminimalisasi Gap Layanan yang terjadi dengan bekerja secara optimal. Konsisten dan komit terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Dan tentu upaya ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.
 6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 10 Kabupaten/Kota dengan potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis hasil komoditi lokal. Untuk merespon tuntutan masyarakat tersebut Kanwil Maluku Utara berkolaborasi dengan Pemprov/Pemda untuk membangun Klinik KI sebagai sarana agen informasi dan pendaftaran untuk mengoptimalkan layanan perlindungan KI di Wilayah Maluku Utara. Pada Pelayanan AHU diperlukan upaya kerjasama terkait layanan Perseroan Perorangan dengan Dinas yang menangani perizinan berusaha di Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga layanan Perseroan Perorangan bisa dilayani di Daerah.
 7. Permohonan Yankomas tidak diimbangi dengan SDM Pelayanan yang membutuhkan keahlian tertentu, maka perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait. Perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan kegiatan koordinatif yang memerlukan koordinasi antar lembaga untuk pelaksanaannya, sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM harus disesuaikan dengan kewenangan atas kasus yang harus ditindak lanjuti.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Di masa mendatang,

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



Ternate, 12 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ignatius Purwanto
NIP. 196703161992031001

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan;**
- **Perjanjian Kinerja Tahun yang akan datang;**
- **Data Pendukung Lainnya.**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA

NOMOR : W.29.6926-PR.03 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas :
- a. Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
 - b. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
 - c. Melakukan reviu dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
 - d. Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
 - e. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - f. Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 12 Desember 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IGNATIUS PURWANTO
NIP. 196703161992031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: <https://bsr.e.bssn.go.id/verifikasi>

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas :
 - Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
 - Melakukan reviu dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
 - Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
 - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 12 Desember 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :
IGNATIUS PURWANTO
NIP. 196703161992031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
NOMOR : W.29.6926-PR.03 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 Desember 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ignatius Purwanto NIP. 196703161992031001	Penanggung Jawab
2.	Andi Basmal NIP. 197202151992031002	Ketua
3.	Irwan Kadir NIP. 198102042002121001	Sekretaris
4.	Jufri Hamid NIP. 19790915 200212 1 002	Anggota
5.	Raudatul Jannah NIP. 198608052010012015	Anggota
6.	Berri Priandi NIP. 19891109 201901 1 001	Anggota
7.	Zaky Rahman NIP. 198203032010121001	Anggota
8.	Masita Kasim NIP. 198303292009122001	Anggota
9.	Muhammad Iqbal NIP. 198001062010121001	Anggota
10.	Febry Wulandari NIP. 199702042020122003	Anggota
11.	Guntur Satria NIP. 19881221 201901 1 001	Anggota
12.	Alhiriani NIP. 198912172022032003	Anggota
13.	Nova Mustika NIP. 198911052010122003	Anggota
14.	Syafi Udin NIP. 199412162017121001	Anggota
15.	Monalisa Amasani NIP. 199309282017122001	Anggota
16.	Rizky Syafrial S. Samad NIP. 20001014 202012 1 002	Anggota



Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 12 Desember 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH



Dandatangani secara elektronik oleh :
IGNATIUS PURWANTO
NIP. 196703161992031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 196703311990011 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi, berorientasi, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	87,0 92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKP minimal "BB" 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RS minimal 90	94% 94%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitas Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.232.087.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 13.232.087.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 196703311990011 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 196703311990011 001

SEMAKIN PASTI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196009181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 196507091986031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	50%
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNJP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp2.234.412.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp2.234.412.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196009181994031001

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 196507091986031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Reynhard Silitonga
NIP. 67030332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	50,0 % 80,0 % 1,0 % 90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 (Nilai Indeks) 85 (Nilai Indeks) 85 (Nilai Indeks) 83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basen Baran	56 (Nilai Indeks) 82,5 (Nilai Indeks) 60 (Nilai Indeks) 74 (Nilai Indeks) 80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Koaman dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstay/ing 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyalutan Hukum 4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90% 90% 90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pemilahan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan prodiak memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak ramisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	70% 99% 85% 85% 17% 31% 72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basen Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

SEMAKIN PASTI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Marunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	60% 55% 35%
6.	Meningkatnya Pemanuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Penguasaan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80% 100% 90% 90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Keterlibatan	1. Persentase pengadilan yang diselesaikan 2. Persentase pencegahan gangguan kambit 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak gangguan Kambit 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambit secara tuntas	85% 80% 85% 80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengadilan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kambit yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kambit 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kambit secara tuntas	85% 80% 85% 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana persampun (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (dilekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	80% 94% 97% 80% 65% 65% 80% 27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Ponegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 15.029.283,000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UFT Pemasyarakatan	Rp. 41.575.233,000

Jakarta, 2 Januari 2023

Reynold Sitonga
NRP. 20030332

M. Adnan
NIP. 196507091986031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekastjajana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekastjajana
NIP. 19745511990031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 1965070919860031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Iktu berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Keamanan Stabilitas melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 8.492.085.000,-
Penyenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 8.492.085.000,-

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Widodo Ekastjajana
NIP. 19745511990031001

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 1965070919860031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razili
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razili
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan eses penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	10 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	10 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.587.436.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.587.436.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razili
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Pjt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pjt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M.Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan esns pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan 2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan 3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80% 200 Orang 80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerianham	80%
2.	Tersolenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 272.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 272.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Pjt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M.Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Muslimin Abd
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Muslimin Abd
NIP. 196211211982031 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM	75,0% 45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang merindukanjuri hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	25% 60% 75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang merindukanjuri hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah 1 Instansi Pemerintah 1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersadanya rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 283,561.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 283,561.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Muslimin Abd
NIP. 196211211982031 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 198603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197155011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 196507091986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa/keurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77 (Indeks) 70% 82,0% 80,0% 76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan pembinaan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan 2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	21% 15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77 (Indeks) 82% 80% 76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terwujudnya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 4. Persentase desa/keurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	82% 80% 76,75 (Indeks) 70% 20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 132.254.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 132.254.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.184.444.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.184.444.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197155011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M Adnan
NIP. 196507091986031002

SEMAKIN PASTI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Adnan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM

Iwan Kurniawan
NIP. 19640919 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 1986031 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MALUKU UTARA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia 2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80% 81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia 2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	80% 1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 253.345.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 253.345.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM

Iwan Kurniawan
NIP. 19640919 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

M. Adnan
NIP. 19650709 1986031 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Delam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 19670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Maluku Utara



Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002

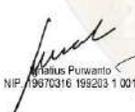
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.610.692.000
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 14.610.692.000

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 19670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Maluku Utara



Andi basmal
NIP. 19720215 199203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Delam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Basmal
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 09 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Maluku Utara



Andi Basmal
NIP. 19720215 199203 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hensah
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

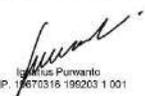
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 19670316-199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Maluku Utara



Hensah
NIP. 19741221-199703 1 001









**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai standar 85 % 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 95 % 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 98 % 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 90 % 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 90 % 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 90 % 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (bermasi sembuh) 90 % 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba 29 %	
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstayng 100 % 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penguatan Hukum 100 % 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 100 %	









No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kelembagaan, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kelembagaan 75 % 2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 100 % 3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 90 % 4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 90 % 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Seder, Patuh dan Disiplin 19 % 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 34 % 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 77 %	
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengabdian Bakti Sosial di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 90 % 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang kekuatan hukum tetap 100 %	
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 90 % 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 90 % 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 90 % 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 90 %	
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 70 % 2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 50 % 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya 40 %	









SEMAKIN PASTI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya Penuhuan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengelasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak Integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	85 % 100 % 100 % 100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan) 3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 4. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) 6. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	0 UPT 0 UPT 0 UPT 0 UPT 0 UPT 1 UPT

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 771,870,000
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 771,870,000

Terate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwenlo
NIP. 19670316 199203 1 001

Hensah
NIP. 19741221 199703 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU URATA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hensah
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Terate, 09 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Maluku Utara

Hensah
NIP. 19741221 199703 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ian Fidiyanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Seleku etasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 5670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara



Ian Fidiyanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks) 3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.550.395.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.550.395.000

Temate, 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 5670316 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara



Ian Fidiyanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ian Fidiyanto Markos
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Temate, 09 Januari 2024

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Maluku Utara



Ian Fidiyanto Markos
NIP. 19691211 199003 1 001






**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aisyah Lailiyah
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ignatius Purwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

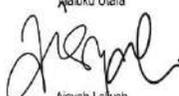
Tema: 09 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Maluku Utara



Ignatius Purwanto
NIP. 19670315 199203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Maluku Utara



Aisyah Lailiyah
NIP. 19741206 200112 2 001



















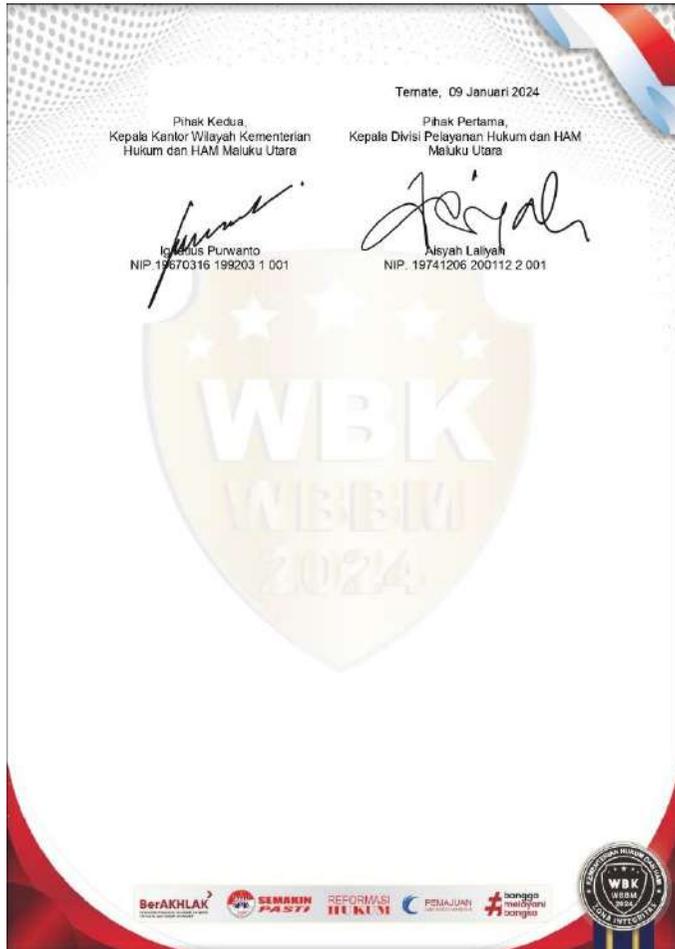



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kabikota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDJHN di	Persentase anggota JDJHN yang dikelola terhadap total anggota JDJHN di wilayah	25 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	wilayah		
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi 2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	82 % 80 %
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kementasan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 5.905.306.000
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 2.685.886.000
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.958.619.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 1.260.801.000
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 497.777.000
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 372.000.000
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 125.777.000
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 349.848.000
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 349.848.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 314.675.000
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 314.675.000



 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA DIVISI ADMINISTRASI</p>	Nomor SOP	W29.UM.01.01-129
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	9 Januari 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah  M Adnan NIR: 196507091986031002
	Nama SOP	Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2 Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3 Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik; 4 Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan; 5 Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi; 6 Memahami prosedur monitoring dan evaluasi. 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 SOP Surat Keluar Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer/Printer/Scanner; 2 Jaringan Internet; 3 Aplikasi surat masuk/keluar elektronik; 4 Alat komunikasi. 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
Penyusunan LKJIP diperlukan untuk menyajikan Laporan Kinerja Kementerian secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PERMINTAAN DATA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana	Kadiv	Staf/Ka. UPT				
1	Memerintahkan Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyampaikan format permintaan data LKJIP	MULAI					Surat permintaan LKJIP dari Sekretaris Jenderal	5 menit	Dokumen format permintaan data LKJIP	
2	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk menyampaikan format permintaan data LKJIP kepada seluruh divisi						Dokumen format permintaan data	5 menit	Arahan penyampaian format permintaan data LKJIP	Pelaksana merupakan Tim Penyusun LKJIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
3	Menyusun dan menyampaikan surat permintaan data LKJIP kepada seluruh divisi						Arahan penyampaian format permintaan data LKJIP	2 jam	Surat/Nota Dinas permintaan data LKJIP	
4	Memberikan disposisi kepada staf dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menindaklanjuti surat permintaan data LKJIP						Surat/Nota Dinas permintaan data LKJIP	5 menit	Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	
5	Menindaklanjuti surat permintaan data LKJIP dengan sesuai petunjuk dan format yang ditetapkan						Surat/Nota Dinas yang telah didisposisi oleh Kadiv	10 hari	Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	Divisi yang memiliki UPT di bawahnya, data LKJIP merupakan himpunan dari seluruh UPT. Y: Ya T: Tidak
6	Mengoreksi data LKJIP, menyetujui dan menyampaikannya kepada Tim Penyusun LKJIP						Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	1 jam	Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya	
7	Mengoreksi dan menghimpun data LKJIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan						Dokumen data LKJIP beserta data dukungannya yang disampaikan oleh Kadiv	1 jam	Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
8	Mengoreksi data LKJIP dari seluruh divisi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat						Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	1 jam	Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	
9	Melakukan koreksi akhir data LKJIP dari seluruh divisi dan menetapkannya sebagai data final yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah	SELESAI					Himpunan data LKJIP dari seluruh divisi beserta data dukungannya	1 jam	Penetapan data final LKJIP Kantor Wilayah	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA DIVISI ADMINISTRASI</p>	Nomor SOP	W.29.UM.01.01-131
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	9 Januari 2023
	Disahkan Oleh	 Kepala Kantor Wilayah M. Adnan NIP. 198507091986031002
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2 Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3 Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik; 4 Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan; 5 Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi; 6 Memahami prosedur monitoring dan evaluasi.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 SOP Surat Keluar Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1 Komputer/Printer/Scanner; 2 Jaringan Internet; 3 Aplikasi surat masuk/keluar elektronik; 4 Alat komunikasi.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
Permintaan data LKjIP sangat diperlukan untuk menghasilkan LKjIP yang berkualitas. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP akan terhambat dan tidak bisa menyajikan data yang akurat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag PH	Kasubbag PP	Pelaksana				
1	Memberikan disposisi kepada Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	MULAI					Surat Sekretaris Jenderal	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi ke pada Kepala Bagian Program dan Humas untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kepala Subbagian Program dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kadivmin	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kabag PH	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah didisposisi oleh Kabag PH	1 jam	Arahan penyusunan laporan oleh Kasubbag PP	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Arahan penyusunan laporan oleh Kasubbag PP	1 bulan	Draft/Konsep LKIP (Draft LKJIP Kanwil merupakan himpunan dari seluruh LKJIP Satkerdi lingkungan Kanwil Maluku Utara)	Pelaksana merupakan TIM Penyusun LKJIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Draft/Konsep Laporan	1 hari	Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag PP	Y: Ya T: Tidak
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag PP	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag PH	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag PH	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	30 menit	LKJIP yang telah ditandatangani Kakanwil	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA
JL. CENGKEH AFO NO. 40 TERNATE**